

**EVALUASI DAMPAK KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
PELABUHAN PERIKANAN PANTAI (PPP)
TAMPERAN
TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL EKONOMI
MASYARAKAT PESISIR SEKITAR
(STUDI PADA PELABUHAN PERIKANAN PANTAI (PPP) TAMPERAN
KABUPATEN PACITAN)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**MIZHAR ANTON SUJARWO
105030100111044**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2014**

MOTTO

“Tiada yang mudah selain yang Engkau mudahkan, dan Engkau jadikan kesusahan itu mudah jika Engkau menghendakinya mudah.”

-HR. Ibnu Habban

“Sesuatu yang belum dikerjakan seringkali tampak mustahil, kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik.”

- Evelyn Underhill



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : **Evaluasi Dampak Kebijakan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Sekitar (Studi Pada Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan Kabupaten Pacitan)**

Disusun oleh : Mizhar Anton Sujarwo

NIM : 105030100111044

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

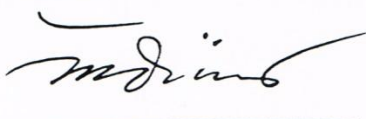
Program Studi : Administrasi Publik

Konsentrasi : Administrasi Publik

Malang, 4 Juli 2014

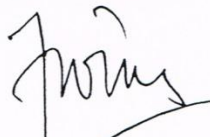
Komisi Pembimbing

Ketua



Dr. Mardiyono, MPA
NIP. 19520523 197903 1 000

Anggota



Wima Yudho Prasetya, S.Sos, MAP
NIP. 19790523 200604 1 002

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 4 Juli 2014



Mizhar Anton Sujarwo
105030100111044

TANDA PENGESAHAN

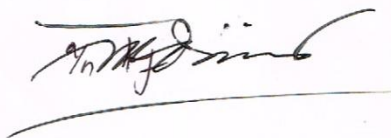
Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 12 Agustus 2014
Jam : 08.00 WIB
Skripsi atas nama : Mizhar Anton Sujarwo
Judul : Evaluasi Dampak Kebijakan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Sekitar.
(Studi Pada Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan Kabupaten Pacitan)

dan dinyatakan lulus

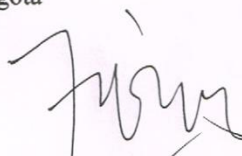
MAJELIS PENGUJI

Ketua



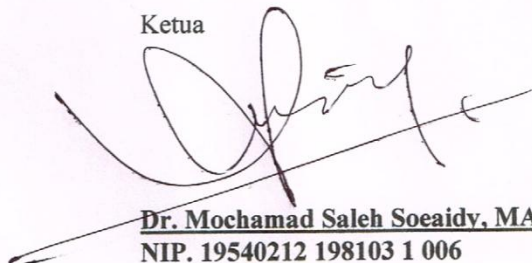
Dr. Mardivono, MPA
NIP. 19520523 197903 1 001

Anggota



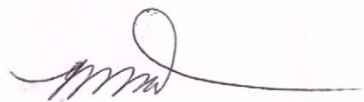
Wima Yudho Prasetya, S.Sos, MAP
NIP. 19790523 200604 1 002

Ketua



Dr. Mochamad Saleh Soeaidy, MA
NIP. 19540212 198103 1 006

Anggota



Drs. Minto Hadi, M.Si
NIP. 19540127 198103 1 003

RINGKASAN

Mizhar Anton Sujarwo, 2014, **Evaluasi Dampak Kebijakan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Sekitar** (Studi pada PPP Tamperan Kabupaten Pacitan). Dr. Mardiyono, MPA, Wima Yudho Prasetya, S.Sos, MAP, 129 Hal +

Indonesia sebagai Negara maritim mempunyai wilayah laut seluas lebih dari 3,5 juta km², yang merupakan dua kali luas wilayah daratan. Perairan yang sangat luas tersebut mempunyai potensi sumberdaya ikan yang besar. Untuk menggali potensi tersebut diperlukan pelabuhan sebagai tempat berlabuh kapal, pendaratan ikan, memperlancar operasi penangkapan, dan pemasaran. Oleh karena itu, pemerintah pusat melalui Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor 48 Tahun 2007 tentang Peningkatan Status Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tamperan menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan.

PPP Tamperan dulunya merupakan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tamperan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan pada tahun 1977. Dengan adanya pembangunan PPP Tamperan tersebut diupayakan masyarakat pesisir sekitar mendapatkan dampak positif terhadap perubahan kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya dengan memanfaatkan peluang ekonomi yang ada dari pembangunan PPP Tamperan. Pada penelitian ini, peneliti bertujuan untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah kebijakan pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan di Kabupaten Pacitan? 2) Bagaimanakah dampak perubahan sosial dari pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan terhadap masyarakat pesisir sekitar? 3) Bagaimanakah dampak perubahan ekonomi dari pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan terhadap masyarakat pesisir sekitar?

Prosedur yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian pada PPP Tamperan, Kelurahan Sidharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan.

Dari hasil penelitian ini diketahui, adanya kebijakan dari pemerintah terkait dengan pembangunan PPP Tamperan memberikan dampak perubahan sosial ekonomi bagi masyarakat pesisir sekitar. Dampak perubahan yang dialami oleh masyarakat pesisir sekitar adalah adanya perubahan fisik sarana dan prasarana pelabuhan yang lebih baik dari sebelumnya. Perubahan yang lain adalah dengan adanya penyerapan tenaga kerja dari usaha masyarakat dan peningkatan jumlah pendapatan bila dibandingkan dengan sebelum adanya kebijakan tersebut.

Kata kunci: kebijakan, pembangunan, dampak, sosisa ekonomi

SUMMARY

Mizhar Anton Sujarwo, 2014, **Policies Impact Evaluation of Development of Tamperan Coastal Fishery Ports (PPP) against Social Change around the Coastal Economy (Studies in Pacitan, Tamperan PPP)**. Dr. Mardiyono, MPA, Wima Yudho Prasetya, S.Sos, MAP, 129 Page +

Indonesia as a maritime country has a seaocean area of more than 3.5 million km², which is twice bigger than the land area. The very broad seas have potentially huge fish resources. To explore this potential, it will require port as the ship berths, landing fish, facilitate fishing operations, and marketing. Therefore, the central government through the Minister of Marine and Fisheries of the Republic of Indonesia issued a Ministerial Decree (Decree) No. 48 of 2007 on Improving Status of Tamperan Fish Landing Base (PPI) becomes Coastal Fishery Ports (PPP) Tamperan.

Tamperan Fish Landing Base (PPI) built by Pacitan Local Government in 1977. By the development of PPP Tamperan, surrounding coastal communities sought a positive impact on the socio-economic changes in the society by utilizing existing economic opportunities of PPP Tamperan development. In this study, researchers aimed to answer the problem formulation as follows: 1) What is the Development Policy of Tamperan Coastal Fishery Ports (PPP) in Pacitan? 2) What is the impact of social change on the development of Tamperan Coastal Fishery Ports (PPP) to the surrounding coastal communities? 3) What is the impact of the economic changes of the construction of Tamperan Coastal Fishery Ports (PPP) to the surrounding coastal communities?

The procedure used in this study is qualitative research by using descriptive approach. In this study, researchers research on PPP Tamperan, Sidoharjo Village, Pacitan Regency.

The research findings show that, the government policies of development of PPP Tamperan has relation with economic impact and social changes to coastal communities. The impact of the changes experienced by the surrounding coastal communities is that there is a physical change in port facilities and infrastructure which is better than before. Another change is that with the employment of public enterprises and an increase in total revenues when compared with the pre-existing policy.

Keywords: policy, development, impact, sosisa economic

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Evaluasi Dampak Kebijakan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Sekitar(Studi Pada Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan Kabupaten Pacitan).”**

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. BambangSupriyono, MS,
selakuDekanFakultasIlmuAdministrasiUniversitasBrawijaya Malang.
2. Bapak Dr. ChoirulSaleh, M.Si,
selakuKetuaJurusanAdmnistrasiPublikFakultasIlmuAdministrasiPublik.
3. Ibu Lely Indah Mindarti, M.Si, selakuKetua Program
StudiAdmnistrasiPublikFakultasIlmuAdministrasiUniversitasBrawijaya.

4. Bapak Dr. Mardiyono, MPA, dan WimaYudhoPrasetya, S.Sos, MAP, selakuKetuaDosenPembimbing dan AnggotaDosenPembimbing yang telahmemberikanbimbingandanarahandalampenyusunanskripsiini.
5. Bapak Dr. Mochamad Saleh Soeaidy, MA, dan Drs. Minto Hadi, Msi, selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan saran atau masukan dalam ujian skripsi yang telah dilaksanakan.
6. Bapak Imam Subekti, S.Pi, selakuKepala UPPPP TamperanPacitan yang telahmemberikankesempatanuntukmelakukanpenelitiannskripsiini.
7. Kedua orang tuapenulisBapakSlametSudjaridanIbu Sri Sulasikin, yang telahmemberikandorongandandukungansertakasih sayang dandaoda yang tulusselamainisehinggaskripsiinidapatselesaitepatwaktu.
8. Yang terkasihRizkyaHaerani, terimakasihatassegaladukungannya, waktu, tenaga, kritikdansarannyaselamini.
9. Sahabatku Iqbal W. Tyasa, RahadianSaputra, IchaFatikha, danNopanAnestaSoerahmad, yang selalumemberikankeceriaandaninspirasiidalampenulisandanpenyusunanskripsiini.
10. Serta seluruhteman-temanseperjuanganAdministrasiPublikangkatan 2010 yang selalumemberikaninspirasiidalampenulisandanpenyusunanskripsiini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 4 Juli 2014

DAFTAR ISI

MOTTO

TANDA PENGESAHAN

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

RINGKASAN	i
-----------------	---

SUMMARY	ii
---------------	----

KATA PENGANTAR	iii
----------------------	-----

DAFTAR ISI	v
------------------	---

DAFTAR TABEL	viii
--------------------	------

DAFTAR GAMBAR	ix
---------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN	x
-----------------------	---

BAB I PENDAHULUAN

A. LatarBelakang	1
B. PerumusanMasalah	9
C. TujuanPenelitian	9
D. KontribusiPenelitian.....	10
E. SistematikaPenulisan.....	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembangunan danAdministrasi Pembangunan	13
1. Pengertian Pembangunan	13
2. Konsep Pembangunan	14
3. Paradigma Pembangunan	15
4. Administrasi Pembangunan	18
B. KebijakanPublik.....	19
1. KonsepKebijakanPublik.....	19
2. Formulasi Kebijakan Publik.....	21
3. ImplementasiKebijakanPublik	22
4. EvaluasiKebijakanPublik	23
a. KonsepEvaluasiKebijakan.....	23
b. FungsiKebijakanPublik	26
c. Jenis-jenisEvaluasiKebijakan	28

5. Dampak Kebijakan.....	30
a. Pengertian Dampak.....	30
b. Unit-unit Sosial Pedampak.....	33
C. Perubahan Sosial dan Ekonomi.....	37
1. Perubahan Sosial.....	37
2. Perubahan Ekonomi.....	43
D. Pelabuhan dan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP).....	44
1. Pelabuhan dan Jenis-jenis Pelabuhan.....	44
2. Pelabuhan Perikanan dan Kelas-kelas Pelabuhan Perikanan.....	48
3. Penetapan Lokasi, Perencanaan Pembangunan dan Peningkatan Status Pelabuhan Perikanan.....	51
4. Fasilitas Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP).....	54
E. Masyarakat dan Wilayah Pesisir.....	54
1. Pengertian Masyarakat.....	55
2. Wilayah Pesisir.....	56

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	57
B. Fokus Penelitian.....	60
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	62
D. Sumber Data.....	63
E. Teknik Pengumpulan Data.....	64
F. Instrument Penelitian.....	65
G. Uji Keabsahan.....	66
H. Analisis Data.....	73

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	77
1. Gambaran Umum Kabupaten Pacitan.....	77
2. Gambaran Umum Wilayah Kelurahan Sidoharjo.....	79
3. Gambaran Umum PPP Tamperan.....	80
B. Penyajian Data.....	83
1. Kebijakan Pembangunan PPP Tamperan.....	83
a. Penetapan Lokasi dan Kebijakan Peningkatan Status PPP Tamperan.....	83
b. Aktor Pemangku Kebijakan PPP Tamperan dan Struktur Organisasi PPP Tamperan Pacitan.....	87
2. Dampak Perubahan Sosial Masyarakat Pesisir Sekitar.....	94



a. Persepsi Masyarakat	95
b. Interaksi Sosial	98
3. Dampak Perubahan Ekonomi Masyarakat Pesisir Sekitar ...	101
a. Penyerapan Tenaga Kerja	101
b. Tingkat Pendapatan Masyarakat Pesisir Sekitar	105
C. Pembahasan.....	107
1. Kebijakan Pembangunan PPP Tamperan	107
a. Penetapan Lokasi dan Peninngkatan Status PPP Tamperan	109
b. Aktor Pemangku Kebijakan PPP Tamperan dan Struktur Organisasi PPP Tamperan Pacitan	111
2. Dampak Perubahan Sosial Masyarakat Pesisir Sekitar	113
a. Persepsi Masyarakat	114
b. Interaksi Sosial	116
3. Dampak Perubahan Ekonomi Masyarakat Pesisir Sekitar ...	118
a. Penyerapan Tenaga Kerja	119
b. Tingkat Pendapatan	121
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	123
B. Saran	125
DAFTAR PUSTAKA	127
LAMPIRAN	130

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Hal.
1	JumlahNelayanLokal di PPP Tamperan 2003-2006	4
2	JumlahNelayanandon di PPP Tamperan 2006-2012	7
3	DaftarPegawai/ Karyawan UPPPP Tamperan.....	94
4	Jenis Usaha di Lokasi PPP TamperanDesaTamperan KabupatenPacitan	102
5	PenyerapanTenagaKerjaSektorJasa di Lokasi PPP Tamperan.....	104

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Hal.
1	Tahap-tahap Analisis Data Model Miles & Huberman	76
2	Struktur Organisasi UPPPP Tamperan	90



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Jumlah Hal.
1.	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.48/MEN/2007 Tentang Peningkatan Status Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tamperan Menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan	3
2.	Interview Guide	2
3.	Dokumentasi/ Foto	3
4.	Surat Rekomendasi Penelitian Skripsi	3
5.	Curriculum Vitae	1



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan dapat didefinisikan sebagai suatu hal yang tidak dapat kita pisahkan dari kehidupan manusia, hal ini akibat dari keinginan manusia untuk selalu berkembang dan maju dari waktu ke waktu. Pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang, jangka sedang, maupun jangka pendek. Dan merencanakan berarti mengambil keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dilakukan pada waktu tertentu di masa depan (Siagian, 2005:5).

Proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik, yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro (*daerah*). Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses saat pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan selanjutnya membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999). Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses, yaitu proses yang mencakup pembentukan-pembentukan institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga

kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru.

Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Kehidupan sosial ekonomi merupakan suatu hal yang terkait dari pembangunan ekonomi daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumberdaya yang ada harus memperkirakan potensi sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah (Arsyad, 1999).

Indonesia sebagai negara maritim mempunyai wilayah laut seluas lebih dari 3,5 juta km^2 , yang merupakan dua kali luas wilayah daratan. Perairan yang sangat luas tersebut mempunyai potensi sumberdaya ikan yang besar. Untuk menggali potensi tersebut diperlukan pelabuhan sebagai tempat berlabuh kapal, pendaratan ikan, memperlancar operasi penangkapan, pemasaran, dan pembinaan nelayan (Triatmodjo, 2010:401).

Pembangunan pelabuhan perikanan untuk menggali potensi sumberdaya perikanan laut akan memicu perkembangan perekonomian daerah terutama yang berkaitan dengan industri perikanan dan kelautan (maritim). Pengembangan pelabuhan tersebut selain berdampak pada peningkatan produksi perikanan juga akan memacu pertumbuhan sektor lainnya di daerah

tertinggal. Berbagai industri terkait sebagai bangkitan dari adanya pelabuhan tersebut diharapkan akan tumbuh, seperti industri pengolahan/pengalengan ikan, industri fasilitas penangkapan ikan (jaring, pancing, dsb) dan warung/toko yang menjual perbekalan bagi nelayan yang melaut, pabrik es, ruang pendingin (*cold storage*), perbankan, membuka lapangan kerja dan sebagainya. Dengan demikian maka nilai efek ganda dari investasi yang ditanamkan untuk pelabuhan tersebut akan tinggi. Disamping itu produktivitas dan efisiensi pemanfaatan pelabuhan tinggi sehingga biaya pembangunan dan pemeliharaan menjadi relatif kecil dibanding manfaatnya. Dengan demikian pembangunan pelabuhan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat dan daerah.

Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan dulunya adalah Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tamperan yang mulai dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan sendiri pada tahun 1977. PPI sendiri mempunyai kriteria yang sudah ditetapkan melalui Kepmen Kelautan dan Perikanan Nomor 8 tahun 2012 tentang Pelabuhan Perikanan yaitu, mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia (perairan lokal), memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 3 *Gross Tonnage* (GT), kemudian panjang dermaga sekurang-kurangnya 50 meter dengan kedalaman sekurang-kurangnya 1 meter, selanjutnya mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 15 unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 75 GT, memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 1 ha, serta terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 2 ton perhari. Dari

penjelasan tersebut hanya kapal-kapal berukuran kecil yang biasanya dapat dinaiki maksimal 4 orang saja, sehingga berpengaruh juga pada hasil tangkapannya yang sedikit. Menurut data dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pacitan dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 jumlah nelayan yang berada di PPI Tamperan adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Data Jumlah Nelayan Lokal di PPP Tameran 2003-2006

Tahun	Jumlah Nelayan di PPI Tamperan
2003	329 orang
2004	527 orang
2005	1.027 orang
2006	3.352 orang

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan, 2013

Data dalam tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah nelayan lokal dari tahun ke tahunnya terus bertambah, sedangkan kapasitas kolam labuh yang ada di PPI Tamperan sangat terbatas sudah tidak bisa lagi menampung dan tidak memadainya sejumlah fasilitas lain karena sudah lama keberadaannya. Hal ini menyebabkan proses pembongkaran ikan tidak memenuhi standar pelabuhan perikanan yang disyaratkan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan, sementara potensi lestari sumberdaya perikanan laut Kabupaten Pacitan (Samudera Hindia) masih cukup besar yang belum di eksploitasi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan memperkirakan potensi

perairan laut yang ada sekitar 36.000 Ton per tahun. Oleh karena itu, diperlukan pembangunan pelabuhan perikanan pantai di Kabupaten Pacitan untuk mendukung segala aktifitas perikanan tangkap supaya potensi lestari sumberdaya perikanan laut yang ada dapat dimanfaatkan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat nelayan pesisir sekitar.

Pelaksanaan pembangunan PPP Tamperan dimulai pada tahun 2003 dengan dana dari APBN (dana dekosentrasi), Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi (DAK Non DR), kemudian dilanjutkan sharing dari APBN, APBD Provinsi Jawa Timur maupun APBD Kabupaten Pacitan. Pemerintah pusat melalui Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor 48 Tahun 2007 tentang Peningkatan Status Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tamperan Menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan. Letak geografis PPP Tamperan sendiri berada di Kelurahan Sidoharjo yaitu pada $08^{\circ} 13'30''$ LS dan $111^{\circ} 04' 28$ BT". Daya tarik dari Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan adalah suasana iklim usaha yang kondusif, tidak ada premanisme terhadap hasil tangkap ikan, lingkungan pelabuhan yang bersih dan terletak di tepi samudera Indonesia.

Adanya fasilitas seperti pelabuhan akan mendorong geliat ekonomi daerah karena aksesibilitas dan mobilitas masyarakat akan semakin tinggi. Sehingga bisa mendorong percepatan pengembangan wilayah, penyerapan tenaga kerja, potensi perkembangan sektor informal pendukung lainnya dan terbentuknya interaksi sosial baru bagi masyarakat. Dengan adanya pembangunan PPP Tamperan tersebut diupayakan masyarakat pesisir sekitar

mendapatkan dampak positif terhadap perubahan kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya dengan memanfaatkan peluang ekonomi yang ada dari pembangunan PPP Tamperan. Tentunya banyak sekali dampak positif yang dihasilkan dari pembangunan PPP Tamperan tersebut. Sehingga adanya pembangunan PPP Tamperan diharapkan tidak hanya akan mendorong geliat ekonomi Kabupaten Pacitan saja, tetapi mendorong perubahan kehidupan ekonomi masyarakat yang jauh lebih baik dari sebelumnya.

Selain membawa pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, pembangunan PPP Tamperan juga akan sangat mempengaruhi keadaan masyarakat sekitar. Mulai dari jumlah penduduk yang mulai meningkat, perubahan nilai dan kebudayaan, komunikasi antar masyarakat, dan lain sebagainya. Datangnya nelayan andon atau nelayan pendatang di sebuah pelabuhan perikanan juga membawa banyak pengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat sekitar. Adanya nelayan andon selain menambah jumlah penduduk di sekitar pelabuhan, tidak sedikit juga mereka mengalami konflik dengan nelayan lokal atau bahkan masyarakat yang bukan nelayan. Menurut Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan, jumlah nelayan andon yang ada di PPP Tamperan dari tahun 2006 sampai dengan 2012 cukup banyak. Berikut ini adalah data jumlah nelayan andon di PPP Tamperan Pacitan:

Tabel 2

Data Jumlah Nelayan Andon di PPP Tamperan Tahun 2006-2012

Tahun	Jumlah Nelayan Andon
2006	40 orang
2007	550 orang
2008	400 orang
2009	1.010 orang
2010	972 orang
2011	972 orang
2012	975 orang

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan, 2013

Contoh konflik antara nelayan lokal dengan nelayan andon yang terjadi di PPP Tamperan yaitu terjadi pada April 2011 lalu, dimana 11 unit rumpon atau rumah ikan milik nelayan andon (pendatang) yang bersandar di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan, Pacitan dibakar nelayan lain. Akibat aksi pembakaran itu, nelayan pemilik rumpon diperkirakan menderita kerugian hingga Rp 800 juta. Rumah ikan buatan yang dibakar tersebut berada sekitar 200 mil laut (www.pacitankab.go.id, di akses pada tanggal 9 Maret 2014). Contoh lain adalah pembangunan PPP Muncar di Kabupaten Banyuwangi yang memberikan dampak sosial bagi nelayan lokal dengan nelayan andon. Konflik antara nelayan lokal dengan nelayan andon terjadi akibat nelayan andon yang dinilai menangkap ikan menggunakan alat

tangkap yang lebih modern dan canggih bila dibandingkan dengan nelayan lokal, sehingga jumlah tangkapannya sangat besar (www.tempo.co. di akses pada tanggal 9 Maret 2014).

Adanya konflik yang terjadi di PPP Tamperan maupun yang terjadi di tempat lain merupakan bentuk dari dampak adanya pembangunan berupa pelabuhan perikanan pantai. Tentunya masalah sosial yang terjadi bukan hanya masalah nelayan andon yang ada di PPP Tamperan saja tapi masih banyak lagi dampak sosial yang terjadi. Perlunya pengamatan yang lebih mendalam akan masalah sosial yang terjadi dan mengevaluasinya untuk melihat akar masalahnya serta penyelesaiannya.

Dalam penelitian ini peneliti memilih penelitian di PPP Tamperan Kelurahan Sidoharjo di Kabupaten Pacitan karena memiliki potensi alam perikanan yang melimpah terutama dari laut yang pada saat ini pertumbuhan ekonominya sedang berkembang dan dampak sosial yang di alami masyarakat pesisir sekitar dari adanya pembangunan PPP Tamperan sendiri. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengetahui dan mengevaluasi lebih dalam tentang dampak kehidupan sosial ekonomi masyarakat khususnya masyarakat pesisir pantai yang berada di Kabupaten Pacitan dari adanya pembangunan PPP Tamperan, maka peneliti memilih judul penelitian sebagai berikut **“Evaluasi Dampak Kebijakan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Sekitar”**.

B. Perumusan Masalah

Berangkat dari permasalahan dan identifikasi masalah yang menjadi latar belakang kajian ini, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kebijakan pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan di Kabupaten Pacitan?
2. Bagaimanakah dampak perubahan sosial dari pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan terhadap masyarakat pesisir sekitar?
3. Bagaimanakah dampak perubahan ekonomi dari pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan terhadap masyarakat pesisir sekitar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan di Kabupaten Pacitan.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis dampak perubahan sosial dari pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan terhadap masyarakat pesisir sekitar.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis dampak perubahan ekonomi dari pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan terhadap masyarakat pesisir sekitar.

D. Kontribusi Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan suatu kontribusi bagi beberapa pihak, antara lain:

a) Aspek Teoritis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pegangan studi Ilmu Administrasi Publik khususnya mengenai Evaluasi Kebijakan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) dan Dampaknya Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar sebagai wujud pelaksanaan pembangunan daerah.

b) Aspek Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman di bidang pembangunan, serta untuk melatih diri dalam menerapkan disiplin ilmu yang telah didapatkan selama dibangku studi guna mengembangkan dan menginterpretasikan berbagai macam kajian teori ilmiah yang ada kaitannya dengan tema penelitiannya, sehingga diharapkan mahasiswa mampu menemukan, menyimpulkan dan juga menganalisa berbagai masalah yang ditemui dilapangan.

b. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintahan, ke arah perbaikan terhadap kekurangan yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi/kelembagaan dan

dapat dijadikan parameter keberhasilan atau kegagalan program-program pembangunan daerah kabupaten atau kota.

c. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan acuan bagi penelitian selanjutnya sehubungan dengan masalah yang sama.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas secara singkat mengenai isi dari tulisan ini, maka penulis membagi atas lima bab. Adapun kerangka pemikirannya sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, memuat tentang pokok permasalahan yang akan dibahas, yaitu latar belakang alasan mengenai pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan dan kontribusi penelitian serta kerangka pemikiran.

BAB II: Tinjauan Pustaka, memuat pendapat berbagai ilmuwan serta teori yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian sebagai landasan atau arahan yang akan digunakan dalam penelitian.

BAB III: Metode Penelitian, menguraikan metode dari penelitian yang dilakukan yang memuat jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV: Hasil Pembahasan, merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari dua sub bab, yaitu penyajian data dan interpretasi data.

BAB V: Penutup, merupakan kesimpulan dari uraian pada bab-bab sebelumnya dan sasaran yang berkaitan dengan hal-hal yang seharusnya dilakukan atas fakta yang ada di lapangan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembangunan dan Administrasi Pembangunan

1. Pengertian Pembangunan

Bryant dan White (1982) dikutip oleh Suryono (2004:35), menyebutkan terdapat 5 (lima) implikasi yang perlu diperhatikan dalam definisi pembangunan, yaitu:

- a) Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik individu atau kelompok (*capacity*);
- b) Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan dan pemerataan sistem nilai dan kesejahteraan (*equity*);
- c) Pembangunan berarti mendorong kepercayaan pada masyarakat untuk membangun dirinya sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesepakatan yang sama, kebebasan memilih, dan kekuasaan untuk memutuskan (*empowerment*);
- d) Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan dan membangun secara mandiri (*sustainability*); dan
- e) Pembangunan merata mengurangi ketergantungan negara yang satu terhadap negara yang lain dengan menciptakan hubungan saling menguntungkan (simbiosis mutualis) dan saling menghormati (interdependensi).

Sedangkan menurut Siagian (1983:3) dikutip oleh Suryono (2004:21) pembangunan merupakan usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Siagian mengemukakan beberapa ide pokok dalam pembangunan yaitu:

- a) Pembangunan merupakan suatu proses;

- b) Pembangunan merupakan suatu usaha yang secara sadar dilaksanakan;
- c) Pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaannya berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan;
- d) Pembangunan mengarah kepada modernitas
- e) Modernitas yang dicapai melalui pembangunan bersifat multi dimensional; dan
- f) Proses dan kegiatan pembangunan ditujukan kepada usaha membina bangsa dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan.

Jadi dari definisi-definisi tersebut menjelaskan bahwa pembangunan adalah suatu proses untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik daripada sebelumnya.

2. Konsep Pembangunan

Menurut Suryono (2004:26), tinjauan terhadap konsep pembangunan dilakukan dengan cara dari dia aspek penting, yakni secara etimologik dan secara ensiklopedik.

“Secara etimologik, istilah pembangunan berasal dari kata *bangun*. Kata *bangun* setidaknya mengandung 4 arti: (1) bangun dalam arti sadar atau siuman (aspek fisiologis), (2) bangun dalam arti bangkit atau berdiri (aspek perilaku), (3) bangun dalam arti bentuk (aspek anatomi), (4) bangun dalam arti kata kerja membuat, mendirikan, atau membina (gabungan aspek fisiologi, aspek perilaku, dan aspek bentuk). Sedangkan secara ensiklopedik, kata pembangunan telah menjadi bahasa dan kosep dunia. Konsep itu antara lain dianalogkan dengan konsep: pertumbuhan (*growth*), rekonstruksi (*reconstruction*), modernisasi (*modernization*), westernisasi (*westernitation*), perubahan sosial (*social change*), pembebasan (*liberation*), pembaruan (*innovation*), pembangunan bangsa (*national development*), pembangunan (*development*), pengembangan (*progress/developing*), dan pembinaan (*construction*)”.

3. Paradigma Pembangunan

Suryono (2004:15-25) mengemukakan beberapa paradigma pembangunan. Paradigma pembangunan tersebut meliputi:

a. Strategi Pertumbuhan

Dimulai pada sekitar dasawarsa 1960-an, banyak negara-negara dunia ketiga (termasuk Indonesia) meniru atau mengadopsi pendekatan “*growth priority*” yang memfokuskan diri pada akumulasi capital nasional dengan GNP (*Gross National Product*) sebagai ukuran keberhasilannya. Dengan ditingkatkan pendapatan perkapita diharapkan masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan yang dihadapi negara dunia ketiga dapat terpecahkan.

b. Pertumbuhan dengan Pemerataan

Strategi ini dari empat pendekatan pokok. Yaitu:

- a) Meningkatkan laju pertumbuhan GNP sampai tingkat maksimal dengan jalan meningkatkan tabungan dan mengalokasikan sumber-sumber daya secara lebih efisien, yang manfaatnya dapat dinikmati oleh semua golongan masyarakat.
- b) Mengalihkan investasi ke golongan miskin dalam bentuk pendidikan, menyediakan kredit, fasilitas-fasilitas umum dan sebagainya.
- c) Mendistribusikan pendapatan atau konsumsi kepada golongan miskin melalui sistem fiskal atau melalui alokasi barang-barang konsumsi secara langsung.
- d) Pengalihan harta atau tanah yang sudah ada kepada golongan-golongan miskin. Fokus dari strategi ini mengarah pada penyediaan atau penciptaan lapangan pekerjaan secara langsung bagi masyarakat, sebagai alat untuk mendistribusikan pertumbuhan dan kesejahteraan yang dihasilkan oleh mesin ekonomi nasional.

c. Teknologi Tepat Guna

Menurut Ardant (1989) seperti yang dikutip oleh Suryono (2004), pendekatan ini menyatakan bahwa perluasan kesempatan kerja tidak harus dilakukan melalui pengembangan pola-pola masyarakat, melainkan juga dapat dilakukan melalui penciptaan barang-barang produksi melalui cara-cara yang lebih bersifat padat karya. Pendekatan ini diyakini lebih sesuai untuk negara-negara berkembang karena melalui teknologi tepat guna ini maka sumber-sumber daya lokal yang tersedia dapat dimanfaatkan sebagai sumber penghasilan penduduk.

d. Kebutuhan Dasar Pembangunan

Konsep pendekatan ini adalah penyediaan kebutuhan minimum bagi penduduk tergolong miskin, dengan kata lain adalah serangan langsung terhadap kemiskinan. Kebutuhan minimum yang dimaksud tidak hanya terbatas pada papan, pakaian dan pangan saja, melainkan juga kemudahan akses pada pelayanan air bersih, sanitasi, transportasi, kesehatan dan pendidikan.

e. Pembangunan Berkelanjutan

Menurut *World Commission* (1987) dikutip oleh Suryono (2004), pembangunan berkelanjutan adalah:

“Suatu pembangunan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa merugikan kebutuhan generasi masa datang. Resiko dan konsekuensi dari setiap pembangunan saat ini hendaknya jangan semuanya diwariskan kepada generasi mendatang, melainkan harus dipertimbangkan secara adil bagi generasi sekarang dan generasi mendatang”.

f. Konsep Pemberdayaan

Friedman (1992) dikutip oleh Suryono (2004), mengemukakan konsep pemberdayaan sebagai suatu konsep alternatif pembangunan, yang pada intinya memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat, yang berlandas pada sumber daya pribadi, langsung, melalui partisipasi, demokrasi, dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung.

g. Pembangunan Berpusat Pada Manusia

Menurut Suryono konsep pembangunan mempunyai kaitan kuat dengan system nilai, gerakan, metode, strategi dan indikator yang menjadi dominan setiap negara berkembang. Beliau menyatakan bahwa pembangunan sebagai sebuah sistem mencakup:

- 1) *Komponen masukan*, terdiri dari nilai, sumberdaya manusia, alam, budaya, dan kelembagaan masyarakat, komponen proses terdiri dari kemampuan organisasi dan menejemen pemerintahan dalam melaksanakan program-program pembangunan.
- 2) *Komponen keluaran*, berupa perubahan kualitas perilaku manusia yang berakses pada kognisi, afeksi dan keterampilan yang berkaitan dengan taraf hidupnya. Pembangunan sebagai usaha sadar, terorganisasi, terarah dan berkelanjutan yang dilakukan birokrasi pemerintah bersama masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan sebagai metode berorientasi pada upaya penciptaan kemajuan sosial ekonomi yang didukung oleh pengorganisasian dan peran serta masyarakat selaku subyek pembangunan. Sedangkan pembangunan sebagai strategi berorientasi pada:
 - a) Pendekatan kebutuhan dasar untuk mayoritas kaum miskin melalui peningkatan pelayanan sosial.
 - b) Penekanan pada distribusi pertumbuhan sebagai indikator pembangunan.

- c) Pertanian sebagai sektor prioritas ekonomi dan pemberian kredit, informasi, input dan infrastruktur pasar bagi masyarakat miskin.
- d) Teknologi padat karya dan tepat guna.
- e) Penekanan pada aspek sosial, politik dan ekonomi dari pembangunan.

4. Administrasi Pembangunan

Menurut Siagian (2004:2-3), administrasi pembangunan meliputi dua pengertian, yaitu tentang administrasi dan tentang pembangunan. Beliau menyatakan bahwa:

“Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan daripada keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan ‘pembangunan’ didefinisikan sebagai usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-building*).”

Dari definisi administrasi dan pembangunan di atas, Siagian (2004:4) menyimpulkan bahwa administrasi pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupannya sebagai suatu bangsa dalam berbagai aspek kehidupan bangsa tersebut dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah dibentuk.

Riggs (1986:75), mengemukakan bahwa administrasi pembangunan menunjuk pada berbagai usaha yang diorganisasikan untuk melaksanakan program-program atau proyek-proyek terkait guna mencapai sasaran pembangunan. Sedangkan menurut Tjokroamidjojo (1995:186) administrasi pembangunan adalah suatu pengendalian usaha oleh negara atau pemerintah untuk mendukung pencapaian pertumbuhan ke arah suatu keadaan yang

dianggap lebih baik dikemudian hari. Tjokroamidjojo (1995:222) juga menyatakan bahwa administrasi pembangunan tidak hanya berarti kemampuan untuk menetapkan strategi pembangunan yang baik, kemudian diperinci dalam rencana-rencana dan diterjemahkan dalam kegiatan-kegiatan nyata yang efektif dalam pelaksanaan pemerintahan, tetapi juga hendaknya dapat menimbulkan respon dan kerja sama seluruh rakyat dalam proses pembangunan tersebut. Beliau mengemukakan bahwa administrasi pembangunan juga berperan untuk melibatkan kegiatan masyarakat yang luas, sesuai dengan arah dan kebijaksanaan yang diterapkan dalam proses pembangunan.

B. Kebijakan Publik

1. Konsep Kebijakan Publik

Untuk menanggapi kepentingan masyarakat, yang dalam kondisi dan situasi tertentu nampak sebagai masalah (*problem*), yang kemudian merupakan *public issues*, maka kebijakan publik sebagai suatu keputusan haruslah ditetapkan tepat pada waktunya, tidak boleh tergesa-gesa namun juga tidak boleh ditetapkan secara terlambat.

Profesor Irfan Islamy mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Beliau menyimpulkan beberapa definisi kebijakan publik sebagai berikut (Islamy, 1991:20-21):

- a) Kebijakan publik itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah
- b) Kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuknya yang nyata.
- c) Kebijakan publik baik itu melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.
- d) Kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Menurut Ealau dan Prewitt (1973) seperti yang dikutip oleh Suharto (2008:7), kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan itu). Sedangkan menurut Titimuss (1974) dikutip oleh Suharto (2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan menurut Titmuss senantiasa berorientasi kepada masalah (*problem-oriented*). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang membuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan publik menurut Young dan Quinn, 2002:5-6) dikutip oleh Suharto (2008:44) yaitu:

- a) Tindakan pemerintah yang berwenang, kebijakan public adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya.
- b) Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang berkembang di masyarakat.
- c) Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari

- beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
- d) Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun, kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu
 - e) Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seseorang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan, bukan sebuah maksud atau janji yang belum dirumuskan. Keputusan yang telah dirumuskan dalam kebijakan publik bisa dibuat oleh sebuah badan pemerintah, maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintah.

Jadi atas penjelasan tersebut diatas, kebijakan publik muncul karena adanya masalah yang berkembang di masyarakat, kemudian pihak pemerintah yang berwenang merespon masalah tersebut dengan formulasikannya sebuah kebijakan yang berorientasi pada tujuan yang hendak dicapai.

2. Formulasi Kebijakan Publik

Raymond Bauer dalam tulisannya berjudul *The Study of Policy Formation*, merumuskan pembuatan kebijaksanaan negara sebagai proses transformasi atau pengubahan input-input politik menjadi output politik (Wahab, 2008:16). Ahli lain, Chief J.O Udoji merumuskan secara rinci bahwa pembuatan kebijaksanaan negara merupakan suatu keseluruhan dari proses yang menyangkut pengartikulasian dan pendefinisian masalah, perumusan kemungkinan pemecahan masalah dalam bentuk tuntutan-tuntutan politik, penyaluran dari tuntutan-tuntutan tersebut kedalam system politik, pengupayaan pemberian sanksi-sanksi atau legitimasi dari arah tindakan yang

dipilih, pengesahan dan pelaksanaan/ implementasi, monitoring dan peninjauan kembali (umpan balik) (Wahab, 2008:17).

Perumusan kebijakan publik merupakan inti dari kebijakan publik karena dalam perumusan kebijakan publik dijelaskan batas-batas kebijakan itu sendiri. Dari sini dapat dipahami bahwa perumusan kebijakan merupakan serangkaian proses yang kompleks untuk mendefinisikan permasalahan yang berupa isu-isu yang berkembang di masyarakat hingga menjadi agenda kebijakan, pemilihan alternatif-alternatif kebijakan hingga menjadi sebuah kebijakan setelah melalui system politik yang berlaku.

3. Implementasi Kebijakan Publik

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster seperti yang dikutip oleh Wahab (2008:64) adalah:

Kamus Webster, merumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/ akibat terhadap sesuatu).

Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat emncapai tujuannya. Lester dan Stewart menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dipandang dalam penegrtian yang luas merupakan tahap dari proses kebijakan segra setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik berkerja

bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program (Winarno, 2012:147).

Sedangkan menurut Widodo (2012:85), implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (*public policy process*) sekaligus studi yang sangat krusial. Bersifat krusial karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya dan perlu dilaksanakan dalam proses yang berwaktu. Namun, ada hal yang tidak kalah penting bahwa kebijakan perlu diagendakan skedul evaluasinya.

4. Evaluasi Kebijakan Publik

a. Konsep Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan publik merupakan salah satu unsur fungsional dari kegiatan pengambilan kebijakan dapat menentukan keberhasilan dari suatu program atau kebijakan pemerintah. Dalam kebijakan publik dikenal adanya proses perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan. Tahap pertama yang harus dilalui adalah proses perumusan kebijakan. Banyak pakar kebijakan publik mengatakan bahwa perumusan kebijakan adalah inti dari kebijakan publik. Hal itu karena proses perumusan kebijakan mempunyai peranan yang penting dalam menentukan keberhasilan kebijakan publik. Seorang pembuat keputusan harus mampu menangkap

inti masalahnya dengan cermat, sehingga mampu memformulasikan kebijakan yang tepat sasaran. Kesalahan pembuat keputusan dalam menetapkan inti masalah akan berpengaruh terhadap kurang efektivitasnya suatu kebijakan publik.

Tahap selanjutnya, setelah sebuah kebijakan dirumuskan adalah tahap implementasi kebijakan. Dalam implementasi kebijakan ini seorang implementator selain harus memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan juga harus mempunyai kemampuan untuk menterjemahkan kebijakan itu sendiri. Hal itu ditujukan agar dalam pelaksanaannya memiliki kesesuaian dengan apa yang telah dirumuskan dalam kebijakan. Namun, dalam kenyataannya seringkali implementasi kebijakan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dalam perumusan kebijakan sehingga muncul *implementation gap*.

Menurut Andrew Dunsire dikutip oleh Wahab (2005:61), mengatakan bahwa:

Implementation gap adalah suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan perbedaan antara apa yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai (sebagai hasil atau prestasi dari pelaksanaan kebijakan).

Hal itu karena dalam proses implementasinya sering dipengaruhi oleh banyak hal terutama lingkungan dimana kebijakan itu diimplementasikan.

Untuk mengurangi terjadinya *implementation gap* tersebut, maka dalam proses kebijakan perlu adanya sebuah evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan mempunyai peranan penting dalam menentukan kesuksesan

kebijakan. Nugroho (2009:184), menjelaskan bahwa tujuan pokok dari evaluasi kebijakan bukanlah untuk menyalahkan, akan tetapi untuk mengetahui seberapa besar kesenjangan antara kenyataan dengan harapan dari suatu kebijakan publik. Dengan evaluasi kebijakan dapat dilihat dimana letak kekurangan dari proses kebijakan, sehingga kemudian dapat menutup kekurangan tersebut.

Mengikuti pendapatnya William N. Dun (1999) yang dikutip oleh Nugroho (2009:185), bahwa evaluasi dapat dikatakan sebagai penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*). Jadi evaluasi berkenaan dengan informasi mengenai nilai sebuah kebijakan. Selain itu juga kinerja kebijakan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik.

Evaluasi kebijakan seringkali dipahami sebagai evaluasi terhadap implementasi kebijakan saja (Winarno, 2002 yang dikutip oleh Nugroho, 2009:184). Sesungguhnya evaluasi kebijakan tidak terbatas hanya evaluasi terhadap implementasi kebijakan saja, akan tetapi evaluasi terhadap seluruh proses kebijakan. Menurut Nugroho (2009:184), evaluasi kebijakan public mempunyai 3 lingkup, yaitu evaluasi terhadap perumusan kebijakan, evaluasi terhadap kebijakan, dan evaluasi terhadap lingkungan kebijakan.

Evaluasi penting baik bagi tahap perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan, sebab evaluasi ada pada tiap tahap dalam pembuatan kebijakan. Jadi dari sana akan dinilai apa yang menjadi *output*

dan/ atau *outcomes* suatu kebijakan yang selanjutnya menjadi *input* guna merevisi kebijakan baik dalam bentuk perbaikan implementasi kebijakan maupun perumusan kebijakan kembali.

b. Fungsi Evaluasi Kebijakan

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan. Pertama, dan yang paling penting, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini, evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu telah dicapai. Kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoprasikan tujuan dan target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju. Ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat member sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan. Evaluasi dapat pula menyumbang pada definisi alternatif kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan yang lain.

Fungsi lain dari evaluasi juga dijelaskan Van Dussedorp yang dikutip oleh Wahab (2001:11), adalah sebagai berikut:

- 1) Evaluasi dapat mengemban fungsi pembelajaran, dalam artian bahwa dengan mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhasil dari kegiatan-kegiatan yang tidak berhasil dalam mengantarkan pola hasil yang diharapkan serta dengan menemukan apa yang menyebabkan keberhasilan dan kegagalan itu maka akan memungkinkan penyempurnaan kinerja proyek atau program di masa yang akan datang dan dengan demikian menghindari kesalahan yang telah dibuat dimasa lalu.
- 2) Evaluasi dapat berfungsi sebagai kemudi dan manajemen. Hasil-hasil yang diperoleh dari evaluasi akan memberikan umpan balik dan memungkinkan pihak manajemen mengendalikan proyek tetap pada arahnya sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Hasil-hasil evaluasi juga dapat digunakan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian tertentu mengenai cara bagaimana sebaiknya proyek dioperasikan.
- 3) Evaluasi dapat mengemban fungsi kontrol dan inspeksi, dalam artian bahwa ia dapat digunakan untuk menginformasikan kepada pimpinan puncak atau pihak negara apakah kegiatan-kegiatan yang ditunjukkan dalam dokumen proyek telah dilaksanakan dengan semestinya dan menunjukkan hasil-hasil sebagai yang diharapkan.
- 4) Evaluasi dapat mengemban fungsi akuntabilitas, karena ia memberikan informasi.
- 5) Evaluasi dapat memainkan fungsi kepenasihatan, dalam artian bahwa hasil-hasil evaluasi akan dapat digunakan untuk mendapatkan dana yang lebih banyak, guna membiayai proyek itu atau proyek-proyek sejenis di masa yang akan datang.

Fungsi evaluasi menurut Wibawa yang dikutip oleh Nugroho (2009:541), adalah:

- 1) Eksplanasi, melalui eksplanasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini, evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.
- 2) Kepatuhan, melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
- 3) Audit, melalui evaluasi dapat diketahui apakah *output* benar-benar sampai ke tangan sasaran kebijakan atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.
- 4) Akunting, dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial-ekonomi dari kebijakan tersebut.

c. Jenis Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan jika menurut waktu evaluasinya dibagi menjadi tiga. Seperti yang disebutkan oleh Aji dan Sirait (1982:31), bahwa macam evaluasinya kebijakan dapat digolongkan menjadi beberapa tahap, yaitu:

1) Evaluasi pada tahap perencanaan

Kata evaluasi sering digunakan dalam tahap perencanaan dalam rangka mencoba memilih dan menentukan skala prioritas terhadap berbagai macam alternatif dan kemungkinan terhadap cara untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Untuk itu diperlukan teknik yang dapat dipakai oleh perencana. Suatu hal yang patut dipertimbangkan dalam kaitan ini adalah bahwa metode-metode yang ditempuh dalam pemilihan prioritas ini tidak selalu sama untuk setiap keadaan, melainkan berbeda menurut hakikat dan permasalahannya sendiri.

2) Evaluasi pada tahap pelaksanaan

Evaluasi pada tahap ini adalah suatu kegiatan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan dibandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan di awal. Terdapat perbedaan antara evaluasi menurut pengertian ini dengan pengendalian atau monitoring. Monitoring menganggap bahwa tujuan yang ingin dicapai sudah tepat dan bahwa rencana tersebut sudah tepat untuk

mencapai tujuan. Sebaliknya, evaluasi melihat sejauh mana program masih tetap dapat mencapai tujuan, apakah pencapaian hasil tersebut sudah berubah atau dengan kata lain apakah pencapaian hasil program tersebut akan memecahkan masalah yang ingin dipecahkan. Evaluasi juga mempertimbangkan faktor-faktor luar yang mempengaruhi keberhasilan suatu program.

3) Evaluasi pada tahap purna pelaksanaan

Disini pengertian evaluasi hampir sama dengan pengertian evaluasi pada tahap pelaksanaan, hanya perbedaannya yang dinilai dan yang dianalisa bukan lagi tingkat kemajuan pelaksanaan dibandingkan dengan rencana, tetapi hasil pelaksanaan dengan rencana, yaitu apakah dampak yang dihasilkan oleh pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Aktivitas evaluasi kebijakan apabila dititik beratkan pada kemauan yang kuat untuk mengetahui hasil dari kebijakan yang telah dilaksanakan maka akan selalu berhubungan dengan dampak kebijakan. Dimana dampak kebijakan merupakan salah satu indikator yang penting untuk menentukan apakah program telah mencapai suatu tujuan atau target yang telah ditetapkan atau belum. "Evaluasi memberikan perhatian yang besar kepada *output*" (Wibawa, 1994:29). Penelitian ini mencoba untuk melakukan evaluasi pada tahap purna pelaksanaan. Karena kebijakan

pembangunan PPP Tamperan Pacitan telah dilaksanakan, peneliti ingin mengetahui dan mendeskripsikan dampak yang terjadi.

5. Dampak Kebijakan

a. Pengertian Dampak

Suatu kebijakan dapat dikatakan atau dinilai berhasil jika kebijakan tersebut menghasilkan dampak seperti yang diinginkan. William Dunn yang dikutip oleh Wibawa (1994:5) menyebutkan “dampak kebijakan adalah perubahan kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari *output* kebijakan”. *Output* adalah barang, jasa atau fasilitas lain yang diterima oleh sekelompok masyarakat tertentu, baik kelompok sasaran maupun kelompok lain yang dimaksud untuk disentuh oleh kebijakan. Sedangkan *output* dan dampak itu sendiri merupakan sebuah konsekuensi dari kebijakan. Selanjutnya, suatu kebijakan dapat menimbulkan dampak segera maupun dampak jangka panjang. Dampak bersifat agregatif, dalam arti dampak yang dirasakan secara individual akan diserap pada perubahan masyarakat. Weiss seperti yang dikutip oleh Wibawa (1994:39) mengatakan bahwa ada tiga persoalan yang perlu diperhatikan dalam melihat dampak kebijakan. Pertama, wilayah program, apakah program berlingkup nasional, propinsi, kota, kecamatan atau desa. Kedua, ukuran program, berapa jumlah individu yang dilayani untuk setiap satuan wilayah program. Ketiga, kebaruan program, apakah dampak yang diharapkan oleh program itu dianggap baru.

Rossi dan Freeman yang dikutip oleh Parsons (2008:604) mengungkapkan definisi dampak kebijakan sebagai berikut:

“Penilaian atas dampak adalah untuk memperkirakan apakah intervensi menghasilkan efek yang diharapkan atau tidak. Perkiraan seperti ini tidak menghasilkan jawaban yang pasti tapi hanya beberapa jawaban yang mungkin masuk akal. Tujuan dasar penilaian dampak adalah untuk memperkirakan “efek bersih” dari sebuah intervensi, yakni perkiraan dampak intervensi yang tidak dicampuri oleh pengaruh dari proses dan kebijakan lain yang mungkin juga mempengaruhi perilaku atau kondisi yang menjadi sasaran suatu program yang sedang dievaluasi itu”.

Evaluasi kebijakan publik banyak dilakukan untuk mengetahui dampak kebijakan atau *policy outcomes*, bukan hanya hasil atau *policy outputs* dari sebuah kebijakan publik. Maka disini perlu ditegaskan bahwa hasil kebijakan berbeda dengan dampak kebijakan. Hasil kebijakan adalah apa-apa yang telah dihasilkan dengan adanya sebuah kebijakan publik, sedangkan dampak kebijakan adalah akibat-akibat dari konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya sebuah kebijakan publik (Islamy, 2007:114).

Adapun metode yang dapat digunakan dalam upaya mengetahui dampak kebijakan antara lain:

- 1) Membandingkan problem/ situasi/ kondisi dengan apa yang terjadi sebelum intervensi
- 2) Melakukan eksperimen untuk mengkaji dampak suatu program terhadap suatu area atau kelompok dengan membandingkan dengan apa yang terjadi di area atau kelompok lain yang belum menjadi sasaran intervensi
- 3) Membandingkan biaya atau manfaat yang dicapai sebagai hasil dari intervensi
- 4) Menggunakan model untuk memahami dan menjelaskan apa yang terjadi sebagai akibat dari kebijakan masa lalu

- 5) Pendekatan kualitatif dan *judgemental* untuk mengevaluasi keberhasilan/ kegagalan kebijakan dan program
- 6) Membandingkan apayang sudah terjadi dengan tujuan atau sasaran tertentu dari sebuah program atau kebijakan.
- 7) Menggunakan pengukuran kinerja untuk menilai apakah tujuan atau targetnya sudah terpenuhi (Parsons, 2008:604)

Dampak kebijakan mempunyai beberapa dimensi, dimensi itu harus dipertimbangkan dengan seksama dalam melakukan penilaian atas kebijakan publik. Menurut Anderson yang dikutip oleh Islamy (2007:115) dimensi dampak kebijakan publik tersebut antara lain:

- 1) Dampak kebijakan yang diharapkan (*intended consequences*) atau tidak diharapkan (*unintended consequences*) baik pada masalahnya maupun pada masyarakatnya.
- 2) Limbah kebijakan terhadap situasi atau orang-orang (kelompok) yang bukan menjadi sasaran/ tujuan utama dari kebijakan tersebut, ini biasanya disebut “*externalities*” atau “*spillover effects*”. Limbah kebijakan ini bisa positif atau negati.
- 3) Dampak kebijakan dapat terjadi atau berpengaruh pada kondisi sekarang atau kondisi yang akan datang.
- 4) Dampak kebijakan terhadap “biaya” tidak langsung (*indirect costs*). Menghitung biaya pemerintah (*economic costs*) relatif lebih mudah dibandingkan menghitung biaya-biaya lain yang bersifat kualitatif (*social costs*)
- 5) Dampak kebijakan terhadap “biaya” tidak langsung (*indirect costs*) sebagaimana yang dialami oleh anggota-anggota masyarakatnya. Seringkali biaya seperti ini jarang dinilai, hal ini sebagian disebabkan karena sulitnya hal tersebut dikuantifikasikan (diukur).

Penilaian terhadap kebijakan negara seringkali menunjukkan bahwa kebijakan negara tersebut tidak mencapai hasil atau memperoleh dampak yang diharapkan. Tidak tercapainya tujuan kebijakan ini disebabkan oleh adanya faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Sumber-sumber yang terbatas, baik tenaga, biaya, material, waktu dan sebagainya, sehingga dampak yang diharapkan tidak tercapai

- 2) Kesalahan dalam pengadministrasian kebijakan-kebijakan negara
- 3) Problem-problem publik seringkali timbul karena adanya berbagai macam faktor, sedangkan kebijakan seringkali dirumuskan hanya atas dasar salah satu dan sejenis kecil faktor-faktor tersebut
- 4) Masyarakat memberi respon atau melaksanakan kebijakan negara dengan cara-caranya sendiri sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan dampaknya. Atau dengan kata lain, kalau implementasi kebijakan negara itu dilaksanakan tidak sesuai dengan petunjuk-petunjuk pelaksanaannya, maka dampaknya akan semakin jauh dari yang diharapkan
- 5) Adanya beberapa kebijakan negara yang mempunyai tujuan bertentangan satu sama lain
- 6) Adanya usaha-usaha untuk memecahkan beberapa masalah tertentu yang memakan biaya lebih besar dari masalah-masalahnya sendiri
- 7) Banyaknya problem-problem publik yang tidak dapat dipecahkan secara tuntas
- 8) Terjadi perubahan sifat permasalahan kebijakan sedang dirumuskan atau dilaksanakan
- 9) Adanya masalah-masalah baru yang lebih menarik dan dapat mengalihkan perhatian orang dari masalah-masalah yang telah ada (Islamy, 2007:117)

b. Unit-unit Sosial Pedampak

Unit-unit sosial Pedampak adalah unit-unit yang terkena dampak (*impact*) sebagai akibat dilaksanakannya kebijakan tersebut. Unit-unit yang terkena dampak dari suatu kebijakan meliputi individu, rumah tangga, kelompok, atau organisasi masyarakat dan lembaga serta sistem sosial. Dampak terhadap unit-unit bisa bersifat satu kesatuan, berbalasan, dan terpisah satu sama lain. Dampak kebijakan terhadap individu atau rumah tangga akan merembet pada kelompok, tetapi sebaliknya dampak yang langsung mengenai suatu organisasi atau kelompok dapat merembet pada individu dan rumah tangga. Jadi dampak kebijakan dapat dapat berlagsung

secara sekuensial maupun resiprokal, yang keduanya bersifat akumulatif. Wibawa (1994:54) menyatakan bahwa unit-unit sosial pedampak terdiri dari:

- 1) Dampak individual, yaitu dampak yang menyentuh aspek-aspek biologi/fisik, psikis, lingkungan hidup, ekonomi, sosial dan personal. Pertama, dampak psikis, dapat berupa alienansi yaitu hilangnya kelekatan (identifikasi) psikologis individu terhadap kelompok, pemerintah, atau unit sosial lain. Jika ada suatu proyek pembangunan dan para individu tidak mampu menolaknya serta tidak memiliki akses untuk mempengaruhi kebijakannya, maka mereka akan mengalami perasaan powerlessness, stres dapat terjadi tidak saja sebagai respon terhadap dampak mengecewakan melainkan juga terhadap dampak yang menyenangkan. Kedua, dampak lingkungan, misalnya seperti keharusan berpindahnya seseorang dari lingkungan tertentu karena adanya suatu proyek. Ditempat tinggal yang baru seseorang harus menghabiskan tidak sedikit biaya untuk membangun interaksi dengan orang lain. Ketiga, dampak ekonomi, tidak saja menyentuh para pekerja tetapi juga para pemilik modal dan bahkan konsumen. Dampak ekonomi terhadap para pekerja dapat berupa naik atau turunnya penghasilan karena kondisi pekerjaan mereka yang berubah, sementara dampak terhadap para pemilik modal adalah naik turunnya keuntungan yang mereka peroleh dan terhadap konsumen dampak tersebut berupa naik turunnya harga serta kualitas produk yang mereka dapatkan. Keempat, dampak sosial dan personal, meliputi banyak dimensi atau aspek. Dampak posisi sebagai seorang teman, dampak ini dapat berbentuk hilang atau timbulnya rasa simpatik. Sementara individu-individu yang menjadi anggota organisasi mengalami dampak yang berupa kurang atau bertambahnya kegiatan organisatoris mereka.
- 2) Dampak organisasional, suatu kebijakan dapat menimbulkan dampak langsung. Dampak yang langsung adalah berupa terganggu atau terbantunya organisasi atau kelompok dalam mencapai tujuannya, artinya seberapa jauh suatu kebijakan dapat membantu atau mengganggu pencapaian tujuan-tujuan suatu organisasi.
- 3) Dampak terhadap masyarakat, masyarakat bukanlah unit sosial yang *goal-oriented* seperti organisasi. Mereka adalah unit yang melayani para anggotanya. Dampak suatu kebijakan terhadap masyarakat dalam melayani anggotanya. Evaluasi terhadap dampak masyarakat ini dapat menggunakan kerangka berpikir

sistematik. Dalam hal ini masyarakat dilihat sebagai input yang menyediakan sumber daya dan sekaligus menampung tuntutan, sedangkan kualitas hidup para anggotanya merupakan output. Sebagai contoh adalah kebijakan yang mengatur bahwa suatu pusat perbelanjaan harus dibuat dengan partisipasi anggota masyarakat. Kebijakan ini menjadikan berlangsungnya proses partisipasi dalam pembuatan pusat perbelanjaan. Ini berarti ada perubahan struktur kegiatan pembuatan keputusan. Jika sebelumnya masyarakat dalam keadaan tenang, maka perubahan struktur pengambil keputusan dapat menimbulkan berbagai macam friksi, karena tidak dijamin kesepakatan bulat terhadap suatu persoalan dalam pembangunan pusat perbelanjaan tersebut. Dengan kata lain, kebijakan tersebut menimbulkan dampak berkurangnya harmoni masyarakat. Tapi karena para anggota masyarakat menjadi mengenal satu sama lain secara lebih dekat, maka dalam jangka panjang interaksi sosial dan pertemanan akan meningkat. Lebih dari itu, partisipasi dalam pembuatan keputusan akan menjadikan para anggota masyarakat memiliki akses yang tinggi terhadap produk-produk yang dijual oleh pusat perbelanjaan tersebut.

- 4) Dampak terhadap lembaga dan sistem sosial. Perubahan yang terjadi dalam lembaga dan sistem sosial merupakan akibat atau dampak dari sebuah kebijakan. Dalam mengevaluasi dampak ini dikenal dengan dua perspektif yang dominan, yaitu fungsionalisme dan teori konflik. Perspektif fungsionalisme mengamati cara sistem sosial mengadaptasi perubahan dengan tetap menjaga strukturnya. Menurut pendekatan ini, jika sistem lembaga dan sosial tertuntut untuk melakukan perubahan struktural, nilai dasar, dan organisasi masyarakatnya tetap akan dijaga. Sementara itu, teori konflik melihat perubahan sistem sosial sebagai respon terhadap kelompok-kelompok penting dalam masyarakat. Jadi, teori konflik banyak mengamati apa kebutuhann kelompok-kelompok masyarakat dan bagaimana mereka berkonflik satu sama lain. Sistem lembaga dan sosial yang eksis disuatu waktu mencerminkan cara konflik itu dikelola.

Ketika merespon terhadap dampak kebijakan yang baru saja ditetapkan seorang individu dapat melakukan berbagai macam reaksi.

Menurut Mubyarto yang dikutip oleh Wibawa (1994:60) 'Respon terhadap kebijakan yang baru saja ditetapkan juga beragam, seperti skeptik (tidak

yakin akan apa yang dicapai oleh kebijakan tersebut), kritis (mempertanyakan dukungan dan hambatan bagi pelaksanaannya) dan analitis (memberikan sumbang-saran bagi pelaksanaan yang lebih baik)". Demikian halnya dengan respon individual terhadap dampak kebijakan juga beragam. Selain ketiga respon tersebut, respon individu bisa bersifat reaktif-konfrontatif, bisa pula bersifat adaptif-konformistis, atau diantara keduanya. Secara politis, respon tersebut mungkin dikemukakan secara legal-konstitusional ataupun ilegal-konstitusional.

Menurut Lipset dalam Wibawa (1994:61) respon politis bisa pula dikategorikan menjadi lima jenis, yaitu:

- 1) Apatis (tidak mau tahu, menolak seluruh kebijakan). Jika sikap apatis ini disertai dengan kebencin dan kebanyakan individu dan kebanyakan individu dalam suatu komunitas mengalami perasaan ini, besar kemungkinan akan terjadi mobilisasi masa. Mobilisasi akan bermuara secara ekstern pada gerakan otoriter-totaliter yang mengancam demokrasi.
- 2) Tekanan politis yang dirasakan secara individu akan mendorong individu yang bersangkutan untuk melakukan lobi dan memanfaatkan media massa guna mengeluarkan responnya.
- 3) Tekanan politis yang bersifat kolektif dapat direspon dalam bentuk demokrasi dan propaganda.
- 4) Tindakan hukum. Dalam hal ini individu atau kelompok menggugat pembuat atau pelaksana kebijakan dalam peradilan tata usaha negara.
- 5) Respon terhadap dampak kebijakan dapat berbentuk tindakan politik yang kasar seperti teror, kudeta dan evolusi. Mana diantara kelima jenis respon ini yang akan ditampilkan sehubungan dengan dampak suatu kebijakan seringkali tergantung pada apakah pemerintah adil dan apakah pemerintah dianggap representatif.

C. Perubahan Sosial dan Ekonomi

1. Perubahan Sosial

a. Pengertian Perubahan Sosial

Perubahan sosial adalah perubahan dalam proses sosial atau dalam struktur masyarakat. Perubahan sosial merupakan variasi dan cara hidup yang telah diterima baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan, material, komposisi penduduk, ideology maupun adanya difusi atau penemuan baru dalam masyarakat. Perubahan sosial juga merupakan segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya termasuk di dalamnya nilai, sikap, dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat (Soemardjan dan Soemadi, 1993:45)

Menurut Sumatatmadja dalam Yuliati dan Poernomo (2003:37), perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi di masyarakat yang meliputi berbagai aspek kehidupan, sebagai akibat adanya dinamika anggota masyarakat dan yang telah di dukung oleh sebagian besar anggota masyarakat dan merupakan tuntutan kehidupan dalam mencari kestabilan. Perubahan sosial ini didukung oleh adanya perkebangan kuantitas dan kualitas anggota masyarakat.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial adalah perubahan proses sosial yang terjadi pada masyarakat karena adanya inovasi, difusi, dan penemuan baru sehingga menyebabkan perkembangan

kualitas dan kuantitas masyarakatnya dan mempengaruhi sistem sosial masyarakat.

b. Ruang Lingkup Perubahan Sosial

Ruang lingkup perubahan sosial meliputi perubahan unsur-unsur kebudayaan baik yang bersifat material maupun immaterial. Selain itu perubahan sosial terjadi pada struktur dan fungsi masyarakat. Perubahan sosial meliputi perubahan pada proses sosial sehingga dalam penelitian ini membatasi perubahan sosial pada indikator yang meliputi perubahan pada:

1) Presepsi

Robbins (2003:88); mendeskripsikan persepsi dalam kaitannya dengan lingkungan, yaitu sebagai proses di mana individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan mereka. Sedangkan menurut kamus besar Bahasa Indonesia (2005:807) persepsi didefinisikan sebagai tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu, atau merupakan proses seseorang untuk mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Jadi secara umum, persepsi dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pengelompokan dan penginterpretasian berdasarkan pengalaman tentang peristiwa yang diperoleh melalui panca inderanya untuk menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Presepsi dibedakan menjadi dua yaitu:

- a) Presepsi tentang benda, presepsi yng mengandung unsur obyektif. Misalnya presepsi adanya benda baru atau persepsi terhadap adanya pembangunan.
- b) Presepsi sosial, presepsi yang mengandung unsur yang subyektif. Misalnya konsepsi diri, harga diri, dan kepercayaan diri seseorang.

Sedangkan Robbins (2003) berpendapat bahwa meskipun individu-individu memandang pada satu benda yang sama, mereka dapat mempersepsikannya berbeda-beda. Ada sejumlah faktor yang bekerja untuk membentuk dan terkadang memutar-balikkan persepsi. Faktor-faktor ini dari:

- a) Pelaku persepsi (perceiver)
 - b) Objek atau yang dipersepsikan
 - c) Konteks dari situasi dimana persepsi itu dilakukan
- 2) Interaksi Sosial

Maryati dan Suryawati (2003), menyatakan bahwa interaksi sosial adalah kontak atau hubungan timbal balik atau intersimulasi dan respon antar individu antar kelompok atau antar individu dan kelompok. Pendapat lain dikemukakan oleh Murdiyatomoko dan Handayani (2004), "Interaksi sosial adalah hubungan antar manusia yang menghasilkan suatu proses pengaruh mempengaruhi yang menghasilkan hubungan tetap dan pada akhirnya memungkinkan

pembentukan struktur sosial". Adapun bentuk interaksi sosial menurut Soekanto (2006:59) adalah sebagai berikut:

- a) Kerjasama, merupakan suatu usaha bersama-sama antara orang-orang atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama.
- b) Pertikaian, Pertentangan adalah bentuk interaksi sosial yang berupa perjuangan yang langsung dan sadar antara orang dengan orang atau kelompok dengan kelompok untuk mencapai tujuan yang sama.
- c) Persaingan, adalah suatu bentuk interaksi sosial dimana orang-orang atau kelompok-kelompok berlomba meraih tujuan yang sama.
- d) Akomodasi, adalah suatu proses yang menuju pada usaha manusia untuk meredakan pertentangan dengan tujuan untuk mencapai kestabilan.

c. Ciri-ciri Perubahan Sosial

Menurut Soekanto yang dikutip oleh Yuliati dan Poernoemo (2003:72), proses-proses perubahan sosial dapat diketahui dengan ciri-ciri tertentu, yaitu:

- 1) Tidak ada masyarakat yang berhenti perkembangannya, karena setiap masyarakat akan mengalami perubahan baik cepat ataupun lambat.

- 2) Perubahan terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu, dan diikuti pada perubahan-perubahan lembaga sosial lainnya karena sifat kelembagaan tersebut yang independen maka sulit untuk mengisolasi perubahan pada lembaga-lembaga sosial tertentu. Proses awal dan selanjutnya merupakan mata rantai.
- 3) Perubahan sosial yang cepat biasanya diikuti dengan disorganisasi yang bersifat sementara karena berada dalam proses penyesuaian diri. Disorganisasi ini akan diikuti oleh reorganisasi yang mencakup pemantapan kaidah-kaidah dan nilai-nilai baru.
- 4) Perubahan tidak dapat dibatasi pada bidang kebendaan atau spiritual saja, karena bidang itu mempunyai kaitan yang timbale balik.

d. Faktor-faktor Perubahan Sosial

Faktor-faktor penyebab perubahan sosial dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam masyarakat dan yang berasal dari luar masyarakat. Faktor perubahan sosial antara lain:

- 1) Faktor-faktor dari dalam masyarakat
 - a) Bertambahnya atau berkurangnya jumlah penduduk

Bertambahnya atau berkurangnya jumlah penduduk karena kelahiran dan migrasi akan berpengaruh langsung terhadap struktur kemasyarakatannya. Perpindahan penduduk karena migrasi juga akan menyebabkan perubahan yaitu stratifikasi

sosial dan pembagaian kerja akan berpengaruh pada lembaga kemasyarakatan.

b) Penemuan-penemuan baru

Penemuan baru lahir biasanya berasal dari kesadaran individu-individu akan kekurangan dalam kebudayaan, kualitas sumberdaya manusia yang handal dari sistem kebudayaan itu, serta adanya perangsang bagi aktifitas-aktifitas penemuan masyarakat.

c) Pertentangan dalam masyarakat (konflik)

Pertentangan bisa terjadi antara individu juga antara kelompok. Pertentangan bisa terjadi karena adanya benturan kepentingan kelompoknya. Selain itu pertentangan dalam masyarakat dapat terjadi karena adanya pandangan yang berbeda terhadap nilai sosial budaya.

2) Faktor dari luar masyarakat

a) Pengaruh kebudayaan masyarakat lain

Pengaruh kebudayaan masyarakat lain dalam masyarakat terbuka tidak dapat dihindari. Pertemuan dua kebudayaan itu akan menimbulkan kebudayaan baru yang disebut akulturasi.

b) Peperangan

Negara pemenang perang akan selalu melaksanakan kebudayaan pada negara yang kalah. Perubahan itu terjadi pada penduduk, tata nilai serta kelembagaan kemasyarakatan. Negara yang

mengalami perang tentu akan melakukan perombakan pada masyarakatnya (Yuliati dan Poernomo, 2003:84)

2. Perubahan Ekonomi

Dalam pembangunan sektor perikanan dalam hal ini khususnya pada fasilitas pendukungnya yaitu berupa pelabuhan perikanan pada beberapa daerah mengarah kepada pembangunan ekonomi, dimana dampak yang ditimbulkan pada sektor ekonomi merupakan hal yang berpengaruh terhadap semua kalangan, seperti bagi pemerintah daerah dan yang paling utama bagi masyarakat pesisir sekitar.

Dalam hal ini berkaitan dengan pembangunan ekonomi daerah dimana pembangunan ekonomi daerah merupakan kegiatan yang amat penting untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Menurut Arsyad (1999), dalam bukunya mengatakan bahwa:

“Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.”

Hampir serupa dengan Arsyad, menurut Hasibuan (1987:17), pembangunan ekonomi adalah:

“Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang terus menerus yang diusahakan dengan jalan memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”

Masalah pokok dalam pembangunan daerah berada pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang berdasarkan pada kekhasan

daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Sehingga kita perlu melakukan pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi.

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses, yaitu proses yang mencakup pembentukan-pembentukan institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru.

Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasinya dan dengan menggunakan sumberdaya yang ada harus memperkirakan potensi sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah (Arsyad, 1999).

D. Pelabuhan dan Pengembangan PPP

1. Pelabuhan dan Jenis-jenis Pelabuhan

a. Definisi Pelabuhan

Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah (PP) RI No. 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan, dalam pasal 1 ayat 1 yang dimaksud pelabuhan adalah:

“Tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan ekonomi dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra antar moda transportasi.”

Sedangkan pengertian Kepelabuhanan dalam pasal 1 ayat 2 adalah:

“Meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah.”

b. Jenis-jenis Pelabuhan

Menurut Triatmodjo (2010:6), pelabuhan dapat dibedakan menjadi beberapa macam yang tergantung pada sudut tinjauannya, yaitu dari segi penyelenggaraannya, pengusahaannya, fungsi dalam perdagangan nasional dan internasional, segi kegunaan dan letak geografisnya:

1) Ditinjau dari Segi Penyelenggaraannya

a) Pelabuhan Umum

Pelabuhan umum diselenggarakan untuk kepentingan pelayaran umum. Penyelenggaraan pelabuhan umum dilakukan oleh pemerintah dan pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada badan usaha milik negara yang diberi wewenang mengelola pelabuhan umum diusahakan.

b) Pelabuhan Khusus

Pelabuhan khusus diselenggarakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu. Pelabuhan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan umum, kecuali dalam keadaan tertentu dengan ijin pemerintah. Pelabuhan khusus dibangun oleh suatu perusahaan baik pemerintah maupun swasta, yang berfungsi untuk prasarana pengiriman hasil produksi perusahaan tersebut.

- 2) Ditinjau dari Segi Pengusahaannya
 - a) Pelabuhan yang diusahakan
Pelabuhan ini sengaja diusahakan untuk memberikan fasilitas-fasilitas yang diperlukan oleh kapal yang memasuki pelabuhan untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, menaikkan penumpang serta kegiatan lainnya. Pemakaian pelabuhan ini dikenakan biaya-biaya, seperti jasa labuh, jasa tambat, jasa pemanduan, jasa penundaan, jasa pelayanan air bersih, jasa dermaga, jasa penumpukan, bongkar muat, dan sebagainya.
 - b) Pelabuhan yang tidak diusahakan
Pelabuhan ini hanya merupakan tempat singgahan kapal, tanpa fasilitas bongkar-muat, bea cukai, dan sebagainya. Pelabuhan ini merupakan pelabuhan kecil yang disubsidi oleh pemerintah, dan dikelola oleh Unit Pelayanan Teknis Direktorat Jendral Perhubungan Laut.
- 3) Ditinjau dari Fungsi Perdagangan Nasional dan Internasional
 - a) Pelabuhan Laut
Pelabuhan laut adalah pelabuhan yang bebas dimasuki oleh kapal-kapal berbendera asing. Pelabuhan ini merupakan pelabuhan utama di suatu daerah yang dilabuhi kapal-kapal yang membawa barang untuk ekspor/ impor secara langsung ke dan dari luar negeri.
 - b) Pelabuhan Pantai
Pelabuhan pantai ialah pelabuhan yang disediakan untuk perdagangan dalam negeri dan oleh karena itu tidak bebas disinggahi oleh kapal berbendera asing. Kapal asing dapat masuk ke pelabuhan ini dengan meminta ijin terlebih dahulu.
- 4) Ditinjau dari Segi Penggunaannya
 - a) Pelabuhan Minyak
Untuk keamanan, pelabuhan minyak harus diletakkan agak jauh dari keperluan umum. Pelabuhan minyak biasanya tidak memerlukan dermaga atau pangkalan yang harus dapat menahan muatan vertikal yang besa, melainkan cukup membuat jembatan perancah atau tambatan yang dibuat menjorok ke laut untuk mendapatkan kedalaman air yang cukup besar. Bongkar muat dilakukan dengan pipa-pipa dan pompa-pompa.
 - b) Pelabuhan Barang
Di pelabuhan ini terjadi perpindahan moda transportasi, yaitu dari angkutan laut ke angkutan darat dan sebaliknya. Barang di

bongkar dari kapal dan diturunkan di dermaga. Selanjutnya barang tersebut diangkat langsung dengan menggunakan truk atau kereta api ketempat tujuan, atau disimpan di gudang atau lapangan penumpukan terbuka sebelum dikirim ke tempat tujuan. Demikian pula sebaliknya, barang-barang dari pengirim ditempatkan di gudang atau lapangan penumpukan sebelum dimuat ke kapal dan diangkat ke pelabuhan tujuan.

c) Pelabuhan Penumpang

Pelabuhan/ terminal penumpang di gunakan oleh orang-orang yang bepergian dengan menggunakan kapal penumpang. Terminal penumpang dilengkapi dengan stasiun penumpang yang melayani segala kegiatan yang berhubungan dengan kebutuhan orang yang bepergian, seperti ruang tunggu, kantor imigrasi, kantor bea cukai, keamanan, direksi pelabuhan, dan sebagainya.

d) Pelabuhan Campuran

Pada umumnya percampuran pemakaian ini terbatas untuk penumpang dan barang, sedang untuk keperluan minyak dan ikan biasanya tetap terpisah. Tetapi bagi pelabuhan kecil atau masih dalam taraf perkembangan, keperluan untuk bongkar muat minyak juga menggunakan dermaga atau jembatan yang guna keperluan barang dan penumpang. Pada dermaga dan jembatan juga diletakkan pipa-pipa untuk mengalirkan minyak.

e) Pelabuhan Militer

Pelabuhan ini mempunyai daerah perairan yang cukup luas untuk memungkinkan gerakan cepat kapal-kapal perang dan agar letak bangunan cukup terpisah. Konstruksi tambatan maupun dermaga hampir sama dengan pelabuhan barang, hanya saja situasi dan perlengkapannya agak lain. Pada pelabuhan barang letak/kegunaan bangunan harus seefisien mungkin sedang pada pelabuhan militer bangunan-bangunan pelabuhan harus dipisah-pisah yang letaknya agak berjauhan.

f) Pelabuhan Ikan

Pelabuhan ikan menyediakan tempat bagi kapal-kapal untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan dan memberikan pelayanan yang diperlukan. Berbeda dengan pelabuhan umum di mana semua kegiatan seperti bongkar muat barang, pengisian perbekalan perawatan dan perbaikan ringan yang dilakukan di dermaga yang sama; pada pelabuhan ikan sarana dermaga disediakan secara terpisah untuk berbagai kegiatan. Hal ini mengingat bahwa hasil tangkapan ikan adalah produk yang mudah busuk sehingga perlu penanganan secara cepat. Di samping itu jumlah kapal yang berlabuh di pelabuhan bisa cukup banyak sehingga penggunaan fasilitas pelabuhan, terutama dermaga harus dilakukan seefisien mungkin.

5) Ditinjau Menurut Letak Geografis

Menurut letak geografisnya, pelabuhan dapat dibedakan menjadi pelabuhan alam, semi alam atau buatan.

a) Pelabuhan Alam

Pelabuhan alam merupakan daerah perairan yang terlindungi dari badai dan gelombang secara alami, misalnya oleh suatu pulau, jazirah atau terletak di teluk, estuari atau muara sungai. Di daerah ini pengaruh gelombang sangat kecil.

b) Pelabuhan Buatan

Pelabuhan buatan adalah suatu daerah perairan yang dilindungi dari pengaruh gelombang dengan membuat bangunan pemecah gelombang (*breakwater*). Pemecah gelombang ini membuat daerah perairan tertutup dari laut hanya dihubungkan oleh suatu celah (mulut pelabuhan) untuk keluar masuknya kapal. Di dalam daerah tersebut dilengkapi dengan alat penambat. Bangunan ini dibuat mulai dari pantai dan menjorok ke laut sehingga gelombang yang menjalar ke pantai terhalang oleh bangunan tersebut.

2. Pelabuhan Perikanan dan Kelas-kelas Pelabuhan Perikanan

a. Pelabuhan Perikanan

Menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 tahun 2012 tentang Pelabuhan Perikanan, seperti yang terdapat dalam pasal 1 ayat 1 adalah:

“Tempat yang terdiri atas daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan”.

b. Kelas-kelas Pelabuhan Perikanan

Dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012, pelabuhan perikanan dapat diklasifikasikan menjadi empat kelas berikut ini.

1) Kelas A: Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS), dengan kriteria:

- a) Melayani kapal ikan beroperasi di perairan lepas pantai (perairan nusantara), perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), dan laut lepas
 - b) Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 60 GT
 - c) Panjang dermaga sekurang-kurangnya 300 m, dan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 3 m
 - d) Mampu menampung 100 kapal atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 6.000 GT dan
 - e) Memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 20 Ha
 - f) Ikan yang didaratkan sebagian untuk tujuan ekspor, serta
 - g) Terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya
- 2) Kelas B: Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), dengan kriteria:
- a) Mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia dan ZEEI
 - b) Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 30 GT
 - c) Panjang dermaga sekurang-kurangnya 150 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 3 m.
 - d) Mampu menampung 75 kapal perikanan atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 2.250 GT dan
 - e) Memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 10 Ha.

- f) Terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 30 Ton per hari; dan
 - g) Terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya.
- 3) Kelas C: Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), dengan kriteria:
- a) Melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia;
 - b) Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 10 GT;
 - c) Panjang dermaga sekurang-kurangnya 100 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 2 m;
 - d) Mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 30 unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 300 GT; dan
 - e) Memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 5 Ha.
 - f) Terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 5 Ton per hari; dan
 - g) Terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya
- 4) Kelas D: Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), dengan kriteria:
- a) Mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia;
 - b) Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 3 GT;

- c) Panjang dermaga sekurang-kurangnya 50 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 1 m.
- d) Mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 15 unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 75 GT dan
- e) Memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 1 ha.
- f) Terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 2 Ton per hari.

3. Penetapan Lokasi Pelabuhan Perikanan, Perencanaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan, dan Peningkatan Status Pelabuhan Perikanan

a. Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan

Pelabuhan perikanan dipergunakan untuk tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Pembangunan sebuah pelabuhan diawali dengan penetapan lokasi pelabuhan.

Untuk menetapkan lokasi pelabuhan perikanan perlu memperhatikan beberapa hal yang harus dipertimbangkan, menurut Triatmodjo (2010:46) beberapa hal yang perlu diperhatikan tersebut adalah:

1) Akseibilitas

Suatu pelabuhan akan dapat berkembang dengan baik apabila lokasi tersebut terhubung dengan jaringan jalan atau saluran transportasi air dengan daerah di sekitarnya, sehingga muatan (barang dan penumpang) dapat diangkut ke dan dari pelabuhan dengan mudah dan cepat. Kondisi jalan yang baik, lebar, datar dan dekat dengan lokasi pelabuhan memungkinkan hubungan yang lancar dengan kota-kota di sekitarnya.

- 2) Daerah Pengaruh
Pelabuhan yang mempunyai daerah pengaruh subur dengan populasi penduduk cukup padat dan dekat dengan kota besar di sekitarnya akan dapat berkembang dengan baik. Masyarakat dan industri akan mudah memanfaatkan keberadaan pelabuhan, baik untuk angkutan penumpang, barang maupun komoditi lainnya.
- 3) Ketersediaan Lahan
Ketersediaan lahan yang cukup luas dan baik di perairan maupun daratan, akan dapat menampung fasilitas-fasilitas pendukung pelabuhan. Tinjauan daerah perairan menyangkut luas perairan yang diperlukan untuk alur pelayaran, kolam putar (*turning basin*), penambatan dan tempat berlabuh. Daerah daratan juga harus cukup luas untuk bisa mengantisipasi perkembangan di daerah sekitar pelabuhan, seperti pengembangan industri dan kegiatan lainnya. Keadaan topografi daratan dan bawah laut harus memungkinkan untuk membangun suatu pelabuhan dan kemungkinan untuk pengembangan di masa mendatang. Daerah daratan harus cukup luas untuk membangun suatu fasilitas pelabuhan seperti dermaga, jalan, gudang dan juga daerah industri. Apabila daerah daratan sempit maka pantai harus cukup luas dan dangkal untuk memungkinkan perluasan daratan dengan melakukan penimbunan pantai tersebut. Daerah yang akan digunakan untuk perairan pelabuhan harus mempunyai kedalaman yang cukup sehingga kapal-kapal bisa masuk ke pelabuhan. Selain keadaan tersebut, kondisi geologi juga perlu diteliti mengenai sulit tidaknya melakukan pengerukan daerah perairan dan kemungkinan menggunakan hasil pengerukan tersebut untuk menimbun tempat lain.
- 4) Hidrooseanografi
Perairan pelabuhan harus tenang terhadap serangan gelombang dan terhindar dari sedimentasi. Untuk itu sedapat mungkin pelabuhan berada di perairan yang terlindung secara alami dari pengaruh gelombang seperti di perairan yang terlindung oleh pulau, di teluk, di muara sungai/estuari. Namun apabila hal ini tidak memungkinkan, pelabuhan ditempatkan di pantai terbuka dengan membuat pemecah gelombang, dengan konsekuensi biaya pembangunan lebih mahal. Pemecah gelombang merupakan fasilitas pelabuhan yang sangat atau paling mahal.
- 5) Fasilitas Pendukung
Keberadaan fasilitas pendukung pelabuhan yang telah ada di lokasi pelabuhan seperti air bersih, listrik dan komunikasi.

Sedangkan menurut Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2010, Pasal 11 mengenai Perencanaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan harus menggunakan perencanaan yaitu:

- 1) Studi Kelayakan
Studi kelayakan disusun dengan memperhatikan kesesuaian dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil/ Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Provinsi/ Kabupaten/ Kota, dukungan ketersediaan sumberdaya ikan dan WPP-NRI, ketersediaan sumberdaya manusia dan keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain terkait di lokasi pelabuhan. Studi kelayakan dituangkan dalam bentuk dokumen yang memuat tentang informasi sumberdaya ikan, kelayakan sarana dan prasarana wilayah, kelayakan teknis dan kelayakan sosial-ekonomi.
- 2) Rencana Induk Pelabuhan Perikanan
Rencana induk pelabuhan perikanan berisi rencana tata guna dan perairan yang meliputi rencana peruntukan wilayah kerja dan wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan. Rencana induk pelabuhan tersebut tertuang dalam bentuk dokumen yang memuat latar belakang, gambaran lokasi umum kondisi lokasi, kerangka kebijakan strategi pembangunan pelabuhan, tahapan dan jangka waktu pelaksanaan pembangunan pelabuhan perikanan, rencana titik koordinat wilayah kerja dan wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan, rencana fasilitas yang akan dibangun, pekiraan kebutuhan anggaran, rencana pengelolaan pelabuhan perikanan dan gambar tata letak (*lay out*).
- 3) Desain Rinci
Desain rinci (*detail design*) disusun setelah memperoleh penetapan lokasi atau izin lokasi dari bupati/walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Desain rinci dituangkan dalam bentuk dokumen yang memuat kondisi mekanika tanah, kondisi hidro-seanografi, kondisi topografi dan bathymetri, struktur dan model konstruksi yang direncanakan, gambar desain, rincian anggaran biaya dan spesifikasi teknis fasilitas yang akan dibangun.

Dengan memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhi penentuan lokasi pelabuhan tersebut akan dapat diketahui apakah layak dibangun suatu pelabuhan. Perlu diketahui, salah satu halkelayakan pelabuhan tersebut dengan memperhatikan manfaat dari pelabuhan tersebut terhadap perkembangan daerah pesisir pantai sekitar.

b. Peningkatan Status Pelabuhan Perikanan

Sebelum meningkatkan status pelabuhan, pelabuhan tersebut haruslah terlebih dahulu mempunyai kelas yang sesuai dengan kriteria teknis yang ada dan laporan hasil verifikasi yang kemudian di tetapkan oleh seorang Menteri.

Untuk bisa meningkatkan status pelabuhan telah diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 tahun 2012 tentang Kepelabuhan Perikanan, pasal 25 ayat 1 sampai 6 adalah sebagai berikut:

- 1) Pelabuhan perikanan yang telah ditetapkan kelasnya dapat mengajukan permohonan peningkatan kelas berdasarkan kriteria teknisnya dan kriteria operasionalnya.
- 2) Permohonan peningkatan kelas pelabuhan perikanan diajukan oleh penyelenggara pelabuhan perikanan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- 3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan data fasilitas pelabuhan perikanan, data operasional pelabuhan perikanan, organisasi pengelola/sumber daya manusia, proyeksi pengembangan pelabuhan perikanan, dan rencana pembiayaan.
- 4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan verifikasi oleh Direktur Jenderal paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap.
- 5) Direktur Jenderal menyampaikan laporan hasil verifikasi kepada Menteri sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan kelas pelabuhan perikanan.
- 6) Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri menetapkan peningkatan kelas pelabuhan perikanan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja..

4. Fasilitas Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)

Dalam rangka menunjang fungsi, pelabuhan perikanan pantai mempunyai beberapa fasilitas yang telah di atur dalam Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 pasal 4 ayat 1-4, fasilitas yang ada yaitu:

a. Fasilitas Pokok

- 1) Penahan gelombang (*break water*), turap (*revetment*), dan groin
- 2) Dermaga

- 3) *Jetty*
 - 4) Kolam pelabuhan
 - 5) Alur pelayaran
 - 6) Jalan kompleks dan drainase
 - 7) Lahan
- b. Fasilitas Fungsional
- 1) Tempat Pemasaran Ikan
 - 2) Navigasi pelayaran dan komunikasi seperti telepon, internet, radio komunikasi, rambu-rambu, lampu suar, dan menara pengawas
 - 3) Air bersih, instalasi Bahan Bakar Minyak (BBM), es dan instalasi listrik
 - 4) Tempat pemeliharaan kapal dan alat penangkapan ikan seperti *dock/ slipway*, bengkel dan tempat perbaikan jarring
 - 5) Tempat penanganan dan pengolahan hasil perikanan seperti *transit sheed* dan laboratorium pembinaan mutu
 - 6) Perkantoran seperti kantor administrasi pelabuhan, pos pelayanan terpadu, dan perbankan
 - 7) Transportasi seperti alat-alat angkut ikan
 - 8) Kebersihan dan pengelolaan limbah seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Tempat Pembuangan Sampah (TPS)
 - 9) Pengamanan kawasan seperti pagar kawasan
- c. Fasilitas Penunjang
- 1) Balai pertemuan nelayan
 - 2) Mess operator
 - 3) Wisma nelayan
 - 4) Fasilitas sosial dan umum seperti tempat ibadah dan Mandi Cuci Kakus (MCK)
 - 5) Pertokoan
 - 6) Pos jaga

E. Pengertian Masyarakat dan Wilayah Pesisir

1. Pengertian Masyarakat

Menurut Soekanto (2006:13) masyarakat adalah suatu system dari kebiasaan dan tata cara dari wewenang dan kerjasama antara berbagai kelompok dan penggolongan dari pengawasan tingkah laku serta kebiasaan manusia keseluruhan yang selalu berubah inilah yang dinamakan masyarakat.

Dari batasan tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia yang mempunyai tempat tinggal tertentu dimana para anggotanya memiliki kesamaan kepentingan sehingga menimbulkan ikatan batin diantara mereka. Dalam berbagai kepustakaan, masyarakat dapat diklasifikasikan secara historis kedalam tiga kategori, yaitu masyarakat yang bersifat tradisional, masyarakat yang bersifat peralihan atau transisi, dan masyarakat mau atau modern. Negara-negara yang sedang berkembang pada umumnya termasuk dalam kategori masyarakat peralihan atau transisi, demikian juga Indonesia.

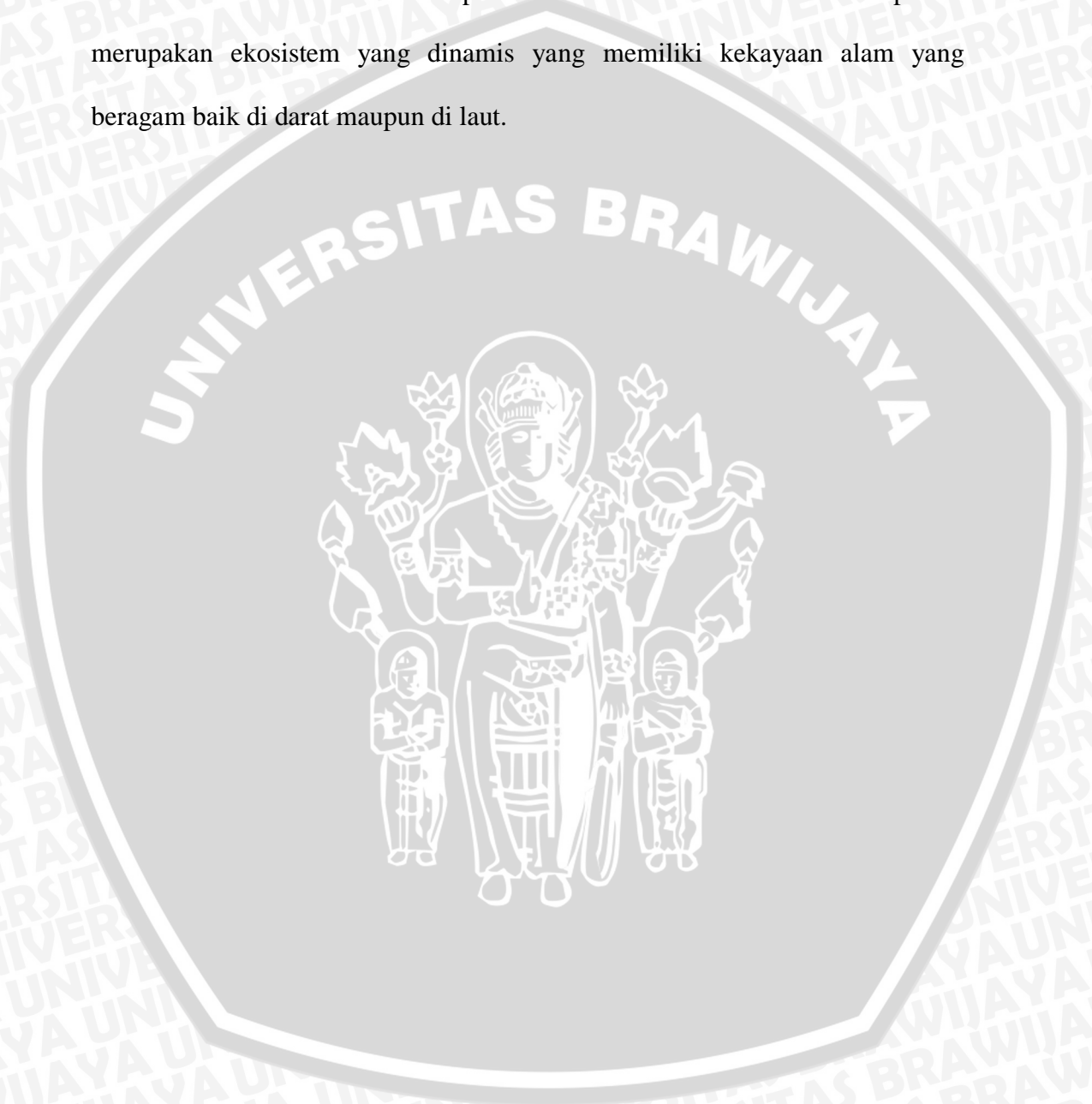
2. Wilayah Pesisir

Dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (PWK-PK) Pasal 1 ayat (2), disebutkan bahwa wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Soegiarto (1976) yang dikutip oleh Dahuri (1996:8), definisi wilayah pesisir yang digunakan di Indonesia adalah daerah pertemuan antara darat dan laut; ke arah darat pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin, sedangkan ke arah laut wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air

tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran.

Berdasarkan definisi dapat dikatakan bahwa ekosistem pesisir merupakan ekosistem yang dinamis yang memiliki kekayaan alam yang beragam baik di darat maupun di laut.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ilmiah merupakan kegiatan untuk mengembangkan serta meningkatkan pengetahuan, guna mencapai tujuan ini maka dibutuhkan suatu metode yang paling tepat dan mempunyai keserasian dengan tujuan penelitian. Seperti halnya yang dikutip Nazir (2003:95), penelitian adalah suatu proses mencapai sesuatu secara sistematis dalam waktu yang lama dengan metode ilmiah serta aturan-aturan yang berlaku.

Pada dasarnya terdapat tiga macam metode penelitian yang utama yaitu metode historis, metode diskripsi dan metode penelitian eksperimental. Metode historis lebih menekankan pada gejala yang telah lampau, sedangkan metode diskriptif ditujukan pada masalah yang terjadi pada masa sekarang, dan metode eksperimental menekankan pada percobaan guna menemukan suatu hasil atau lebih sesuai tujuan penelitian yang telah diterapkan.

Sesuai dengan hal tersebut maka jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pada dasarnya penelitian yang bersifat diskriptif ini berupaya memberikan gambaran mengenai fenomena tertentu secara terperinci, sehingga dapat diperoleh

pemahaman yang lebih jelas. Dengan tujuan memecahkan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta dan sifat populasi tertentu.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Menurut Faisal (2003:21) metode deskriptif diartikan sebagai berikut:

Metode deskriptif atau *descriptive research*, yang biasa disebut juga penelitian taksonomik atau *taxonomic research* dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Jenis penelitian ini tidak sampai mempersoalkan jalinan hubungan antar variabel yang ada, tidak dimaksudkan untuk menarik generasi yang menjelaskan variabel-variabel antededen yang menyebabkan suatu gejala atau kenyataan sosial. Karenanya, pada suatu penelitian deskriptif, tidak menggunakan dan tidak melakukan pengujian hipotesis seperti yang dilakukan dalam penelitian eksplanasi, berarti tidak dimaksudkan untuk membangun dan mengembangkan perbendaharaan teori.

Selanjutnya Bogdan dan Taylor yang dikutip dalam Moleong (2013:3) menyatakan bahwa:

Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari status keutuhan.

Kesimpulan yang diperoleh tentang penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian dengan menggunakan pemberian atau penggambaran atau suatu fenomena yang dijadikan perhatian dalam suatu uraian sistematis, faktual, akurat dan jelas bisa terkait dengan hubungan yang timbul antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.

Uraian gambaran yang dihasilkan dari data kualitatif sebagaimana yang diidentifikasi di atas, didukung pula oleh keberadaan bentuk data lain seperti telaah atas dokumen atau laporan-laporan yang terkait, baik kalimat atau kata maupun angka-angka yang dapat diformulasikan dalam bentuk kata-kata. Dengan demikian tampak jelas bahwa penelitian yang akan dilakukan masuk dalam kategori deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

B. Fokus Penelitian

Tidak ada satupun penelitian yang dilakukan tanpa adanya fokus, karena fokus itu pada dasarnya adalah masalah (Moleong, 2013:237). Karena merupakan satu hal yang paling penting maka sebaiknya fokus penelitian harus dilakukan sebelumnya agar peneliti memiliki arah yang jelas dan membantu peneliti membatasi bidang sasaran. Sehingga permasalahan yang diteliti nantinya tidak meluas dan pengumpulan data tidak yang tidak diperlukan dapat dihindari.

Seperti yang dikatakan oleh Moleong (2013:93) bahwa penelitian kualitatif menghendaki ditetapkannya bantuan dalam penelitian atas dasar fokus yang timbul sebagai permasalahan dalam penelitian. Terdapat beberapa hal yang melandasi alasan tersebut yang meliputi batas menentukan kenyataan jamak yang kemudian mempertajam fokus, penetapan fokus dapat lebih dekat dihubungkan oleh interaksi antara peneliti dan fokus.

Menurut Moleong (2013:97-98) fokus penelitian dalam sebuah penelitian kualitatif memiliki landasan sebagai berikut:

1. Suatu penelitian tidak dimulai dari suatu yang vakum atau kosong
2. Fokus pada dasarnya adalah masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah atau kepustakaan lainnya
3. Tujuan penelitian adalah pada dasarnya memecahkan masalah yang dirumuskan. Implikasinya, masalah perlu dirumuskan dahulu, barulah tujuan penelitian ditetapkan.
4. Masalah yang bertumpu pada fokus yang ditetapkan bersifat tentatif atau dapat diubah sesuai dengan situasi latar penelitian. Implikasinya, peneliti tidak perlu kecewa jika masalah dan fokusnya berubah.

Batas yang ditentukan dalam penelitian didasarkan pada fokus disebabkan oleh beberapa hal Moleong (2013:12) meliputi:

1. Batas menentukan kenyataan jamak yang kemudian mempertajam fokus.
2. Penetapan fokus dapat lebih dekat dihubungkan oleh interaksi antara peneliti dan fokus penelitian.

Dengan ulasan di atas maka dapat diketahui bahwa penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mengevaluasi dampak kebijakan publik dengan fokus penelitian pada dampak pembangunan PPP Tamperan terhadap sosial ekonomi masyarakat pesisir sekitar di Kabupaten Pacitan. Dengan analisis di atas maka tujuan yang hendak dicapai yaitu untuk mengetahui dampak dari kebijakan pembangunan PPP Tamperan terhadap masyarakat pesisir sekitar terutama dilihat dari perubahan sosial ekonomi masyarakatnya. Dalam penelitian ini peneliti memberikan batasan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Kebijakan Pembangunan PPP Tamperan
 - a. Penetapan dan Kebijakan Peningkatan status PPI Tamperan menjadi PPP Tamperan

- b. Aktor Pemangku Kepentingan Pelabuhan dan Struktur Organisasi PPP Tamperan Pacitan
2. Dampak kehidupan Sosial Masyarakat Pesisir Sekitar
 - a. Presepsi masyarakat
 - b. Interaksi sosial
3. Dampak kehidupan Ekonomi Masyarakat Pesisir Sekitar
 - a. Pekerjaan/daya serap lapangan kerja dengan adanya pelabuhan
 - b. Tingkat pendapatan

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan melakukan penelitian, sehingga peneliti akan memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan tema, masalah serta fokus penelitian yang telah diterapkan. Lokasi penelitian ini adalah Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan di Kelurahan Sidoharjo Kabupaten Pacitan, yang dimana masyarakat pesisir sekitar yang merasakan dampak adanya pelabuhan perikanan tersebut. Oleh karena itu peneliti memilih Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan di Kelurahan Sidoharjo sebagai tempat yang tepat untuk memperoleh data dan informasi untuk penelitian.

Sedangkan situs penelitian merupakan tempat dimana peneliti menangkap keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan. Sesuai dengan

permasalahan yang diteliti, maka penetapan situs pada penelitian ini adalah masyarakat pesisir sekitar yang tinggal di dekat PPP Tamperan Kelurahan Sidoharjo.

D. Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland yang dikutip oleh Moleong (2013:157) menjelaskan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut bagian ini jenis datanya dibagi kedalam tindakan, pernyataan, sumber data tertulis.

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh langsung dari dua sumber yaitu:

1. Data Primer yaitu data yang dapat diperoleh langsung dari narasumber. Pada umumnya data primer diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak terkait sehingga memperoleh data dan informasi yang lengkap, yang mungkin tidak didapatkan dari data sekunder. Dalam penelitian ini, data primer dapat diperoleh langsung dari masyarakat pesisir disekitar pelabuhan perikanan Kelurahan Sidoharjo, Kabupaten Pacitan. Selain itu, data primer ini juga dapat dari Kepala Unit Pengelola PPP Tamperan dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan, serta dinas-dinas terkait yang berwenang.

2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari narasumber. Untuk kepentingan penelitian ini data sekunder yang akan dikumpulkan adalah data yang sudah tersedia dalam tempat penelitian dilakukan yaitu berupa Undang-undang, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti serta dapat juga dari pakar, surat kabar, majalah, peristiwa, buku, dokumen dan data dari internet.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Arikunto (1998:134) adalah cara atau metode yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang dimana cara tersebut menunjuk pada suatu yang abstrak, tidak dapat diwujudkan dalam benda yang kasat mata tetapi dapat dipertontonkan penggunaannya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi, yaitu proses pengumpulan data dengan melakukan penelitian secara langsung ataupun tidak langsung pada objek penelitian dan juga pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diselidiki dalam hal ini berkenaan dengan dampak kebijakan pembangunan PPP Tamperan terhadap masyarakat pesisir sekitar Kelurahan Sidoharjo Kabupaten Pacitan.
2. Wawancara, yaitu mendapatkan data atau informasi dengan cara yang ditempuh untuk memperoleh data melalui tanya jawab secara

langsung dengan beberapa orang yang dianggap berkompeten guna dimintai keterangan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian.

3. Dokumentasi, yaitu terkait teknik yang dilakukan dengan mencatat atau menyalin data-data yang ada dalam dokumen di lokasi penelitian, khususnya yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dan informasi serta untuk menggali data yang diperlukan dalam penelitian. Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, peneliti harus datang sendiri ke lokasi penelitian untuk memperoleh gambaran-gambaran yang sebenarnya dari obyek yang diteliti dan kemudian menganalisis data-data yang diperoleh.

Sehubungan dengan teknik pengumpulan data tersebut, maka instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai alat dalam melakukan pengumpulan data antara lain:

1. Peneliti Sendiri

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat di pisahkan dari pengamatan yang ikut berperan serta. Namun peranan peneliti yang menentukan keseluruhan skenarionya. (Moleong, 2013:163)

2. Pedoman wawancara

Dalam hal ini penulis menggunakan petunjuk umum wawancara dengan membuat kerangka dan garis besar hal-hal yang ditanyakan dalam proses wawancara.

3. Catatan Lapangan

Merupakan catatan penulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif.

4. Dokumentasi

Dalam hal ini penulis menggunakan data primer dan sekunder yang tentunya berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data ini dapat diperoleh dari berbagai dokumen yang mendukung dan hasil wawancara selama penelitian.

G. Uji Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data di metode penelitian kualitatif menggunakan istilah yang berbeda dengan penelitian kualitatif. Jika kita mengenal istilah uji validitas internal, uji validitas eksternal, uji reliabilitas dan objektivitas, maka pada metode penelitian kualitatif kita akan mengenal kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Uji keabsahan data memiliki nilai penting dalam penelitian, bahwa temuan-temuan di dalam penelitian dapat dipercaya, atau dapat dipertimbangkan. Selain itu untuk

meyakinkan bagi peneliti dan orang lain, bahwa temuan-temuan penelitian sudah dapat di uji kebenarannya. Menurut Moleong (2013:321), bahwa keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas) menurut versi “*positivisme*” dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan paradigmanya sendiri.

Menurut Moleong (2013:324), untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas kriteria tertentu. Terdapat empat kriteria yang digunakan , yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependendability*), dan kepastian (*confirmability*). Adapun penjelasan terkait empat kriteria tersebut, yaitu:

1. Penerapan kriteria derajat kepercayaan (*credibility*) pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dari non kualitatif. Kriteria ini berfungsi: pertama, melaksanakan *inquiry* sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai; kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.
2. Kriteria keteralihan berbeda dengan validitas eksternal dari non kualitatif. Konsep validitas itu menyatakan bahwa generalisasi suatu penemuan dapat berlaku atau diterapkan pada semua konteks dalam populasi yang sama atas dasar penemuan yang diperoleh pada sampel yang secara representatif mewakili populasi itu. Keteralihan sebagai persoalan *empiris* bergantung pada kesamaan antara konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan pengalihan tersebut seorang peneliti hendaknya mencari dan mengumpulkan kejadian *empiris* tentang kesamaan konteks. Dengan demikian peneliti bertanggung jawab untuk menyediakan data deskriptif secukupnya jika ia ingin membuat keputusan tentang pengalihan tersebut. Untuk keperluan itu peneliti harus melakukan penelitian kecil untuk memastikan usaha memverifikasi tersebut.

3. Kriteria ketergantungan merupakan substitusi istilah reliabilitas dalam penelitian non kualitatif. Pada cara non kualitatif, reliabilitas ditunjukkan dengan jalan mengadakan replikasi studi. Jika dua atau beberapa kali diadakan pengulangan suatu studi dalam suatu kondisi yang sama dan hasilnya secara esensial sama, maka dikatakan reliabilitas tercapai.
4. Kriteria kepastian berasal dari konsep “objektivitas” menurut non kualitatif. Non kualitatif menetapkan objektivitas dari segi kesepakatan antar subjek.
Disini pemastian bahwa sesuatu itu objektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, dan penemuan seseorang. Dapatlah dikatakan bahwa pengalaman seseorang itu subjektif sedangkan jika disepakati oleh beberapa atau banyak orang, barulah dapat dikatakan objektif. Jadi objektivitas-objektivitasnya suatu hal bergantung “kualitas” yang melekat pada konsep objektivitas. Hal ini digali dari pengertian bahwa jika sesuatu itu objektif, berarti dapat dipercaya, faktual, dan dapat dipastikan, (Moleong, 2013:324-326).

Setelah menetapkan kriteria-kriteria keabsahan data, maka teknik pemeriksaan dapat diuraikan. Kriteria yang diperiksa dapat dilakukan dengan satu atau beberapa teknik pemeriksaan tertentu. Adapun teknik pemeriksaan data tersebut, yaitu:

1. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, yaitu:

- a. Perpanjang Pengamatan

Perpanjang pengamatan berarti peneliti ke lapangan melakukan pengamatan, wawancara, lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjang pengamatan berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin akrab, terbuka dan saling mempercayai. Bila terjadi

raport, maka telah terjadi kewajaran dalam penelitian, di mana kehadiran peneliti tidak lagi mengganggu perilaku yang dipelajari. Lamanya waktu perpanjangan pengamatan ini dilakukan, akan sangat tergantung pada kedalaman, keleluasaan, dan kepastian data. Dalam perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian ini, sebaiknya difokuskan pada pengujian terhadap data yang diperoleh, apakah data yang diperoleh itu setelah di cek kembali ke lapangan benar atau tidak. Bila setelah dicek kembali ke lapangan data sudah benar berarti data kredibel, maka waktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri.

b. Peningkatan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut, maka kepastian data dan urutan peristiwa dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Selain itu, peneliti juga dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang di amati. Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait. Dengan demikian wawasan peneliti

akan semakin luas dan tajam, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan itu benar, dipercaya atau tidak.

c. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

1) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

3) Triangulasi Waktu

Waktu juga dapat mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat

narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara pengecekan melalui wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi berbeda.

d. Menggunakan Referensi

Referensi di sini adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara didukung dengan adanya rekaman wawancara. Data tentang interaksi manusia, atau gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto. Alat-alat bantu perekam data dalam penelitian kualitatif, seperti kamera, *handycam*, alat rekam suara sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.

e. Analisa Kasus Negatif

Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya.

f. *Member Check*

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh pemberi data berarti data tersebut valid, sehingga semakin kredibel.

2. Uji Transferabilitas

Dalam penelitian kualitatif, nilai transfer bergantung pada pemakai, hingga manakala hasil penelitian tersebut dapat digunakan dalam konteks dan situasi sosial lain. Oleh karena itu, supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dalam membuat laporan harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya. Dengan demikian pembaca menjadi jelas atas hasil peneliti tersebut, sehingga dapat memutuskan dapat atau tidaknya untuk mengaplikasikan hasil penelitian tersebut ditempat lain.

3. Uji Dependabilitas

Dalam penelitian kualitatif, uji dependabilitas dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data, peneliti seperti ini perlu di uji dependabilitasnya. Kalau proses penelitian tidak dilakukan

tetapi datanya ada, maka peneliti tersebut tidak *dependable*. Untuk itu pengujian dependabilitas dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.

4. Uji Konfirmabilitas

Dalam penelitian kualitatif, uji konfirmabilitas mirip dengan uji dependabilitas, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji konfirmabilitas berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmabilitas.

Dari berbagai macam teknik pengujian data metode penelitian kualitatif yang ada dan telah dijelaskan diatas, penulis telah menggunakan teknik pengujian data triangulasi. Dengan teknik pengujian data triangulasi, penulis dapat melakukan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Cara yang digunakan bisa dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, dan waktu.

H. Analisis Data

Analisa data merupakan suatu kegiatan pengolahan agar menjadi lebih sederhana, mudah dipahami dan dapat dipergunakan dalam pemecahan masalah atau dapat dipergunakan untuk menggambarkan kondisi yang terjadi secara jelas. Pada penelitian ini data yang diperoleh akan dianalisis dan diinterpretasikan, dimana data yang dipergunakan adalah model analisa

kualitatif, menurut Miles dan Huberman seperti yang dikutip oleh Sugiyono (2013:337) dalam analisa kualitatif terdiri dari empat tahapan kegiatan, yaitu:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang peneliti untuk memperoleh data yang valid.

2. Reduksi Data

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama kegiatan penelitian kualitatif berlangsung, sehingga diharapkan nantinya akan diklasifikasikan dan diperoleh suatu verifikasi yang jelas dan terarah.

3. Penyajian Data

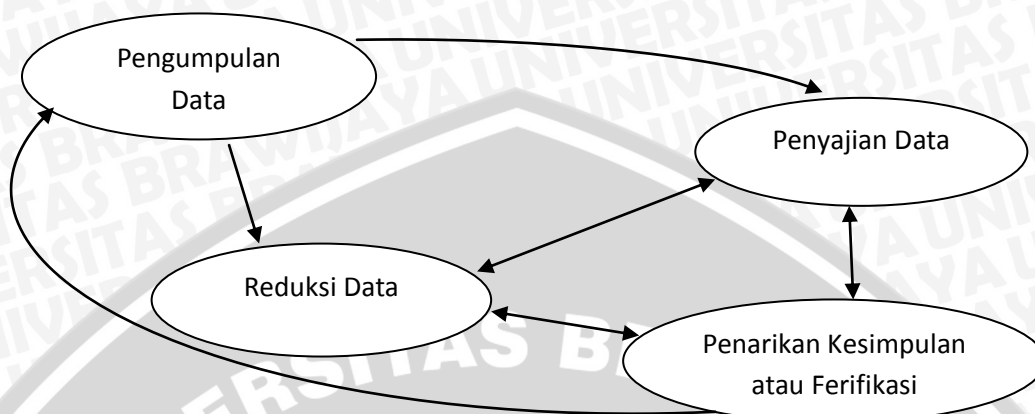
Merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data, maka akan memudahkan peneliti untuk memahami peristiwa yang sedang terjadi, upaya yang dilakukan serta tindakan atau analisis lebih lanjut yang didasarkan atas pemecahan tersebut. Dengan demikian, melalui penyajian data ini peneliti akan mengetahui gambaran obyek atau fokus penelitian secara keseluruhan sesuai dengan topik penelitian.

4. Menarik kesimpulan

Data yang diperoleh disajikan sedemikian rupa kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut untuk memperoleh yang sebenarnya. Kesimpulan yang telah ditarik akan diverifikasi baik dengan kerangka pikir peneliti maupun berdasarkan catatan-catatan yang ada agar mempunyai validitas dan tercapai konsensus pada tingkat optimal antara peneliti dengan sumber informasi.

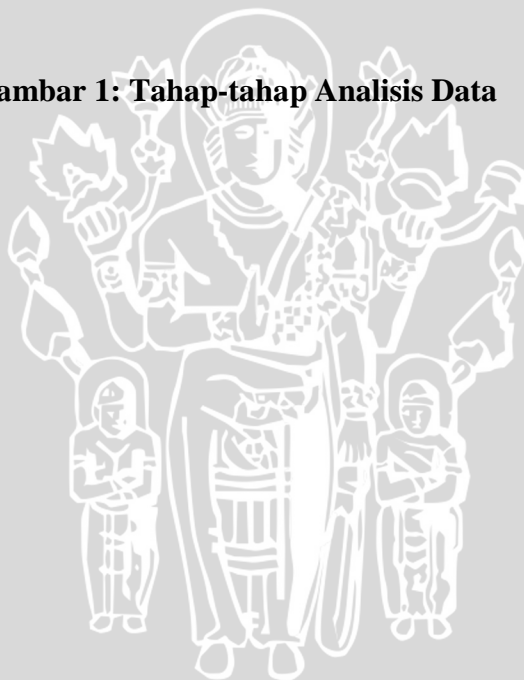
Dalam penelitian ini semua data yang diperoleh akan direduksi, yaitu memilih data (baik dengan mengurangi maupun menambah diklasifikasi), karena tidak semua data yang diperoleh itu mempunyai kaitan dengan topik penelitian. Setelah itu data tersebut dianalisis, kemudian dilakukan penyajian data dengan membuat kesimpulan sementara.

Analisa data yang dibutuhkan bersifat umum dan menyeluruh tentang hal-hal yang tercakup dalam fokus penelitian. Dalam hal ini peneliti berusaha memberikan gambaran dan mendeskripsikan tentang Pembangunan PPP Tamperan dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Ekonomi Masyarakat Pesisir Sekitar.



Sumber: Miles dan Huberman dikutip dan diterjemahkan dalam Sugiyono (2013:338)

Gambar 1: Tahap-tahap Analisis Data



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Pacitan

a. Kondisi geografis Kabupaten Pacitan

Kabupaten Pacitan merupakan salah satu dari 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang terletak di pantai selatan Pulau Jawa. Kabupaten Pacitan terletak di antara $110^{\circ}55'$ – $111^{\circ}25'$ BT dan $7^{\circ}55'$ – $8^{\circ}17'$ LS, dengan luas wilayah 1.389,8716 Km². Batas wilayah Kabupaten Pacitan sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Ponorogo

Sebelah Timur : Kabupaten Trenggalek

Sebelah Selatan : Samudera Hindia

Sebelah Barat : Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah)

Secara administratif, Kabupaten Pacitan terbagi atas 12 Kecamatan, 5 Kelurahan dan 166 desa. Dari 12 Kecamatan yang ada, terdapat 8 Kecamatan yang berada di tepian pantai atau berbatasan langsung dengan Samudera Hindia yaitu Kecamatan Donorojo, Kecamatan Punung, Kecamatan

Pringkuku, Kecamatan Pacitan, Kecamatan Kebonagung, Kecamatan Tulakan, Kecamatan Ngadirojo dan Kecamatan Sudimoro.

Kondisi geologi wilayah Kabupaten Pacitan umumnya berupa vulkanik dan kars. Sejumlah besar erupsi serta bentuk kerucut, dengan material-material hasil letusannya berbentuk padat batu gamping serta lain-lain bahan vulkanik lepas. Semua bahan vulkanik itu membentuk pegunungan menghasilkan morfologi yang berbukit-bukit dan bergunung-gunung dengan perbedaan relief topografik yang cukup besar. Dibagian selatan sepanjang garis pantai kondisi geologinya berupa satuan kars dengan bahan penyusun batu gamping.

b. Visi Misi Kabupaten Pacitan

Penetapan visi diperlukan untuk memadukan gerak langkah setiap unsur organisasi dan masyarakat untuk mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya yang ada dalam menciptakan Kabupaten Pacitan sebagaimana dicita-citakan. Adapun rumusan Visi Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016 adalah “Terwujudnya Masyarakat Pacitan Yang Sejahtera”.

Sesuai dengan harapan “Terwujudnya Masyarakat Pacitan Yang Sejahtera”, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Pacitan tahun 2011-2016 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagaimana berikut:

- 1) Profesional birokrasi dalam rangka meningkatkan pelayanan prima dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik
- 2) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

- 3) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat
- 4) Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang bertumpu pada potensi unggulan
- 5) Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar
- 6) Mengembangkan tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian dan memiliki keimanan serta memantapkan kerukunan umat beragama

2. Gambaran Umum Wilayah Kelurahan Sidoharjo

Kelurahan Sidoharjo merupakan salah satu kelurahan dari 5 kelurahan yang ada di Kabupaten Pacitan. Luas dari wilayah Kelurahan Sidoharjo sendiri seluas 723.430 Ha. Berdasarkan data dari kantor Kelurahan Sidoharjo bahwa secara administratif Kelurahan Sidoharjo terdiri dari 12 RW dan 42 RT yang tersebar dalam 12 dusun yaitu:

- 1) Dusun Kriyan
- 2) Dusun Pojok
- 3) Dusun Caruban
- 4) Dusun Bleber
- 5) Dusun Tuban
- 6) Dusun Jaten
- 7) Dusun Plelen
- 8) Dusun Balon

- 9) Dusun Barak
- 10) Dusun Barean
- 11) Dusun Teleng
- 12) Dusun Tamperan.

Sedangkan Kelurahan Sidoharjo sendiri memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara :Ds.Bangunsari, Ds. Sumberharjo, Kel.Pucangsewu

Sebelah Timur : Kel. Pacitan, Kel. Baleharjo Kel. Ploso

Sebelah Selatan : Samudera Indonesia

Sebelah Barat : Kecamatan Pringkuku

Menurut data yang diperoleh dari kantor Kelurahan Sidoharjo pada bulan November tahun 2013, jumlah penduduk yang ada di Kelurahan Sidoharjo adalah sekitar 7.428 orang. Dengan perbedaan jumlah penduduk laki-laki sebesar 3.387 orang, sedangkan jumlah penduduk perempuan sebesar 3.630 orang. Wilayah Kelurahan Sidoharjo sendiri berada di daerah pesisir dan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia terutama di dua dusun yaitu, Dusun Tamperan dan Dusun Teleng. Di Dusun Teleng dan Dusun Tamperan tersebut mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai nelayan dan pedagang.

3. Gambaran Umum PPP Tamperan

a. Kondisi umum PPP Tamperan

Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan terletak di dusun Tamperan Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa

Timur, dengan jarak ± 7 km dari pusat ibukota Kabupaten Pacitan. PPP Tamperan cukup mudah untuk diakses melalui jalan raya Pacitan-Solo. Berdasarkan letak geografis PPP Tamperan terletak pada posisi koordinat $8^{\circ} 13' 30''$ LS dan $111^{\circ} 4' - 28''$ BT, berada disisi kanan Teluk Pacitan. Kawasan teluk Pacitan sangat ideal dikembangkan sebagai kawasan perikanan terpadu/ *fishery town*.

b. Visi dan Misi PPP Tamperan

PPP Tamperan dalam memberikan pelayanannya mempunyai visi dan misi untuk motivasi dalam meningkatkan kualitas kinerjanya. Visi PPP Tamperan adalah “Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan Sebagai Sentra Industri Tuna Di Jawa Timur.”

Sedangkan untuk misi PPP Tamperan sendiri adalah sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan prasarana sarana PPP secara efisien dan efektif
- 2) Memberikan pelayanan prima untuk menunjang kegiatan perikanan
- 3) Menciptakan rasa aman dan iklim usaha yang kondusif
- 4) Mewujudkan sektor perikanan dan kelautan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi daerah

c. Fasilitas PPP Tamperan

Berdasarkan Permen KKP No 8 Tahun 2012 tentang pelabuhan perikanan, Pelabuhan Perikanan Tamperan dipandang dari segi teknis dan operasional tergolong dalam pelabuhan Kelas C (Pelabuhan Perikanan Pantai). Dalam rangka menunjang kegiatan operasional dan fungsi-fungsi

kepelabuhanan, Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang terdiri dari fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang sebagai berikut:

1) Fasilitas Pokok

- a) Penahan gelombang/*breakwater* sepanjang 756,6 m
- b) Dermaga *Coison* sepanjang 210 m
- c) *Drainase* sepanjang 731 m
- d) Jalan kompleks sepanjang 1.524 m
- e) Jalan *Rigd* beton sepanjang 240 m
- f) *Jetty* sepanjang 107 m
- g) Kolam labuh seluas 6,4 Ha
- h) Lahanreklamasi seluas 4,5 Ha
- i) Turap/*Rivetment* sepanjang 275 m

2) Fasilitas Fungsional

- a) Tempat pelelangan ikan/TPI seluas 1.160 m²
- b) SPDN/ Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan seluas 281 m²
- c) Lampu suar/*navigasi* sejumlah 4 unit
- d) Genset/power house sebesar 30.000 VA
- e) *Ground Reservoir* seluas 50 m²
- f) Gudang jaring seluas 294 m²
- g) Tempat prosesi ikan seluas 484 m²
- h) Bengkel seluas 288 m²
- i) Kantor PPP Tamperan seluas 220 m²

- j) Pos Keamanan Perikanan dan Kelautan Terpadu (KAMLADU) seluas 142 m²
- k) Instalasi Pengolahan Air Limbah sepanjang 74 m²
- 3) Fasilitas Penunjang
 - a) Balai Pertemuan seluas 220 m²
 - b) Toilet/MCK seluas 80 m²
 - c) Kios basah seluas 360 m²
 - d) Kios Kering seluas 192 m²
 - e) Pos jaga seluas 12,6 m²
 - f) Wisma nelayan seluas 240 m²
 - g) Mushola/tempat ibadah seluas 100 m²
 - h) Mess operator seluas 246 m²

B. Penyajian Data

1. Kebijakan Pembangunan PPP Tamperan

a. Penetapan dan Kebijakan Peningkatan Status PPP Tamperan

Sebelum kebijakan pembangunan dan peningkatan status PPP Tamperan diputuskan, terlebih dahulu tentunya mempunyai sebuah alasan kenapa PPI Tamperan perlu untuk di tingkatkan statusnya dari menjadi PPP Tamperan. Alasan kenapa pentingnyastatus PPI Tamperan perlu ditingkatkan menjadi PPP Tamperan dijelaskan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan sebagai berikut:

“Alasan kenapa PPI Tamperan yang dibangun pada tahun 1977 itu perlu dikembangkan jadi PPP Tamperan yang sekarang ini karena mengingat

potensi lestari sumberdaya perikanan laut yang masih besar di Kabupaten Pacitan sekitar 36.000 Ton pertahunnya, tapi masih terkendala dengan fasilitas yang sudah tidak layak dan memenuhi untuk kegiatan kepelabuhan seperti tanggul penahan gelombang, kolam labuh untuk bongkar muat ikan, dan dermaga untuk bersandar kapal, jadi kapal harus ditengah perairan kemudian diangkat menggunakan kapal-kapal kecil menuju Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Sedangkan kapal kecil sendiri harus ditarik menuju tepi daratan agar kapal tidak hanyut terbawa ombak. Maka dari itu pemerintah daerah Kabupaten Pacitan memberikan permohonan peningkatan status PPI Tamperan menjadi PPP Tamperan.” (Wawancara pada tanggal 21 April 2014, tempat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan, pukul 09.10 WIB)

Dari apa yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitantersebut, alasan dasar kenapa pentingnya PPI Tamperan untuk ditingkatkan statusnya menjadi PPP Tamperan karena masih tingginya potensi perikanan tangkap yang ada di selatan Pulau Jawa. Namun tingginya potensi perikanan tangkap tersebut tidak didukung dengan fasilitas pelabuhan yang baik dan memadai. Tidak adanya dermaga, kolam labuh, maupun tanggul penahan gelombang berakibat kurang maksimalnya pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap yang ada. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan status dari PPI Tamperan menjadi PPP Tamperan.

Sedangkan menurut Kepala UPPPP Tamperan, beliau menjelaskan sebagai berikut:

“PPP Tamperan merupakan pengembangan dari PPI Tamperan yang dulunya sudah dibangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan. Namun karena fasilitas yang sudah tidak memadai dikarenakan pembangunannya sendiri sudah begitu lama, maka segala kegiatan kepelabuhan dan perikanan jadi kurang maksimal sedangkan potensi perikanan laut disini begitu besar. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provisini Jawa Timur bersama-sama mengembangkannya. Dengan adanya PPP Tamperan, kami berharap nantinya mampu memberikan fasilitas yang

lebih memadai sehingga kegiatan perikanan disini bisa maksimal. Selain itu saya sendiri berharap bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Tamperan, berupa penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan.”(Wawancara pada tanggal 21 April 2014, tempat UPPP Tamperan Pacitan, pukul 11.00 WIB)

Dari penjelasan beliau, selain alasan dasar kenapa PPI Tamperan perlu di kembangkan menjadi PPP Tamperan diakarenakan fasilitas PPI Tamperan tidak memadai lagi, beliau juga mengharapkan kebijakan pengembangan PPI Tamperan menjadi PPP Tamperan bisa memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat nelayan Desa Tamperan. Selain memberikan manfaat berupa fasilitas yang lebih memadai, maanfaat yang lainnya bagi masyarakat Desa Tamperan adalah memberikan kesempatan kerja dan juga mamapu meningkatkan pendapatan masyarakat.

Setelah alasan dasar tentang perlunya PPI Tamperan untuk ditingkatkan statusnya menjadi PPP Tamperan, penetapan lokasi PPP Tamperan merupakan salah satu hal yang utama yang harus dilakukan dalam perencanaansebelum keputusan kebijakan pembangunan sebuah pelabuhan. Untuk menetapkan lokasi pelabuhan perikanan perlu dilakukan pengamatan dan penilaian seperti kondisi geografis dimana pelabuhan tersebut akan dibangun, sumberdaya manusia, dan akses transportasi yang mudah. Seperti yang dijelaskan dalam wawancara dengan staff Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai (UPPPP) Tamperan sebagai berikut:

“Dalam penetapan lokasi PPP Tamperan, kami dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur melakukan berbagai pengamatan dan pertimbangan. Kemudian kami memutuskan memilih Pantai Tamperan karena secara geografis Pantai Tamperan sendiri berada dalam teluk sehingga dinilai lebih aman terhadap ancaman gelombang laut selatan

yang besar, beda halnya dengan pantai-pantai di Pacitan lainnya yang langsung menghadap laut lepas, sehingga kurang aman kalau didirikan pelabuhan perikanan. Selain itu letak Pantai Tamperan sendiri berada di dekat kota sehingga akses transportasi sendiri lebih mudah, masyarakat di desa Tamperan sini juga kebanyakan adalah masyarakat nelayan. Beda halnya kalau dibangun di Kecamatan Donorojo yang jarak tempuhnya 40 Km dari kota menyebabkan hasil tangkapannilai jualnya menjadi turun. Yang terakhir dengan menggunakan *Detail Engineering Disgn (DED)* atau desain rinci pembangunan pelabuhan mas.” (Wawancara pada tanggal 21 April 2014, tempat UPPP Tamperan Pacitan, pukul 10.40 WIB)

Setelah proses pemilihan lokasi dengan mempertimbangkan berbagai aspek-aspek penilaian yang sudah dijelaskan, beliaujuga menjelaskantahap selanjutnya mengenai kebijakan yang diambil. Kebijakan penetapan lokasi, pembangunan dan peningkatan status kelas pelabuhan tertuang dalamKeputusan Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai peningkatan status PPI Tamperan menjadi PPP Tamperan. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai peningkatan status PPI Tamperan menjadi PPP Tamperan dalam wawancara sebagai berikut:

“Kebijakan penetapan peningkatan status PPI Tamperan menjadi PPP Tamperan dikeluarkanoleh Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia melalui Keputusan Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep. 48/MEN/2007 tentang Peningkatan Status Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tamperan Menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan dengan memutuskan bahwa status PPI Tamperan meningkat menjadi PPP Tamperan. Prosesnya dari bawah keatas mas, melalui usulan dari pemerintah daerah Kabupaten Pacitan dulu kemudian dilanjutkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dan terakhir ke Kementrian Kelautan dan Perikanan pada saat itu. Pada putusannya, menyerahkan tanggung jawab dan kewenangan pengelolaan serta pemanfaatannya kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan pembinaan teknis operasional terhadap PPP Tamperan dilakukan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.” (Wawancara pada tanggal 21 April 2014, tempat UPPP Tamperan Pacitan, pukul 10.40 WIB)

Dalam kebijakan penetapan pembangunan dan peningkatan status yang sebelumnya adalah PPI Tamperan yang kemudian menjadi PPP Tamperan, Menteri Kelautan dan Perikanan mengeluarkan KEPMEN Kelautan dan Perikanan Nomor 48 tahun 2007 tentang Peningkatan Status Peningkatan PPI Tamperan Menjadi PPP Tamperan. Dalam keputusannya selain meningkatkan status PPI Tamperan Pacitan menjadi PPP Tamperan Pacitan. Kedua dalam putusannya, Menteri Kelautan dan Perikanan menyerahkan tanggung jawab dan kewenangan pengelolaan serta pemanfaatannya kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Ketiga, pembinaan teknis operasional terhadap PPP Tamperan dilakukan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. Kemudian yang terakhir adalah untuk kepentingan sebagaimana dimaksud diktum ketiga, Kepala PPP Tamperan wajib menyampaikan laporan kegiatan pelabuhan perikanan setiap bulan kepada Direktur Jendral Perikanan Tangkap dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupati/ Walikota. Dengan bahan pertimbangan bahwa adanya penambahan armada kapal nelayan dengan jangkauan operasional semakin jauh, maka memerlukan pelayanan prima dengan fasilitas/sarana pendaratan yang memadai. Untuk memenuhi perkembangan dan tuntutan tersebut maka PPI Tamperan telah meningkatkan fasilitas pendukungnya, sehingga dapat ditingkatkan menjadi PPP Tamperan.

b. Aktor Pemangku Kepentingan PPP Tamperan dan Struktur

Organisasi PPP Tamperan Pacitan

PPP Tamperan Pacitan dalam melaksanakan tugas teknis tertentu di bidang pengelolaan pelabuhan perikanan pantai, pengawasan penangkapan

ikan dan pelayanan teknis kapal perikanan dijalankan oleh UPPPP Tamperan. UPPP Tamperan adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur yang berada di PPP Tamperan. Menurut apa yang disampaikan oleh staff UPPP Tamperan dalam wawancara tentang organisasi yang ada di PPP Tamperan adalah berikut:

“Untuk UPPP Tamperan adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Nomor 061.1/568/118.4/2008 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan Kabupaten Pacitanmas. Dalam surat Keputusan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur tersebut dijelaskan pula kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasinya. Sehingga kita mengacu pada Surat Keputusan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Nomor 061.1/568/118.4/2008 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan Kabupaten Pacitan.” (Wawancara pada tanggal 21 April 2014, tempat UPPP Tamperan Pacitan, pukul 10.40 WIB)

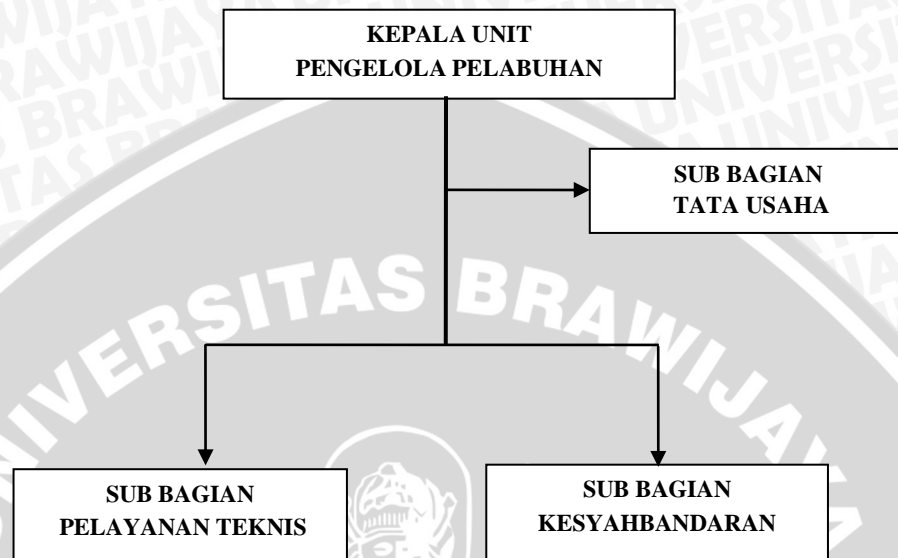
Dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Nomor 061.1/568/118.4/2008 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan Kabupaten Pacitan, dijelaskan kedudukan, tugas pokok dan fungsi dari UPPPP Tamperan yaitu:

- 1) Kedudukan Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai (UPPPP) Tamperan adalah sebagai lembaga/Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur.
- 2) Tugas pokok Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai (UPPPP) Tamperan adalah melaksanakan sebagian tugas teknis tertentu di bidang pengelolaan pelabuhan perikanan pantai, pengawasan penangkapan ikan dan pelayanan teknis kapal perikanan.

- 3) Dalam melaksanakan tugas pokok, Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai (UPPPP) Tamperan mempunyai fungsi:
- a) Pengumpulan dan penyiapan bahan serta perumusan rencana pengelolaan pelabuhan perikanan pantai.
 - b) Pelayanan teknis kapal perikanan dan kesyahbandaran.
 - c) Penyusunan rencana program penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan serta pengujian penerapan standar penangkapan ikan.
 - d) Penyusunan rencana pelaksanaan dan penyelenggaraan serta pembinaan pelayanan teknis kapal perikanan pantai.
 - e) Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi, analisa terhadap pengelolaan dan pengembangan pelabuhan perikanan dan pemasaran hasil perikanan.
 - f) Pelaksanaan koordinasi urusan keamanan ketertiban dan kebersihan kawasan pelabuhan pantai
 - g) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sarana/ prasarana serta pelayanan teknis kapal perikanan.
 - h) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk struktur organisasi, UPPP Tamperan mempunyai struktur organisasi yang ramping. UPPP Tamperan dilaksanakan oleh seorang Kepala Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai dan dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Tata Usaha, Sub Bagian Pelayanan Teknis Dan Sub

Bidang Kesyahbandaran. Struktur UPPPP Tamperan Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:



Sumber: UPPP Tamperan Pacitan, 2014

Gambar 2: Struktur Organisasi UPPPP Tamperan

Dari struktur organisasi UPPPP Tamperan yang ada di atas, mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berbeda-beda, hal tersebut di sampaikan oleh staff UPPPP Tamperan Pacitan sebagai berikut:

“Dalam kedudukannya pada struktur organisasi yang ada di UPPP Tamperan pasti mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berbeda-beda tentunya mas. Mulai dipimpin oleh Kepala UPPPP Tamperan, kemudian dibantu bagian tata usaha, bagian pelayanan teknis, sampai bagian kesyahbandaran.” (Wawancara pada tanggal 21 April 2014, tempat UPPP Tamperan Pacitan, pukul 10.40 WIB)

Pembagian tugas pokok pada UPPPP Tamperan sesuai dengan struktur organisasi yang ada. Tujuannya untuk lebih memudahkan pelaksanaan kegiatan pada setiap harinya, yang pada akhirnya mampu memberikan pelayanan yang baik bagi para pengguna jasa UPPPP Tamperan. Sehingga keberadaan UPPPP Tamperan benar-benar mampu memberikan manfaat yang

besar khususnya bagi nelayan. Pembagian tugas pokok UPPPP Tamperan terdiri atas dari:

- 1) Kepala Unit, mempunyai tugas memimpin seluruh kegiatan operasional di UPPPP, melaksanakan koordinasi dengan pihak lain yang terkait meliputi instansi pemerintah, swasta maupun perorangan, mengawasi dan mengendalikan pengelolaan pelabuhan perikanan pantai, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat.
- 2) Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas:
 - Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga dan kearsipan.
 - Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
 - Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
 - Melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor.
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala pelabuhan.
- 3) Sub Bagian Pelayanan Teknis, mempunyai tugas:
 - Melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan perencanaan pengembangan dan pelayanan jasa serta pemeliharannya.
 - Melaksanakan penyusunan dan penyiapan rencana program pelaksanaan penyelenggaraan keamanan serta koordinasi pemanfaatan sarana pelabuhan.

- Melaksanakan penyusunan rencana pelaksanaan dan penyelenggaraan ketertiban dan kebersihan lingkungan kawasan pelabuhan perikanan.
 - Menyusun penyusunan dan penyiapan rencana program pelaksanaan koordinasi pengawasan mutu hasil perikanan.
 - Melaksanakan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta evaluasi terhadap penggunaan jasa pelabuhan perikanan.
 - Melaksanakan penyusunan laporan hasil penyelenggaraan pelayanan teknis
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala pelabuhan.
- 4) Sub Bagian Kesyahbandaran, mempunyai tugas:
- Melaksanakan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana keselamatan pelayaran.
 - Melaksanakan pengawasan penggunaan sarana dan prasarana keselamatan pelayaran.
 - Melaksanakan pelayanan keselamatan pelayaran.
 - Melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap pelayanan keselamatan pelayaran.
 - Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data kesyahbandaran.
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala pelabuhan.

Untuk mendukung kegiatan sehari-hari, UPPP Tamperan Pacitan didukung dengan tenaga pegawai/karyawan yang terbagi di setiap sub bagian yang ada dan sesuai dengan struktur organisasi serta tugas pokok dan fungsinya. Menurut penuturan yang disampaikan oleh Kepala UPPPP Tamperan adalah sebagai berikut:

“UPPPP Tamperan dalam melaksanakan tugas kesehariannya dipimpin oleh Kepala UPPPP Tamperan dan dibantu oleh 9 (sembilan) orang pegawai/karyawan. Ada 3 (tiga) pegawai/karyawan dengan status pegawai tetap, kemudian 5 (lima) pegawai/karyawan yang ada di UPPPP Tamperan ini yang statusnya masih kontrak, dan 2 (dua) pegawai yang masih berstatus sukwan.” (Wawancara pada tanggal 21 April 2014, tempat UPPP Tamperan Pacitan, pukul 11.00 WIB)

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari UPPPP Tamperan dilaksanakan dan dipimpin oleh seorang Kepala UPPPP dan dibantu oleh 9 (sembilan) orang pegawai/karyawan. Baik itu mulai dari pegawai/karyawan dengan status tetap, kontrak ataupun sukwan. Tabel dibawah ini merupakan daftar pegawai/karyawan yang bekerja di UPPPP Tamperan sebagai berikut:

Tabel 3
Daftar Pegawai/ Karyawan UPPPP Tamperan

No.	Nama/Nip	Jabatan/ Tugas	Pangkat/Golongan	Pendidikan
1.	Moh.Imam Subekti, S.Pi NIP. 19680226 200604 1 005	Kepala Unit	PenataMudaTk.I (III/ b)	Sarjana Perikanan
2.	Choirul Huda, S.Pi NIP. 19700807 200604 1 006	Kasubag. Pelayanan Teknis	PenataMudaTk.I (III/ b)	Sarjana Perikanan
3.	Salim,S.Pi Nip.19761027 201101 1 004	Staff	Penata Muda (III/a)	Sarjana Perikanan
4.	Fransisco Januar Guneliyanto, A.Md.Pi	Staff	Kontrak	Diploma IV Perikanan
5.	Tulik Hadi Prasetya	Staff	Kontrak	STM
6.	Kabul Pamuji	Staff	Kontrak	MAN
7.	Tofan Sutrisno	Staff	Kontrak	SMU
8.	Vika Cristiana	Staff	Kontrak	SMEA
9.	Pradewa Yunian Griswandi,A.Md.Pi	Staff	Sukwan	Diploma III Perikanan
10.	Ahmad Alimudin	Staf	Sukwan	SMU

Sumber: UPPPP Tamperan, 2014

Dari data tabel yang ada di atas, terdapat 10 (sepuluh) pegawai/karyawan yang bertugas di UPPPP Tamperan. Terdapat 3 (tiga) pegawai/karyawan dengan status pegawai tetap, yakni Kepala UPPPP Tamperan, Kasubag Pelayanan Teknis, dan seorang staff. Sedangkan terdapat 5 (lima) pegawai/karyawan dengan status kontrak yakni di bagian staff dan 2 (dua) orang sukwan di bagian staff juga.

2. Dampak Kehidupan Sosial Masyarakat Peisir Sekitar

Perubahan yang terjadi pada masyarakat Kabupaten Pacitan yang mengalami proses pembangunan PPP Tamperan, merupakan suatu gejala wajar jika dilihat dari arti pembangunan yang merupakan usaha sadar, terencana dan terus menerus yang dilakukan oleh suatu bangsa, negara, dan

pemerintah menuju modernitas untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pemanfaatan yang dimiliki. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan kemudian didukung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dalam pengembangan PPI Tamperan menjadi PPP Tamperan dari tahun 2003 sampai 2007 terbukti memberikan perubahan yang berarti terhadap masyarakat pesisir sekitar PPP Tamperan setelahnya. Dalam hal ini memberikan dampak sosial masyarakat pesisir sekitar. Perubahan sosial merupakan segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya termasuk di dalamnya nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam penelitian ini perubahan sosial pada masyarakat pesisir sekitar PPP Tamperan terjadi apabila terdapat perbedaan pandangan masyarakat terhadap PPP Tamperan. Dampak sosial yang terjadi di tengah masyarakat pesisir PPP Tamperan sebagai berikut:

a. Presepsi Masyarakat

Dalam penilaian ini perubahan presepsi pada masyarakat Kabupaten Pacitan khususnya masyarakat pesisir sekitar PPP Tamperan terjadi apabila terdapat perbedaan pandangan masyarakat terhadap adanya PPP Tamperan dan perubahan pandangan tersebut dapat mengarah pada arah yang positif atau negatif.

Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode wawancara terhadap masyarakat pesisir sekitar PPP Tamperan, maka diperoleh data yang menyatakan bahwa terjadi perubahan presepsi yang mengarah pada arah

positif. Masyarakat pesisir sekitar PPP Tamperan mengalami perubahan kearah yang baik dengan adanya PPP Tamperan saat ini. Seperti yang di ungkapkan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan sebagai berikut:

“Kalau menurut penilaian saya antara sesudah dan sebelum adanya kebijakan pengembangan PPI Tamperan menjadi PPP Tamperan perbedaannya sangat jauh. Pertama, nelayan kita tentunya lebih terfasilitasi dengan fasilitas yang lebih baik daripada yang dulu. Hasil tangkapan melautnyapun juga ikut bertambah, berarti bertambah juga penghasilan mereka. Kedua, sekarangkan dapat dilihat kondisi lingkungan Desa Tamperan lebih ramai dibandingkan yang dulu, dan secara tidak langsung juga memberikan pengaruh bagi masyarakat sekitar sana. Masyarakat juga bisa memanfaatkan peluang dari adanya PPP Tamperan dengan membuka berbagai macam usaha, kehidupan perekonomian mereka tentunya juga ikut berubah. Namun semuanya itu tentunya mempunyai nilai positif dan negatifnya juga.” (Wawancara pada tanggal 21 April 2014, tempat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan, pukul 09.10 WIB)

Selain wawancara yang peneliti lakukan dengan perwakilan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan, peneliti juga melakukan wawancara dengan warga Desa Tamperan salah satunya adalah dengan Bapak Ms selaku ketua RW 09 Desa Tamperan sebagai berikut:

“Kami bersyukur mas, berterima kasih pada pemerintah karena dengan adanya PPP Tamperan sekarang ini, warga saya dari Desa Tamperan sini banyak yang bekerja di PPP Tamperan. Ada yang menjadi kuli bongkar muat hasil tangkapan, ada yang jadi petugas kebersihan, berjualan warung nasi, hingga jadi penjual ikan hasil tangkapan. Karena dulu warga kami itu hanya bekerja menjadi nelayan saja.” (Wawancara pada tanggal 22 April 2014, tempat kediaman Bapak Ms, pukul 09.10 WIB)

Persepsi serupa juga disampaikan oleh Ibu Dw sebagai pemilik warung nasi di dalam kawasan PPP Tamperan, sebagai berikut:

“Ya saya senang mas sekarang ada pelabuhan seperti ini. Dulu kan sebelum di bangun disini sepi mas, sekarang lebih ramai jadi jualan saya lebih laku sampai terkadang saya jualan sampai jam 9 (sembilan) malam

kalau sedang musim ikan.” (Wawancara pada tanggal 22 April 2014, tempat PPP Tamperan, pukul 09.50 WIB)

Selain itu persepsi masyarakat muncul juga karena disebabkan karena terjadi perbedaan fasilitas yang disediakan. Hal ini disampaikan oleh Bapak St selaku nelayan lokal yang sudah 30 tahun bekerja sebagai nelayan dan tinggal di Desa Tamperan sebagai berikut:

“Tentunya saya merasa senang mas, yang pertama sekarang di desa kami lebih ramai, yang kedua memberikan penghasilan bagi masyarakat Desa Tamperan sini. Untuk saya sendiri, saya lebih mudah untuk menyandarkan kapal kalau sudah selesai melaut cukup menurunkan jangkar saja. Dulu kan harus minta tolong sama orang-orang yang ada untuk menarik kapal ke daratan.” (Wawancara pada tanggal 22 April 2014, tempat PPP Tamperan, pukul 10.00 WIB)

Persepsi serupa mengenai adanya perubahan fasilitas juga disampaikan nelayan lokal yang lainnya, yaitu Bapak AG sebagai berikut:

“Menurut saya ya mas, sekarang lebih baik dan mudah dibandingkan dengan yang dulu. Dulu itu kan kapal harus ditarik ke daratan supaya tidak terkena gelombang laut. Kalau sekarang kan lebih aman mas, karena sudah ada tanggul penahan gelombangnya kapal saya tinggal di ikatkan ke dermaga seperti ini sama di turunkan jangkarnya.” (Wawancara pada tanggal 22 April 2014, tempat PPP Tamperan, pukul 10.15 WIB)

Selain perubahan persepsi dari nelayan lokal seperti yang disampaikan oleh Bapak St dan Bapak AG, persepsi yang sama mengenai adanya perbedaan fasilitas disampaikan oleh Bapak Sk sebagai berikut:

“Kalau dulu itu kan pelabuhannya cuman kecil sekali mas, sedangkan sekarang kan lebih bagus, fasilitasnya juga lebih baik mas. Jadi kalau mau melaut itu lebih gampang mas, ombaknya kecil lebih kecil karena terhalang tanggul penahan gelombang itu mas. Kalau dulu itu kan waktu mau melaut harus mendorong kapal melawan ombak.” (Wawancara pada tanggal 22 April 2014, tempat PPP Tamperan, pukul 10.40 WIB)

Dari hasil wawancara mengenai persepsi masyarakat terhadap adanya pembangunan atau pengembangan dari PPP Tamperan sendiri lebih mengarah pada perubahan persepsi yang positif atau baik. Dikarenakan masyarakat Desa Tamperan sendiri merasa ada perubahan pada daerahnya yang dulunya sepi sekarang menjadi lebih ramai. Selain itu menurut masyarakat Desa Tamperan sendiri yang berprofesi sebagai nelayan, adanya PPP Tamperan mempermudah nelayan dalam melakukan aktifitas sebelum ataupun sesudah melaut dibandingkan dulu sebelum adanya PPP Tamperan yang mana nelayan harus mengeluarkan tenaga ataupun biaya lebih.

b. Interaksi Sosial

Perubahan interaksi sosial dalam penelitian ini adalah apabila terdapat perubahan interaksi sosial dalam masyarakat dalam menjelaskan aktifitas berjualan. Dari hasil penelitian terhadap pola interaksi mereka, maka dapat diketahui bahwa terjadi perubahan interaksi sosial pada masyarakat. Pernyataan ini diperkuat oleh Ibu Mmseorang pedagang ikan yang sudah berjualan ikan selama 20 (duapuluh) tahun sebagai berikut:

“Kalau dulu sebelum ada PPP Tamperan ini kan saya berjualan ikan sampai keluar kecamatan mas berjualan dari rumah ke rumah memakai sepeda motor, sekarang saya cukup beli ikan dari pengepul ikan kemudian saya jual kembali di TPI PPP Tamperan sini sudah banyak yang datang ke saya.” (Wawancara pada tanggal 23 April 2014, tempat PPP Tamperan, pukul 08.16 WIB)

Pernyataan hampir serupa juga muncul dari keterangan BapakDW yang sama-sama berprofesi sebagai penjual ikan sebagai berikut:

“Saya dulu menjual ikan dari rumah ke rumah di sekitaran kota sini mas, kalau sekarang saya berjualan di PPP Tamperan siang atau sore biasanya sudah laku terjual semuanya. Biasanya pembelinya dari pengunjung

atau pemilik warung makan itu mas.” (Wawancara pada tanggal 23 April 2014, tempat PPP Tamperan, pukul 08.35 WIB)

Selain pernyataan dari Ibu Mm dan Bapak DW yang sama-sama berprofesi sebagai penjual ikan di kawasan PPP Tamperan, pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Wn yang juga berprofesi sebagai penjual ikan sebagai berikut:

“Semenjak dibangunnya pelabuhan ini sama pemerintah mas saya jadi lebih terbantu, karena kalau dulu saya menjual ikan hasil melaut suami saya seperti ini harus sampai kepasar mas kalau belum habis saya keliling-keliling sekitar kota mas supaya capet terjual, karena kalau kelamaan di es jadi jelek ikannya mas banyak orang yang tidak mau. Sedangkan sekarang ini saya berjualannya di pelabuhan sini saja dari pagi sehabis suami saya pulang dari laut sampai jam 10.00 WIB, karena kalau pagi itu sudah banyak pedagang ikan dari pasar yang beli kesini mas. Lebih mudah lah mas dagangan saya cepat lakunya.” (Wawancara pada tanggal 23 April 2014, tempat PPP Tamperan, pukul 07.15 WIB)

Selain interaksi sosial yang terjadi di lokasi PPP Tamperan, interaksi sosial juga terjadi di lingkungan masyarakat Desa Tamperan. Perubahan interaksi sosial di lingkungan masyarakat Desa Tamperan terjadi antara warga lokal dengan nelayan andon yang tinggal berdekatan. Nelayan andon yang ada di PPP Tamperan tinggal di Desa Tamperan dengan menyewa rumah atau memondok di rumah warga Desa Tamperan. Pernyataan berikut disampaikan oleh BapakMs selaku ketua RW 09 Desa Tamperan sebagai berikut:

“Kalau interaksi sosial antara masyarakat atau warga Desa Tamperan dengan nelayan andon sebenarnya berjalan baik mas. Karena nelayan andon tinggal menyewa rumah atau memondok di rumah-rumah warga Desa Tamperan. Namun kebiasaan mereka setelah pulang dari melaut sekian hari di tengah laut, mereka suka minum-minuman keras mas bersama kelompoknya. Hal ini yang saya khawatirkan sebenarnya mas, karena sudah pernah terjadi berkali-kali terjadi keributan antara warga lokal Desa Tamperan dengan nelayan andon mas. Mereka minum-minuman seperti itu sampai tengah malam jadi mengganggu keamanan

dan ketertiban lingkungan.” (Wawancara pada tanggal 22 April 2014, tempat kediaman Bapal Miseni, pukul 09.10 WIB)

Pernyataan yang hampir sama mengenai interaksi sosial antara nelayan andon dengan warga Desa Tamperan juga disampaikan oleh Bapak AHKetua RT 01 RW 09 Desa Tamperan:

“Nelayan andon yang datang dari berbagai daerah itu kan menyewa rumah atau indekos mas dirumah-rumah warga itu. Mereka biasanya suka minum-minuman keras yang kemudian akhirnya membuat kekacauan berkelahi dengan warga sekitar sini mas. Kejadian seperti itu masih ada sampai sekarang meskipun tidak sesering dulu. Mungkin masyarakat dulunya belum terbiasa dengan yang seperti itu.” (Wawancara pada tanggal 23 April 2014, tempat rumah Ketua RT 01, pukul 15.40 WIB)

Pernyataan yang hampir sama mengenai interaksi sosial antara nelayan andon dengan warga sekitar PPP Tamperan juga disampaikan oleh Bapak Sp Ketua RT 02 RW 09 Desa Tamperan sebagai berikut:

“Pernah ada mas nelayan andon itu ketika pulang setelah melaut selama 15 hari minum-minuman keras bersama teman-temannya sesama nelayan andon mengajak dan mengajari pemuda-pemuda dibawah umur di RT saya untuk minum-minuman keras seperti itu. Seperti itu kan jelas-jelas sangat meresahkan.” (Wawancara pada tanggal 23 April 2014, tempat rumah Ketua RT 02, pukul 16.15 WIB)

Pernyataan dari ketiga perwakilan warga Desa Tamperan yang juga sebagai ketua RW 09 dan ketua RT 01 dan RT 02 mengenai interaksi sosial antara masyarakat Desa Tamperan dengan nelayan andon juga dibenarkan oleh kepala UPPPP Tamperan sebagai berikut:

“Memang benar kejadian seperti minum-minuman keras oleh nelayan andon yang terkadang berujung pada perkelahian dengan warga. Namun kejadian seperti itu sudah tidak sesering dulu lagi. Sekarang sudah lebih dapat terjaga dan kondusif lagi.” (Wawancara pada tanggal 24 April 2014, tempat PPP Tamperan, pukul 10.15 WIB)

Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan masyarakat pesisir sekitar Desa Tamperan, dapat disimpulkan dengan adanya pembangunan dan peningkatan status PPP Tamperan yang akan mengakibatkan banyaknya masyarakat dari luar wilayah pesisir Desa Tamperan yang datang baik dalam tujuan jual beli maupun seperti nelayan andon akan mempengaruhi interaksi sosial masyarakat pesisir sekitar. Dalam hal ini perubahannya mengarah pada segi positif dan juga negatif.

3. Dampak Kehidupan Ekonomi Masyarakat Pesisir Sekitar

Perikanan tangkap merupakan sektor potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu penggerak utama pembangunan dibidang perekonomian. Adanya kebijakan pemerintah dalam pengembangan dan peningkatan status PPP Tamperan sebagai fasilitas bagi nelayan untuk mendukung kegiatan perikanan maupun usaha lain yang ada di sekitar lokasi PPP Tamperan, menimbulkan dampak terhadap perubahan perekonomian masyarakat sekitar PPP Tamperan. Dampak yang ditimbulkan yaitu sebagai berikut:

a. Penyerapan Tenaga Kerja

Pengembangan dan peningkatan status PPI Tamperan menjadi PPP Tamperan, memberikan kesempatan kerja khususnya bagi masyarakat pesisir sekitar Desa Tamperan. Berdasarkan data primer dan sekunder yang diperoleh selama melakukan penelitian, diketahui bahwa masyarakat pesisir sekitar PPP Tamperan mendirikan berbagai usaha. Untuk mengetahui usaha

masyarakat yang ada di lokasi wisata dan penyerapan tenaga kerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4
Jenis Usaha di lokasi PPP Tamperan Desa Tamperan
Kabupaten Pacitan

No.	Jenis Usaha	Jumlah (buah)
1.	Rumah Makan/ Warung Makan	20
2.	Cafe	1
3.	Kios	8
4.	Pemondokan	68

Sumber: data diolah, 2014

Melalui kebijakan Pemerintah Daerah yang dibantu oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, memberikan kesempatan pada masyarakat untuk membuka berbagai macam usaha yang secara tidak langsung juga memberikan kesempatan bagi masyarakat sekitar lokasi PPP Tamperan. Berdasarkan tabel diatas, usaha yang dilakukan masyarakat di lokasi PPP Tamperan yaitu rumah makan/warung makan 20 buah, *cafe* 1 buah, kios 8 buah, dan pemondokan 68 buah. Dari berbagai macam usaha utamanya rumah makan/warung makan dan kios tersebut tentunya menyerap sejumlah tenaga kerja yang kebanyakan juga adalah warga sekitar. Mulai dari suami atau istri, anak, saudara, bahkan tetangga dari pemilik usaha yang merupakan penduduk Desa Tamperan setempat.

Pada tabel diatas pekerjaan atau jenis usaha yang paling banyak yaitu perdagangan dan jasa. Dampak positif bagi masyarakat sekitar tersebut disampaikan oleh Ibu Nn selaku pemilik usaha Rumah Makan Simpang Tiga di sekitar lokasi PPP Tamperan sebagai berikut:

“Ya senanglah mas rasanya. Saya bisa membuka usaha rumah makan yang awalnya masih kecil-kecilan terus berkembang sampai seperti ini. Saya juga bisa memberikan pekerjaan buat saudara-saudara saya sendiri, bersyukurlah mas saya dengan adanya PPP Tamperan sampai sekarang ini.” (Wawancara pada tanggal 22 April 2014, di lokasi sekitar PPP Tamperan, pukul 13.05 WIB)

Tidak hanya itu saja, seperti yang dijelaskan oleh Ibu An yang mempunyai usaha warung nasi di dalam lokasi PPP Tameran”

“Kalau saya sudah berjualan warung makan seperti ini sudah lama mas, tapi saya dulu jualan diluar lokasi PPP Tamperan mas terus setelah PPP Tamperan ini selesai dibangun saya berpindah menyewa kios ini untuk berjualan. Saya juga berjualan dibantu sama tetangga saya yang warga Desa Tamperan.” (Wawancara pada tanggal 22 April 2014, di lokasi sekitar PPP Tamperan, pukul 13.25 WIB)

Penjelasan serupa juga disampaikan oleh pemilik kios yang membuka usahanya di sekitar lokasi PPP Tamperan, yaitu oleh Bapak Hr sebagai berikut:

“Dulu saya tidak mempunyai pekerjaan mas, mulai adanya pelabuhan ini kemudian pemerintah juga menyewakan kios-kiosnya ini saya coba-coba buka usaha berjualan rokok dan minuman kecil-kecilan seperti ini. Saya juga berterimakasih sama pemerintah karena sudah dibolehkan untuk menyewa kiosnya.” (Wawancara pada tanggal 22 April 2014, di lokasi sekitar PPP Tamperan, pukul 16.25 WIB)

Selain usaha dalam bentuk berjualan atau berdagang, dampak positif yang dirasakan oleh warga Desa Tamperan dari kebijakan pembangunan dan peningkatan status dari PPI Tamperan menjadi PPP Tamperan juga dirasakan oleh warga yang memiliki usaha pemondokan salah satu pemiliknya adalah Ibu Ht sebagai berikut:

“Usaha pemondokan saya ini masih terhitung baru mas, sejak pemerintah membangun pelabuhan di Pantai Tamperan banyak nelayan andon yang datang. Karena mereka butuh tempat untuk tinggal saya memanfaatkan untuk membangun pemondokan seperti ini. Daripada saya menganggur hanya bergantung dari pekerjaan suami saya mas, lebih baik saya usaha

seperti ini.” (Wawancara pada tanggal 22 April 2014, di kediaman Ibu Haryani, pukul 12.15 WIB)

Bentuk usaha penyedia jasa selain dalam bentuk pemondokan, di lokasi PPP Tamperan juga terdapat usaha dalam bentuk pemanol. Salah satu pemanol yang peneliti berhasil wawancarai adalah Bapak SI sebagai berikut:

“Saya dulunya bekerja sebagai nelayan mas, hampir sama dengan bapak-bapak yang lainnya juga yang dulunya juga bekerja sebagai nelayan. Saya memilih bekerja sebagai pemanol karena kondisi kesehatan saya yang sudah tidak bisa untuk melaut lagi, karena saya mempunyai anak yang masih sekolah daripada saya jauh-jauh bekerja ditempat lain saya memilih bekerja di pelabuhan saja mas jadi pemanol seperti ini.” (Wawancara pada tanggal 22 April 2014, di lokasi PPP Tamperan, pukul 06.15 WIB)

Selain dari hasil wawancara peneliti juga mendapatkan data sekunder dari penelitian yang dilakukan. Penyerapan tenaga kerja juga ada pada sektor jasa. Bentuk usaha jasa di PPP Tamperan sendiri di kelola dalam kelompok Koperasi Unit Desa (KUD) Mina Pacitan. Berikut ini adalah data tabel penyerapan tenaga kerja.

Tabel 5
Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Jasa
di lokasi PPP Tamperan

No.	Bentuk Jasa	Jumlah
1.	Pemanol (Kuli Angkut)	35 orang
2.	Bongkar Muat Kapal	25 orang
3.	Keamanan TPI	5 orang

Sumber: UPTPPP Tamperan, 2014

Data yang ada pada tabel di atas menunjukkan bahwa ada sejumlah 65 orang yang bekerja sebagai pemanol, bongkar muat dan keamanan di lokasi PPP Tamperan. Itu hanya sebagian dari data yang ikut tergabung dalam KUD Mina Pacitan, sebab menurut pengamatan yang dilakukan oleh peneliti masih

banyak lagi jumlah tenaga kerja di sektor jasa yang bekerja di lokasi PPP Tampean yang tidak masuk atau tergabung dalam KUD Mina Pacitan.

Dari hasil wawancara dan data sekunder yang peneliti dapatkan tersebut, menyatakan bahwa pembangunan dan peningkatan status PPP Tampean memberikan kesempatan kerja yang cukup banyak. Hal ini dapat dilihat dan dirasakan seperti adanya pekerjaan sebagai pedagang dan jasa.

b. Tingkat Pendapatan Masyarakat Pesisir Sekitar

Kebijakan pengembangan dan peningkatan status PPI Tamperan menjadi PPP Tamperan di Desa Tamperan telah memberikan kesempatan pada masyarakat untuk membuka usaha di lokasi PPP Tamperan. Adapun kesempatan kerja yang dapat diciptakan misalnya rumah/warung makan, kios, *cafe*, dan pemondokan. Dengan membuka usaha di sekitar lokasi PPP Tamperan, masyarakat pesisir sekitar dapat meningkatkan pendapatannya. Menurut hasil wawancara yang peneliti lakukan, diketahui pendapatan masyarakat yang bekerja disekitar lokasi PPP Tamperan. Berikut ini adalah hasil wawancara peneliti dengan Ibu Su sebagai penjual ikan di lokasi PPP Tamperan:

“Penghasilan saya berjualan ikan kecil-kecilan seperti ini biasanya sehari dapat untung yang lumayan mas. Ada sehari itu dapat keuntungan bersih Rp. 100.000,-. Kalau lagi musim ikan misalnya ikan teri, layur, kakap atau yang lainnya bisa lebih.” (Wawancara pada tanggal 22 April 2014, di lokasi sekitar PPP Tamperan, pukul 07.15 WIB)

Sedangkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Bb sebagai petugas bagian perlengkapan di TPI PPP Tamperan, sebagai berikut:

“Saya bekerja sebagai petugas di TPI PPP Tamperan ini sudah lama mulai PPP ini dibangun. Kalo penghasilan yang saya dapat sebulan itu

Rp. 1.000.000,- mas, sesuai dengan UMK Kabupaten Pacitan. Ya meskipun tidak banyak, setidaknya bisa untuk menambah penghasilan keluarga daripada saya menganggur setelah berhenti tidak menjadi nelayan lagi.” (Wawancara pada tanggal 22 April 2014, di lokasi sekitar PPP Tamperan, pukul 07.55 WIB)

Selain melakukan wawancara dengan penjual ikan dan petugas TPI PPP Tamperan, peneliti juga melakukan wawancara dengan pemilik rumah makan yang berjualan di sekitar lokasi PPP Tamperan. Menurut Ibu SM pemilik rumah makan sebagai berikut:

“Kalau hari-hari biasa untungnya bisa dapat Rp. 700.000,- sampai Rp. 1.000.000,- dek, tapi kalau hari sabtu atau minggu untungnya bisa lebih, terkadang bisa dapat sampai Rp. 2.000.000,- juga. Ya alhamdulillah buat menyekolahkan anak saya.” (Wawancara pada tanggal 22 April 2014, di lokasi sekitar PPP Tamperan, pukul 11.00 WIB)

Wawancara berlanjut kepada salah satu pemilik usaha jasa pemondokan beliau adalah Ibu Si, berikut ini hasil wawancara dengan Ibu Hr:

“Penghasilan yang saya dapat perbulannya Rp. 250.000,- mas, disini kan ada 5 kamar dan semuanya juga sudah disewa. Tapi nelayan andon yang ada dipemondokan saya biasanya bayar dua bulan sekali karena kan mereka lebih sering dilaut daripada di kamar. Kadang-kadang saya juga di kasih ikan 2-3 ekor ikan mas.” (Wawancara pada tanggal 22 April 2014, di kediaman Ibu Hartanti, pukul 12.15 WIB)

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara dengan salah seorang pemanol yang ada di lokasi PPP Tamperan yaitu Bapak Sl sebagai berikut:

“Kalau penghasilan saya dapatnya perhari mas, sehari itu saya biasa dapat Rp. 300.0000, - dari pemilik kapal. Kadang juga suka dikasih ikan mas sama anak buah kapalnya kalo hasilnya lebih. Ya lumayan lah mas kalo buat mencukupi kebutuhan keluarga saya sehari-harinya.” (Wawancara pada tanggal 22 April 2014, di lokasi PPP Tamperan, pukul 06.15 WIB)

Selain melakukan wawancara dengan Ibu Su, Ibu SM, Ibu Hr, dan Bapak Sl, peneliti juga mewawancarai salah seorang pemilik usaha kios yaitu Bapak Heru yang berada di lokasi PPP Tamperan sebagai berikut:

“Ya alhamdulillah mas biasanya sehari itu keuntungan bersihnya Rp. 150.000,- . Kalau lagi ramai ya juga bisa dapat lebih dari itu. Tetapi saya sudah bersyukur ko mas yang penting bisa untuk isrti sama anak saya dirumah.” (Wawancara pada tanggal 22 April 2014, di lokasi sekitar PPP Tamperan, pukul 16.25 WIB)

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa dengan adanya pembangunan dan peningkatan status PPP Tamperan di Desa Tamperan ini dapat memberikan dampak ekonomi yang positif yaitu meningkatkan pendapatan bagi masyarakat sekitar Desa Tamperan.

C. Pembahasan

1. Kebijakan Pembangunan PPP Tamperan

Dari data yang disajikan, diketahui potensi lestari sumberdaya perikanan laut di Kabupaten Pacitan perlu dimanfaatkan dan dikembangkan menjadi lebih baik. Upaya pemanfaatan dan pengembangan potensi lestari sumberdaya perikanan laut yang ada di perairan laut selatan Kabupaten Pacitan masih belum berjalan maksimal dikarenakan kondisi PPI Tamperan yang dibangun pada tahun 1977 itu sudah tidak layak lagi digunakan untuk kegiatan perikanan. Selain itu bertambahnya jumlah armada kapal yang ada dengan jangkauan operasional yang lebih jauh juga perlu adanya fasilitas yang mendukung kegiatan operasional. Namun pada realitanya banyak

fasilitas yang harus diperbaiki dan dikembangkan agar supaya bisa mendukung segala aktifitas pemanfaatan perikanan.

Untuk pengembangan fasilitas dan peningkatan status kepelabuhan diperlukan kebijakan dari pemerintah, baik itu dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. Kebijakan senantiasa berorientasi kepada masalah (*problem-oriented*). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang membuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Menindak lanjuti permasalahan yang terjadi di lapangan, Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan kemudian mengirimkan surat permohonan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya nanti diteruskan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, agar supaya PPI Tamperan bisa di kembangkan menjadi PPP Tamperan. Melihat dan menimbang permasalahan yang ada di lapangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia pada tanggal 28 Desember 2007 akhirnya mengeluarkan sebuah kebijakan yang menjadi dasar peningkatan status PPI Tamperan menjadi PPP Tamperan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.48/MEN/2007 Tentang Peningkatan Status Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tamperan Menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan. Memutuskan untuk meningkatkan status PPI tamperan menjadi PPP Tamperan, kemudian menyerahkan tanggung jawab dan kewenangan pengelolaan serta pemanfaatannya kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa

Timur, selanjutnya pembinaan fokus terhadap PPP Tamperan dilakukan oleh Direktur Jendral Perikanan Tangkap, dan yang terakhir adalah untuk kepentingan sebagaimana dimaksud diktum ketiga Kepala PPP Tamperan wajib menyampaikan laporan kegiatan pelabuhan perikanan setiap bulan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota. Kebijakan tersebut bertujuan agar tersedianya fasilitas kepelabuhan yang lebih memadai sehingga dapat mendukung operasional dan kegiatan pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan laut di Kabupaten Pacitan.

Karena terbatasnya APBD Pemerintah Kabupaten Pacitan, maka kebijakan pembangunan dan peningkatan status PPI Tamperan menjadi PPP Tamperan menggunakan dana dari APBN (dekosentrasi), DAK Non DR, APBD Provinsi Jawa Timur dan APBD Kabupaten Pacitan. Harapan Pemerintah Kabupaten Pacitan dengan adanya PPP Tamperan adalah memberikan dampak positif bagi masyarakat pesisir sekitar baik sosial maupun ekonomi.

a. Penetapan Lokasi dan Peningkatan Status PPP Tamperan

Pelabuhan perikanan yang dipergunakan untuk kegiatan sistem bisnis perikanan digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Sebuah pelabuhan perikanan dapat dinaikkan kelas atau status kepelabuhannya diperlukan adanya pembangunan atau pengembangan pelabuhan. Namun sebelum dikeluarkannya kebijakan

tentang peningkatan status sebuah pelabuhan, perlu adanya pengamatan dan pertimbangan kelayakan lokasi, karena lokasi sebuah pelabuhan juga sangat berpengaruh. Pengamatan dan pertimbangan kelayakan lokasi diperlukan untuk mengetahui lokasi yang layak dan memberikan pengaruh positif bagi daerah sekitarnya. Hal tersebut diperkuat dalam Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pelabuhan Perikanan pasal 11, menjelaskan perencanaan pembangunan pelabuhan perikanan yang merupakan bagian dari penilaian kelayakan dalam pemilihan lokasi pembangunan pelabuhan perikanan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari lokasi penelitian yang telah dijelaskan pada bagian sub pembahasan penetapan lokasi dan peningkatan status PPP Tamperan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur telah melakukan penelitian atau uji kelayakan dalam pemilihan lokasi PPP Tamperan berdasarkan teori maupun peraturan yang telah mengatur tentang perencanaan pembangunan pelabuhan perikanan. Dimulai dari hidrooseanografi, dimana pembangunan PPP Tamperan berada di dalam Pantai Teluk Pacitan yang aman dan bebas dari tingginya gelombang perairan selatan Laut Jawa. Posisi PPP Tamperan terlindungi oleh perbukitan kapur yang cukup tinggi, sehingga gelombang yang masuk kedalam teluk tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan pantai terbuka.

Selanjutnya kelayakan aksesibilitas, dimana lokasi PPP Tamperan berada di dekat Jalur Lintas Selatan (JLS) Pacitan menuju arah Surakarta dan Yogyakarta. Selain itu letak Teluk Pacitan yang dekat dengan pusat kota

sekitar 3 Km memudahkan hasil laut di kirim ke kota ataupun keluar kota seperti Solo, Jogja, dan Surabaya. Kemudian yang terakhir adalah studi kelayakan dan daerah pengaruh, dimana PPP Tamperan dibangun di Desa Tamperan yang mana Desa Tamperan adalah daerah pesisir di Teluk Pantai Pacitan dan kebanyakan masyarakatnya adalah nelayan. Adanya sumberdaya manusia yang merupakan masyarakat nelayan juga di imbangi dengan potensi lestari sumberdaya perikanan laut yang masih tinggi. Diperkirakan potensi lestari sumberdaya perikanan laut yang ada di Kabupaten Pacitan sebesar 36.000 Ton per tahunnya.

Karena dinilai layak dan bisa memberikan dampak yang positif bagi lingkungan sekitarnya, maka dalam kebijakan peningkatan status PPI menjadi PPP di Kabupaten Pacitan dipilihlah lokasi PPI Tamperan untuk dikembangkan menjadi PPP Tamperan melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.48/MEN/2007 Tentang Peningkatan Status Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tamperan Menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan.

b. Aktor Pemangku Kebijakan Pelabuhan dan Struktur Organisasi PPP Tamperan Pacitan

Untuk melaksanakan tugas teknis tertentu di bidang pengelolaan pelabuhan perikanan pantai, pengawasan penangkapan ikan dan pelayanan teknis kapal perikanan di PPP Tamperan, tentunya dibutuhkan pembentukan sebuah organisasi yang mempunyai kewenangan dalam membuat kebijakan.

Untuk pengelola kepentingan di PPP Tamperan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Nomor 061.1/568/118.4/2008 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan Kabupaten Pacitan. Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Tamperan adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur yang berada di PPP Tamperan. Dari hasil data yang disajikan, tugas pokok UPPPP Tamperan adalah melaksanakan sebagian tugas teknis tertentu di bidang pengelolaan pelabuhan perikanan pantai, pengawasan penangkapan ikan dan pelayanan teknis kapal perikanan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai (UPPPP) Tamperan mempunyai fungsi:

- a) Pengumpulan dan penyiapan bahan serta perumusan rencana pengelolaan pelabuhan perikanan pantai.
- b) Pelayanan teknis kapal perikanan dan kesyahbandaran.
- c) Penyusunan rencana program penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan serta pengujian penerapan standar penangkapan ikan.
- d) Penyusunan rencana pelaksanaan dan penyelenggaraan serta pembinaan pelayanan teknis kapal perikanan pantai.
- e) Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi, analisa terhadap pengelolaan dan pengembangan pelabuhan perikanan dan pemasaran hasil perikanan.

- f) Pelaksanaan koordinasi urusan keamanan ketertiban dan kebersihan kawasan pelabuhan pantai
- g) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sarana/ prasarana serta pelayanan teknis kapal perikanan.
- h) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Setelah adanya organisasi yang dibentuk dalam menjalankan kegiatan di PPP Tamperan, tentu ada susunan organisasi di dalamnya. UPPPP Tamperan dipimpin oleh seorang Kepala UPPPP dan dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu Sub Bagian Tata Usaha, Sub Bagian Pelayanan Teknis, dan Sub Bagian Kesyahbandaran. Setiap bagian mempunyai tugas pokok yang berbeda-beda sesuai dengan bidang yang dibawahinya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam kegiatan sehari-harinya PPP Tamperan di bawah kewenangan UPPPP Tamperan, yang dipimpin oleh seorang Kepala UPPPP dan dibantu tiga Sub Bagian di dalam susunan organisasinya. Untuk tugas pokok dan fungsinya, kesemuanya di atur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Nomor 061.1/568/118.4/2008 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan Kabupaten Pacitan.

2. Dampak Perubahan Sosial Masyarakat Pesisir Sekitar

Dalam sebuah kebijakan tentunya ada dampak yang muncul setelah kebijakan tersebut dijalankan atau dilaksanakan. Dampak kebijakan adalah perubahan kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari *output*

kebijakan. *Output* adalah barang, jasa atau fasilitas lain yang diterima oleh sekelompok masyarakat tertentu, baik kelompok sasaran maupun kelompok lain yang dimaksud untuk disentuh oleh kebijakan. Sedangkan *output* dan dampak itu sendiri merupakan sebuah konsekuensi dari kebijakan.

Sedangkan perubahan sosial adalah perubahan dalam proses sosial atau dalam struktur masyarakat. Perubahan sosial merupakan variasi dan cara hidup yang telah diterima baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan, material, komposisi penduduk, ideology maupun adanya difusi atau penemuan baru dalam masyarakat. Perubahan sosial juga merupakan segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya termasuk di dalamnya nilai, sikap, dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Dalam kebijakan peningkatan status PPI Tamperan menjadi PPP Tamperan, menimbulkan dampak tersendiri bagi masyarakat pesisir Desa Tamperan. Dampak tersebut memberikan perubahan sosial di tengah-tengah masyarakat Desa Tamperan. Dampak sosial dari peningkatan status dari PPI Tamperan menjadi PPP Tamperan yaitu adanya perubahan persepsi dan adanya interaksi sosial .

a. Persepsi Masyarakat

Persepsi adalah proses pemahaman ataupun pemberian makna atas suatu penafsiran, pengorganisasian dan penginterpretasian atas informasi yang diterimanya dari lingkungan. Persepsi yang muncul pada masyarakat Desa Tamperan dikarenakan hasil pemahaman masyarakat terhadap informasi yang

disampaikan sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda dari setiap individu. Perubahan persepsi yang terjadi pada masyarakat Desa Tamperan sebagai dampak kebijakan pemerintah dalam peningkatan status PPI Tamperan menjadi PPP Tamperan terdiri dari dua jenis persepsi, yaitu persepsi tentang bentuk fisik atau benda, dikarenakan kebijakan pemerintah mengenai pembangunan dan peningkatan status PPI Tamperan menjadi PPP Tamperan mengandung unsur fisik yang jelas sehingga perubahan persepsi yang terjadi diperoleh dari perbandingan fisik. Perubahan ini dikarenakan fisik pembangunan PPP Tamperan yang jauh lebih baik. Sedangkan perubahan yang mengarah pada persepsi sosial adalah perubahan persepsi yang tidak hanya memandang pembangunan dan peningkatan status PPP Tamperan secara fisik saja, tetapi pembangunan dan peningkatan status PPP Tamperan juga mengandung unsur subyektif, yang termasuk dalam persepsi ini adalah persepsi yang memandang bahwa dengan adanya PPP Tamperan diharapkan akan dapat memperbaiki kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat sekitar PPP Tamperan. Mengingat belum semuanya masyarakat Desa Tamperan merasakan dampak dari kebijakan pembangunan dan peningkatan status PPI Tamperan menjadi PPP Tamperan.

Perubahan persepsi yang terjadi dapat mengarah pada perubahan persepsi yang positif tentang adanya kebijakan pembangunan dan peningkatan status PPI Tamperan menjadi PPP Tamperan. Dimana perubahan persepsi positif adalah adanya persepsi masyarakat yang merasa senang terhadap kebijakan pemerintah dalam pembangunan dan peningkatan status PPI

Tamperan menjadi PPP Tamperan, dapat berfikir secara positif dan pola pikir dapat berkembang positif terhadap tujuan kebijakan pembangunan dan peningkatan status PPI Tamperan menjadi PPP Tamperan.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perubahan persepsi pada masyarakat Desa Tamperan setelah adanya kebijakan pembangunan dan peningkatan status PPI Tamperan menjadi PPP Tamperan. Perubahan persepsi tersebut merupakan perubahan yang cenderung mengarah pada perubahan positif. Perubahan positif tersebut dikarenakan masyarakat dapat mengolah dan menafsirkan apa yang diterima, selain itu masyarakat yang mengalami perubahan positif adalah masyarakat yang menerima perubahan serta memahami akan tujuan pembangunan. Perubahan persepsi masyarakat sangat ditentukan oleh pemahaman, lingkungan, kebudayaan, dan pola pikirnya.

b. Interaksi Sosial

Selain memberikan dampak perubahan persepsi pada masyarakat, kebijakan pembangunan dan peningkatan status PPI Tamperan menjadi PPP Tamperan juga memberikan dampak yang lain bagi masyarakat pesisir sekitar. Perubahan yang dialami masyarakat pesisir tersebut adalah adanya perubahan interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan yang dinamis yang menyangkut hubungan antara individu dan individu, individu dan kelompok dalam bentuk kerjasama, persaingan dan pertikaian. Perubahan interaksi sosial yang dialami oleh masyarakat Desa Tamperan terjadi dikarenakan adanya PPP Tamperan dan juga nelayan andon yang datang dari

berbagai daerah nusantara dan tinggal di pemondokan-pemondokan masyarakat Desa Tamperan.

Dalam interaksi sosial yang terbentuk ditemukan berupa adanya kerjasama atau timbal balik antara masyarakat Desa Tamperan dengan pengunjung atau pembeli. Bentuk interaksi ini mengarah pada perubahan positif karena dengan adanya kebijakan pembangunan dan peningkatan status PPI Tamperan menjadi PPP Tamperan terjadi peningkatan kualitas dan kuantitas interaksi dengan masyarakat yang lain dalam jumlah yang cukup besar. Dimana sebelum adanya PPP Tamperan ini para penjual hanya menjual dagangannya di sekitar pantai atau desa-desa lain terdekat. Sedangkan para pedagang ikan hanya cukup menjual dagangannya di lokasi TPI PPP Tamperan yang nantinya para pengunjung atau pedagang lain akan datang untuk membeli dengan jumlah sedikit ataupun dalam jumlah yang lumayan besar.

Selain memberikan dampak berupa interaksi sosial yang mengarah pada kerjasama, ada juga perubahan interaksi sosial yang mengarah pada terjadinya konflik. Konflik yang terjadi bukan disebabkan antar pedagang, melainkan terjadi antara masyarakat lokal atau masyarakat Desa Tamperan dengan nelayan andon yang dalam kesehariannya tinggal berdekatan. Dalam hasil penelitian, konflik antara masyarakat lokal dengan nelayan andon terjadi akibat perbedaan budaya antara keduanya. Nelayan andon yang sering melakukan pesta minum-minuman keras, dianggap dan dinilai meresahkan

bagi masyarakat lokal karena banyak anak-anak muda yang diajak untuk ikut pesta minum-minuman keras.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan telah terjadi perubahan interaksi sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Desa Tamperan, perubahan interaksi sosial yang terjadi mengarah pada perubahan positif namun ada juga yang mengarah pada perubahan negatif. Interaksi sosial yang mengarah pada perubahan positif adalah terjadi adanya kerjasama antara masyarakat lokal dengan masyarakat dari luar dalam hal ini pengunjung dan juga pedagang ikan dari luar desa atau kecamatan.

3. Dampak Perubahan Ekonomi Masyarakat Pesisir Sekitar

Selain menimbulkan dampak sosial setelah adanya PPP Tamperan, dampak juga dirasakan pada perubahan ekonomi masyarakat pesisir sekitar. Serupa dengan pengertian dampak pada sisi sosial, bahwa dampak kebijakan adalah perubahan kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari *output* kebijakan. *Output* adalah barang, jasa atau fasilitas lain yang diterima oleh sekelompok masyarakat tertentu, baik kelompok sasaran maupun kelompok lain yang dimaksud untuk disentuh oleh kebijakan. Sedangkan *output* dan dampak itu sendiri merupakan sebuah konsekuensi dari kebijakan.

Kebijakan pembangunan dan peningkatan status dari PPI Tamperan menjadi PPP Tamperan membawa dampak ekonomi yang sangat banyak. Perubahan ekonomi merupakan suatu proses yang terus menerus yang diusahakan dengan jalan memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sekitar lokasi PPP Tamperan yang masih termasuk dalam Desa Tamperan, merasakan berbagai dampak ekonomi yang ditimbulkan seiring adanya kebijakan pembangunan dan peningkatan status PPI Tamperan menjadi PPP Tamperan. Dampak tersebut adalah adanya penyerapan tenaga kerja dan juga peningkatan pendapatan masyarakat.

a. Penyerapan Tenaga Kerja

Dampak penyerapan tenaga kerja dari adanya kebijakan pembangunan dan peningkatan status dari PPI Tamperan menjadi PPP Tamperan, berdasarkan data yang ditampilkan diketahui bahwa jenis usaha yang ada di lokasi PPP Tamperan meliputi usaha rumah makan/warung makan, *cafe*, kios, pemondokan, pemanol, bongkar muat kapal, dan kemanan. Terdapat 20 (duapuluh) usaha rumah makan/warung makan, 1 (satu) usaha *cafe*, 8 (delapan) usaha kios, dan 68 (enampuluh delapan) usaha pemondokan di sekitar lokasi PPP Tamperan. Sedangkan di dalam lokasi PPP sendiri terdapat usaha berupa pemanol 35 (tigapuluh lima) orang, bongkar muat kapal 25 (duapuluh lima) orang, dan keamanan 5 (lima) orang. Dengan adanya usaha tersebut terjadi penyerapan sejumlah tenaga kerja yang cukup besar. Dari usaha rumah makan/ warung makan yang berada di lokasi sekitar PPP Tamperan cukup banyak menyerap sejumlah tenaga kerja, dari yang paling sedikit adalah 2 (dua) sampai 3 (tiga) orang yang pada warung makan, sedangkan untuk rumah makan terdapat 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) orang atau bisa juga lebih tenaga pekerja yang dipekerjakan. Sedangkan untuk kios

atau pemondokan merupakan milik perseorangan saja atau dikerjakan sendiri. Usaha yang juga menyerap tenaga kerja yang cukup banyak adalah pemanol yaitu sebanyak 35 (tigapuluh lima) orang, bongkar muat kapal 25 (duapuluh lima) orang, dan keamanan 5 (lima) orang. Kesemua tenaga kerja yang terserap dari adanya PPP Tamperan adalah kebanyakan warga Desa Tamperan.

Dari data yang disajikan, diketahui bahwa jenis usaha masyarakat tersebut yang merupakan pekerjaan tetap adalah rumah makan/warung makan, *cafe*, kios, dan pemondokan. Dikatakan pekerjaan tetap dikarenakan tidak mengenal musim, usahanya tetap berjalan sepanjang tahunnya. Sedangkan sejumlah pemanol dan pembongkar muat kapal adalah pekerja musiman, karena di waktu musim angin baratan dimana ikan-ikan jumlahnya sangat sedikit disebabkan tingginya gelombang laut dan kencangnya angin, kebanyakan nelayan memilih untuk tidak melaut agar tidak merugi. Sehingga tenaga pemanol dan bongkar muat hanya sedikit yang dibutuhkan, sehingga terkadang mereka juga menganggur.

Dari data tersebut sedikit bisa diambil kesimpulan bahwa telah terjadi perubahan ekonomi berupa penyerapan tenaga kerja dari masyarakat Desa Tamperan. Penyerapan tenaga kerja terjadi di bidang usaha perdagangan dan usaha jasa. Berbagai bentuk usaha tersebut menyerap tenaga kerja yang jumlahnya cukup banyak, sehingga masyarakat Desa Tamperan sendiri mendapatkan manfaatnya.

b. Tingkat Pendapatan

Sejalan dengan adanya penyerapan tenaga kerja, tentunya juga berpengaruh pada tingkat pendapatan masyarakat yang ikut bekerja di dalamnya. Dari data yang disajikan, diketahui pendapatan rata-rata para pelaku usaha baik diluar lokasi maupun di dalam lokasi PPP Tamperan mengalami kenaikan yang cukup besar terutama pada hari-hari libur, seperti hari sabtu dan minggu atau libur nasional. Adapun rata-rata pendapatan perharinya dari usaha rumah makan/warung makan di salah satu rumah makan adalah Rp. 850.000,- untuk hari biasa dan akhir pekan. Kemudian rata-rata perhari dari usaha berjualan seorang pedagang ikan adalah Rp. 100.000,-. Sedangkan untuk penghasilan perbualan dari bekerja sebagai petugas kebersihan di TPI PPP Tamperan yang sesuai dengan UMK adalah Rp. 1.000.000,-.Berbeda lagi pendapatan yang diperoleh dari usaha pemondokan yang setiap bulannya adalah Rp. 250.000,-. Ada juga yang bekerja sebagai pemanol dengan pendapatan perharinya Rp. 300.000,- kalau jumlah kapal yang sandar di dermaga untuk menurunkan hasil tangkapan banyak tentunya juga berpengaruh terhadap penghasilan yang akan didapatkan.

Pendapatan yang diterima tentunya bebeda-beda antara pemilik rumah makan/warung makan, pemilik kios, pemilik usaha pemondokan, penjual ikan, pemanol, bongkar muat kapal dan keamanan. Kebijakan pemerintah dalam pembangunan dan peningkatan status PPI Tamperan menjadi PPP Tamperan, memberikan manfaat yang besar utamanya bagi pedagang dan

penyedia jasa yang kesemuanya merupakan masyarakat Desa Tamperan. Artinya kehidupan masyarakat juga dapat ditentukan oleh kebijakan pemerintah melalui pembangunan sarana dan prasarana seperti PPP Tamperan di Desa Tamperan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kebijakan pembangunan dan peningkatan status PPI Tamperan menjadi PPP Tamperan di Desa Tamperan, Kelurahan Sidoharjo, Kabupaten Pacitan, dilaksanakan pada tahun 2003 yang pada akhirnya selesai pada tahun 2007 dan ditingkatkan statusnya melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep. 48/MEN/2007 tentang Peningkatan Status Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tamperan Menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan. Pembangunan dan peningkatan status PPP Tamperan ditujukan untuk memberikan fasilitas yang memadai dan sesuai dengan standar kelas pelabuhan perikanan pantai bagi masyarakat nelayan Kabupaten Pacitan, karena sebelumnya kondisi fisik bangunan PPI Tamperan sudah tidak layak lagi untuk kegiatan perikanan. Sehingga dengan adanya PPP Tamperan pemanfaatan potensi lestari perikanan laut di Kabupaten Pacitan bisa lebih optimal.

Pengelolaan PPP Tamperan sendiri dikelola bersama antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dibantu Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan. Hal itu dikarenakan dana APBD Kabupaten Pacitan tidak cukup untuk membiayai perawatan dan pemeliharaan teknis PPP Tamperan.

Pengelola teknis PPP Tamperan diserahkan kepada UPPPP Tamperan agar mempermudah pengawasan serta pengendalian dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur. Dasar pembentukan UPPPP Tamperan sendiri berdasarkan pada Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Nomor 061.1/568/118.4/2008 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan Kabupaten Pacitan.

Namun dalam pelaksanaannya ternyata kebijakan tersebut secara tidak langsung telah mendorong terjadinya perubahan sosial dan ekonomi pada masyarakat pesisir sekitar, khususnya pada masyarakat Desa Tamperan. Dari segi sosial, perubahan tersebut dapat dilihat dari perubahan persepsi masyarakat Desa Tamperan terhadap adanya PPP Tamperan yang menilai dengan adanya PPP Tamperan memberikan perubahan kondisi lingkungan yang lebih ramai dibandingkan dulunya yang sepi dan tidak banyak orang yang tertarik untuk sekedar melihat-lihat aktifitas di PPI Tamperan atau membeli ikan secara langsung. Dari segi fisik bangunan juga tidak lepas dari penilaian nelayan yang merasa bahwa dengan adanya PPP Tamperan mempermudah nelayan untuk melakukan kegiatan perikanan. Selain perubahan persepsi, juga terjadi perubahan interaksi sosial yang terjadi baik di lokasi PPP Tamperan maupun di lingkungan perkampungan masyarakat Desa Tamperan. Perubahan interaksi sosial yang dialami oleh masyarakat Desa Tamperan terjadi dikarenakan adanya pedagang ikan yang datang dari luar desa atau bahkan dari luar kabupaten yang datang ke PPP Tamperan

untuk membeli ikan dari pengepul. Selain itu perubahan interaksi sosial yang terjadi di tengah-tengah lingkungan masyarakat Desa Tamperan adalah terjadinya konflik antara warga Desa Tamperan dengan nelayan andon yang datang dari luar kota bahkan luar pulau.

Sedangkan dari segi ekonomi, perubahan tersebut dapat dilihat dari jumlah penyerapan tenaga kerja yang terjadi di sekitar lokasi PPP Tamperan maupun di dalam lokasi PPP Tamperan sendiri. Berbagai bentuk usaha diciptakan oleh masyarakat Desa Tamperan mulai dari usaha perdagangan hingga usaha jasa seperti rumah makan dan kios/toko. Sedangkan di dalam lokasi PPP Tamperan, penyerapan tenaga kerja juga ada pada tenaga pemanol, bongkar muat kapal, kuli, petugas kebersihan dan juru timbang di TPI PPP Tamperan. Selain memberikan kesempatan kerja, perubahan ekonomi juga terjadi pada jumlah pendapatan masyarakat. Hal ini tentunya sejalan dengan banyaknya penyerapan tenaga kerja yang terjadi. Karena sebelumnya masyarakat hanya berprofesi sebagai nelayan saja atau bahkan tidak bekerja sama sekali.

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini, penulis beranggapan ada beberapa saran yang ingin disampaikan oleh penulis sebagai berikut:

1. Perlu adanya koordinasi yang jelas antara UPPPP Tamperan, pihak keamanan yang berwenang dan perwakilan dari warga Desa Tamperan (RT/RW) mengenai penyelesaian atau penanganan adanya konflik-konflik

kecil yang terjadi antara warga Desa Tamperan dengan nelayan andon, sehingga masyarakat tidak merasa resah.

2. Untuk menambah jumlah penyerapan tenaga kerja di PPP Tamperan, sekiranya ada kerjasama dengan investor di bidang usaha pengalengan ikan seperti yang ada di PPP Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Sehingga jumlah tenaga kerja yang terserap juga semakin besar dan secara langsung menambah penghasilan bagi masyarakat yang bekerja di usaha pengalengan ikan tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Aji, Firman B dan Sirait, Martin. 1982. *Perencanaan dan Evaluasi*. Bina Aksara. Jakarta.

Alwi Hasan, dkk. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka.

Arikunto, S. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Arsyad, Linkolin. 1999. *Pengantar Dan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*. BPFY Yogyakarta.

Dahuri, Rokhim. 1996. *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.

Faisal, Sanapiah. 2003. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Grafindo Persada

Hasibuan, M.S.P. 1987. *Ekonomi Pembangunan dan Pembangunan Pedesaan*. Yogyakarta: PT Piara Kencana.

Islamy, Irfan. 1991. *Prinsip-prinsip Perumusan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.

_____. 2007. *Prinsip-prinsip Penyusunan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor 48 Tahun 2007 tentang Peningkatan Status Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tamperan Menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 tahun 2012 tentang Pelabuhan Perikanan

Maryati, dan Suryawati. 2003. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Erlangga.

Moleong. Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Murdiyatomoko, dan Handayani. 2004. *Sosiologi 1*. Jakarta: Grafindo Media Pratama
- Nazir, Moh. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ningtyas, Ika. 2011. "Nelayan-Banyuwangi-Dirugikan-Nelayan-Pendatang", diakses pada Tanggal 9 Maret 2014 dari <http://www.tempo.co/read/news/2011/02/23/090315495/>
- Nugroho, Riant. 2009. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Gramedia.
- Pacitan News Online. 2012. "Cegah Konflik Nelayan, Tiga Kabupaten, Pacitan, Wonogiri Dan Gunungkidul Sepakat Kerjasama", diakses pada Tanggal 9 Maret 2014 dari <http://pacitankab.go.id/berita/berita.php?id=834>
- Parson, W. 2008. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan*. Diterjemahkan oleh: Tri Wibowo Budi Santoso. Jakarta: Kencana
- Peraturan Pemerintah (PP) RI No. 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan
- Riggs, Fred W. 1986. *Administrasi Pembangunan: Batas-batas, Strategi Pembangunan Kebijakan dan Pembaharuan Administrasi*. Jakarta: CV Rajawali.
- Robbins, S.P. 2003. *Perilaku Organisasi. Jilid I*. Jakarta: PT INDEKS Kelompok Gramedia.
- Siagian, Sondang P. 1988. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: CV Rajawali.
- Siagian, Sondang P. 2004. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemardjan, Selo dan Soelaiman Soemardi. 1993. *Setangkai Bunga Sosiologi*. Jakarta: Yayasan Badan Penerbit FE UI.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

- Suryono, Agus. 2004. *Pengantar Teori Pembangunin*. Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1995. *Pengantar Admnistrasi Pembangunan*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- Triatmodjo, Bambang. 2010. *Perencanaan Pelabuhan*. Yogyakarta: Beta Offset.
- Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
- Wahab, Solichin Abdul. 2001. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Wahab, Solichin Abdul. 2005, 2008. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibawa, Samodra. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Widodo, Joko. 2012. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Yuliati, Yayuk dan Mangku Poernomo. 2003. *Sosiologi Pedesaan*. Malang: Risalah Kerto Pustaka Utama.



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KEP. 48/MEN/2007
TENTANG
PENINGKATAN STATUS PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI) TAMPERAN
MENJADI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI (PPP) TAMPERAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- | | |
|-----------|---|
| Menimbang | <ol style="list-style-type: none"> a. bahwa dengan adanya penambahan armada kapal dengan jangkauan operasional semakin jauh, maka memerlukan pelayanan prima dengan fasilitas/sarana pendaratan yang memadai; b. bahwa untuk memenuhi perkembangan dan tuntutan tersebut, Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tamperan telah meninggalkan fasilitas pendukungnya, sehingga dapat ditinggalkan menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan; c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri; |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Pelabuhan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007; |



21 2009 3:51PM HP LASERJET FAX

p.2

8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006.
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007;
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KFP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2007;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2006 tentang Perubahan Perikanan;

- Menperhatikan :
1. Surat Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 523/17598/021/2007, tanggal 13 Desember 2007;
 2. Surat Bupati Pacitan, Nomor 523.42/934/408.31/2007, tanggal 18 September 2007;
 3. Surat Kepala Diras Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur, Nomor 523.04/16439/118/2007, tanggal 13 Desember 2007;

MEMUTUSKAN:

- | | |
|------------|--|
| Menetapkan | KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENINGKATAN STATUS PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI) TAMPERAN MENJADI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI (PPP) TAMPERAN. |
| PERTAMA | Meningkatkan status PPI Tamperan menjadi PPP Tamperan. |
| KEDUA | Menyerahkan tanggung jawab dan kewenangan pengelolaan serta pemanfaatannya kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. |
| KETIGA | Pembinaan teknis operasional terhadap PPP Tamperan dilakukan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. |

021-2000-05100 HP LASERJET FAX

P.3

- KEEMPAT : Untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dikum KETIGA, Kepala PPP Tamperan wajib menyampaikan laporan kegiatan pelabuhan perikanan setiap bulan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

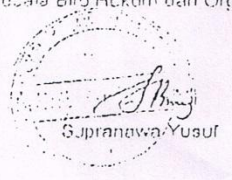
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2007

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I.

ttd

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kecala Biro Hukum dan Organisasi



PEDOMAN WAWANCARA

1. Kenapa lokasi PPP di Kabupaten Pacitan dipilih di Pantai Tamperan?
2. Kenapa PPI Tamperan perlu untuk dikembangkan dan ditingkatkan statusnya menjadi PPP Tamperan?
3. Kebijakan apa yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai dasar hukum atas peningkatan status dari PPI Tamperan menjadi PPP Tamperan?
4. Siapakah aktor pemangku atau pengelola kebijakan di PPP Tamperan?
5. Kebijakan apa yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai dasar hukum atas pembentukan pengelola kebijakan di PPP Tamperan?
6. Seperti apa struktur organisasi yang ada di UPPPP Tamperan dan tugas pokok dan fungsi di setiap bagiannya?
7. Bagaimanakah persepsi saudara mengenai kebijakan pemerintah dalam peningkatan status PPI Tamperan menjadi PPP Tamperan?
8. Bagaimanakah perubahan interaksi sosial yang terjadi .di lokasi PPP Tamperan?
9. Bagaimanakah perubahan interaksi sosial yang terjadi antara masyarakat lokal (Desa Tamperan) dengan nelayan andon yang ada di Desa Tamperan?
10. Sudah berapa lama saudara bekerja/ menjalankan profesi yang saudara tekuni?
11. Sebeleum bekerja seperti ini, dulu saudara bekerja sebagai apa?

12. Berapa keuntungan yang di dapat oleh saudara setiah harinya dari pekerjaan/ usaha yang saudara tekuni?



DOKUMENTASI

a. PPP Tamperan



b. Aktifitas Pemanol



c. Aktifitas Warga Tamperan yang bekerja sebagai Tim Bongkar Muat



d. Dengan Narasumber/ Masyarakat di Lokasi PPP Tamperan





**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN**

Jl. Jend. A. Yani No. 152-B Telp. 8291927, 8281672, 8288564, 8288112, 8292326
Fax. 8288148, Tromol Pos 12/SBWO Wonocolo, e-mail : ikanjtm@indosat.net.id
SURABAYA 60235

Surabaya, 16 Juni 2014

Nomor : 523/10828/116.03/2014
Sifat : Segera
Lampiran : 1 eks
Perihal : Permohonan Tempat Riset/ Survey
di PPP Tamperan Kab. Pacitan

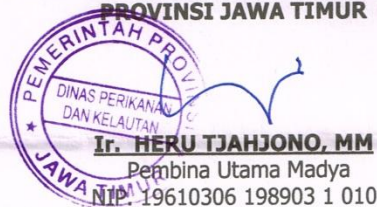
Kepada Yth,
Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi
UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG
di
MALANG

Menunjuk surat Saudara Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang Nomor : 7072/UN10.3/AK/2014 tanggal 9 Juni 2014 perihal seperti dalam pokok surat, maka dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur tidak keberatan adanya pelaksanaan Tempat Riset/Survey di PPP Tamperan pada tanggal 9 Juni 2014 s/d 31 Juli 2014 di Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan Kabupaten Pacitan.
2. Pada kegiatan tersebut tidak mengganggu aktifitas operasional pelabuhan dan menjaga kebersihan dan ketertiban diareal pelabuhan. Untuk pelaksanaannya dimohon berkoordinasi dengan Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan Kabupaten Pacitan Sdr. Moh. Imam Subekti, S.Pi nomor telp. 085259147147.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
PROVINSI JAWA TIMUR**


Ir. HERU TJAHJONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19610306 198903 1 010

Tembusan : Yth.

- Sdr. Kepala Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai (UPPPP) Tamperan Kab. Pacitan
- Arsip.





PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jl. MT Haryono no. 60 Telp. (0357) 881066
PACITAN

SURAT KETERANGAN
Untuk Melakukan Penelitian
Nomor : 072 / 130 /408.45 /2014

Dasar :

1. Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah , Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Organisasi Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Pacitan ;
6. Peraturan Bupati Pacitan Nomor : 3 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan ;
7. Surat : “ **FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA**”
 Nomor : 4729UN10.3/AK/ /2014
 Tanggal : 11 April 2014
 Perihal : Riset/survey

Dengan dasar tersebut diatas dengan ini kami **Tidak Keberatan** dan memberikan Surat Keterangan untuk melakukan Riset/survey di Kabupaten Pacitan kepada :

- a. Nama : MIZHAR ANTON SUJARWO
- b. NIM : 105030100111044
- c. Alamat : RT. 005/ RW. 004 Pucangsewu Kab. Pacitan
- d. Pekerjaan : Mahasiswa
- e. Kebangsaan : Indonesia
- f. Tema/Keg : “ **Evaluasi Kebijakan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan Terhadap Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Sekitar (Studi Pada PPP Tamperan Kelurahan Sidoharjo Kabupaten Pacitan)** “
- g. Lokasi : PPP Tamperan Kab.Pacitan
- h. Tanggal : 1 April s/d 30 Juni 2014
- i. Pengikut : -



Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku dalam Daerah Hukum Pemerintah setempat.
2. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan-kegiatan diluar hal-hal tersebut diatas.
3. Setelah melakukan Survey/Penelitian/Praktek Kerja Lapangan, sebelum meninggalkan Kabupaten Pacitan diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Camat setempat dan Pemerintah Kabupaten Pacitan ;
4. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah selesai melakukan kegiatan Survey/Penelitian/ Praktek Kerja Lapangan, diwajibkan memberikan laporan tentang Hasil Survey/Penelitian/ Praktek Kerja Lapangan dan hasil lainnya kepada :
 - a. Bupati Pacitan
 - b. Kepala Bappeda Kab Pacitan .
 - c. Kepala Bakesbang dan Politik Kab Pacitan .
 - d. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Instansi terkait.
5. Surat Keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila ternyata bahwa Pemegang Surat Keterangan ini tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas.

Pacitan, 14 April 2014


**KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN PACITAN**
Des. SUPOMO, MM
Perbina Utama Muda
NIP. 19630306 198211 1 001

Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Pacitan
2. Kodim 0801 Pacitan
3. Kapolres Pacitan
4. Kepala Bappeda Kab. Pacitan
5. Kepala Balitbang dan Statistik Kab. Pacitan
6. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pacitan
7. Camat Pacitan
8. Kepala BPS Pacitan
9. KepalaUPT. PPP Tamperan Kab. Pacitan
10. Kepala Kelurahan Sidoharjo

CURRICULUM VITAE

Nama : Mizhar Anton Sujarwo

NIM : 105030100111044

Tempat/ tanggal lahir : Pacitan, 06 Oktober 1991

Alamat : Jl. Cokroaminoto No.30, Kelurahan Pucangsewu,
Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur

Agama : Islam

Pendidikan :

- | | |
|--|-----------|
| 1. TK Pertiwi, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur | 1996-1998 |
| 2. SD Negeri Pacitan 1, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur | 1998-2004 |
| 3. SMP Negeri 1 Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur | 2004-2007 |
| 4. SMA Negeri 1 Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur | 2007-2010 |

Pendidikan Non Formal:

1. Program Komputer DAT

Pengalaman Organisasi

1. OSIS SMP Negeri 1 Pacitan 2005/2006 dan 2006/2007
2. OSIS SMA Negeri 1 Pacitan 2007/2008 dan 2008/2009